

STRATEGI PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA



Direktorat
dayaan



DIREKTORAT PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA
DIREKTORAT JENDERAL BUDAYA, SENI DAN FILM
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA



370.119



DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

STR

STRATEGI PENGANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Maha Kuasa, bahwa kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Kegiatan inilah yang kami susun dalam bentuk buku dan siap untuk segera dibaca oleh para pembaca yang budiman.

Buku ini mencakup kompilasi dari data-data yang telah dikumpulkan melalui studi lapangan, forum FGD (*Focus Group Discussion*), dan diskusi tenaga ahli. Kegiatan ini merupakan suatu inisiatif awal dimana sebelumnya pembangunan karakter dan pekerti bangsa tidak pernah dirumuskan secara eksplisit sebagai suatu program yang sistematis dan terencana. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan memberikan nilai strategis kepada perjalanan sejarah bangsa menuju cita-cita Proklamasi kemerdekaan.

Kami haturkan pula ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini sedari awal hingga sampai pada tahap akhir.

Hasil kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa sebagaimana tertuang dalam laporan ini jauh dari sempurna. Masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan, guna untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada.

Tim Penyusun

STRATEGI PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA

Ringkasan Eksekutif

Permasalahan kebangsaan pasca-Reformasi tidak berhenti pada persoalan-persoalan penataan sistem ekonomi dan politik yang pelik semata, akan tetapi menyangkut moralitas dan rasa kebangsaan yang dipandang mengalami degradasi. Pada level yang lebih abstrak, ini adalah suatu permasalahan jangka panjang yang menyangkut lemahnya pembinaan mentalitas Manusia Indonesia dibandingkan beratnya tantangan yang dihadapi –baik secara eksternal maupun internal.

Keberhasilan Jepang sebagai suatu kekuatan ekonomi dunia yang bangkit pasca kehancuran Perang Dunia II merupakan salah satu contoh yang mencolok mengenai pentingnya pembangunan karakter bangsa. Bangsa Jepang menyadari pentingnya identitas nasional yang kuat, sebagai tiang mental-spiritual untuk menopang keberhasilan di bidang industri dan perdagangan. Jepang antara lain melakukan riset-riset mengevaluasi perubahan karakter nasional setiap 5 tahun sekali, yang dilakukan sejak tahun 1953. Melalui riset-riset berskala nasional tersebut dapat dipantau perubahan-perubahan yang terjadi. Betapa pun juga, karakter nasional dipahami bukan merupakan sesuatu yang statis dan tidak berubah,

melainkan aspek yang dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan bangsa mereka di berbagai bidang. Sejak tahun 1971 Jepang mengadakan pula studi-studi komparatif karakter nasional bangsa-bangsa lain, guna mencari masukan dan perbandingan dengan karakter nasional Jepang.

Tanpa bermaksud membandingkan antara Bangsa Jepang dan Indonesia, bila ditelisik dari sejarahnya, Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa secara sistematis dan terencana di Indonesia belum pernah dilakukan. Kendati demikian, upaya-upaya yang mengarah kepada isu-isu pembangunan karakter dan pekerti bangsa telah dilakukan jauh-jauh hari. Bahkan sebelum negara Indonesia itu sendiri diproklamasikan sebagai negara merdeka berdaulat; yaitu perdebatan sengit mengenai orientasi dan arah kebudayaan Indonesia di masa depan, yang terkenal dengan Polemik Kebudayaan antara STA dan Sanusi Pane, Ki Hadjar Dewantara dan lain-lain pada sekitar 1935-36.

Konsep Pembangunan Kebudayaan Ki Hadjar Dewantara merupakan tonggak lain dari upaya serupa itu, khususnya dengan adanya pasal 34 UUD 1945 tentang kebudayaan. Kendati tidak memberikan hasil-hasil kongkrit untuk meletakkan dasar pembangunan karakter dan pekerti bangsa, namun konsep tersebut menyatu dalam konstitusi dan memberi nilai penting kepada upaya-upaya pembangunan kebudayaan di masa selanjutnya. Ir Soekarno merupakan tokoh nasional yang pertama merumuskan secara tegas dan jelas, *nation character building* sebagai salah satu tujuan nasional.

Sistematika pembangunan karakter dan pekerti bangsa mulai tersusun di masa Orde Baru, manakala Soeharto sebagai presiden menggagas upaya pemasyarakatan Pancasila melalui suatu program nasional yang disebut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa). Akan tetapi disayangkan bahwa mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan sentralistik *top-down*, melalui pembentukan wacana yang cenderung indoktrinasi, dengan tidak mengakomodasi keragaman multikulturalisme yang mendasari Keindonesiaan itu sendiri.

Direktorat Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa, suatu direktorat baru di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, menyadari tugas berat tersebut manakala program-program aksi yang hendak dilakukan harus berhadapan dengan tantangan strategis yang belum tersistematisir dan belum ada contoh baku sebelumnya. Maka, kegiatan penyusunan strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa ini adalah suatu langkah permulaan untuk mengidentifikasi kekuatan-kelemahan dan peluang-ancaman PKPB, serta menggariskan suatu kerangka strategis yang dapat digunakan sebagai titik-tolak pengembangan program-program di masa mendatang.

Studi penyusunan pembangunan karakter dan pekerti bangsa dilakukan dengan mengambil 3 komponen utama, yakni **pemerintah** (Direktorat PKPB dan departemen/instansi terkait), **organisasi kemasyarakatan** (khususnya gerakan-gerakan swadaya yang berinisiatif memelopori dan menggugah kesadaran bangsa mengenai pentingnya persoalan yang sedang dihadapi), dan **akar rumput** (yakni kelompok-kelompok masyarakat adat yang beraktivitas pada level daerah dan nilai-nilai kearifan lokal). Disadari bahwa jangkauan permasalahan yang ada sesungguhnya jauh lebih luas, dimana aktor-aktor yang terlibat tidak hanya 3 komponen di atas. Di sini belum dimasukkkan komponen

kebangsaan lain seperti kaum ulama, para pendidik, kelompok pemuda, kelompok-kelompok gerakan perempuan, dan lain-lain yang memiliki peran tak kalah penting.

Studi diawali dengan suatu forum FGD di antara tenaga-tenaga ahli (antropologi, kebudayaan, fisalat, pendidikan, sosiologi, komunikasi massa) untuk mengidentifikasi isu-isu dan tantangan strategis yang mengemuka saat ini di bidang PKPB. FGD diselenggarakan 2 Agustus 2006 (9:00-15:00) bertempat di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia Depok. Hasil FGD kemudian ditindak-lanjuti dengan suatu studi lapangan menggunakan pendekatan *grounded research*, dengan mengirim peneliti ke 4 kluster yang diwakili kota-kota besar yang dianggap merupakan lokasi pertemuan berbagai sukubangsa (Medan, Yogyakarta, Balikpapan dan Makassar).

Studi lapangan berlangsung 7 September- 7 Oktober 2006, dengan 4 tenaga peneliti senior dan 8 peneliti lokal, dengan memberikan gambaran kepada nilai-nilai karakter dan pekertri yang dimiliki oleh sejumlah sukubangsa yang diambil sebagai perwakilan pada masing-masing kluster. Sebagai suatu data lapangan, hasil penelitian menunjukkan ketidak-seragaman pada masing-masing kluster dan memerlukan proses analisis abstraksi untuk mendapatkan gambaran lebih umum. Maka, diperoleh suatu Model Generik yang terdiri dari 9 Nilai-Nilai (yakni meliputi: **Sumber Nilai** : Nilai Adat bersumber dari Nilai Agama; **Nilai Dasar Hidup** : Malu; **Tertib Sosial** : Keseimbangan; **Hubungan dengan Orang Lain** : Kreatif; **Sikap terhadap Kelompok** : Orientasi kepada Kelompok Kesukuan).Tenggang Rasa; **Hubungan dengan Sistem Sosial** : Adaptif dan Tahu diri; **Kehormatan Diri** : Menjaga Harga Diri; **Kepemimpinan** : Panutan; **Etos Kerja** : Kerja Keras dan

Abstraksi yang berupa model nilai-nilai generik tersebut lantas diverifikasikan kembali melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden yang mewakili sukubangsa di 4 kluster tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat sikap responden terhadap 9 nilai-nilai tersebut pada aspek kognitif, afektif dan konatif. Hasil yang diperoleh adalah **Rendah** (Nilai Adat bersumber dari Nilai Agama; Nilai Tertib Sosial dan Keseimbangan; dan Nilai Tenggang Rasa) **Sedang** (Nilai adaptif dan tahu diri; Nilai Kepemimpinan sebagai panutan); dan **Tinggi** (Nilai Malu; Nilai Sikap terhadap Kelompok, Nilai Menjaga Harga Diri dan Nilai Etos Kerja Keras).

Pengembangan lebih lanjut adalah Model 9 Nilai + 3; dimana disadari bahwa nilai-nilai pada Model Generik belum menggambarkan kenyataan yang lebih kompleks di masyarakat. Maka ditambahkan adanya **Budaya Ilmu Pengetahuan**, **Budaya Dagang/Wirausaha**, dan **Budaya Kreatif** sebagai nilai-nilai yang dipandang penting bagi masa depan bangsa menyongsong persaingan global abad 21.

Untuk mengangkat temuan-temuan dari hasil studi kepada suatu strategi pembangunan yang dapat diaplikasikan, maka diselenggarakan FGD II yang mengundang perwakilan-perwakilan sukubangsa yang diteliti, intansi/departemen terkait (departemen pendidikan nasional, departemen pertahanan dan keamanan, kementerian pemberdayaan perempuan, departemen komunikasi dan informasi, dan departemen dalam negeri), relawan (organisasi kemasyarakatan, pemerhati, dan pakar yang terkait), dan perwakilan sukubangsa yang tidak termasuk dalam studi lapangan (non-kluster). FGD II diselenggarakan 18-20 November 2006 bertempat di Wisma Makara UI dan Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia Depok.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Dari hasil FGD II, dirumuskan suatu kisi-kisi strategi PKPB. Berbagai masukan dan hasil diskusi dikelompokkan kepada strategi dan program Jangka Pendek, strategi dan program Jangka Menengah, dan strategi dan program Jangka Panjang.

Strategi dan program Jangka Pendek pada intinya adalah mengangkat isu-isu pembangunan karakter dan pekerti bangsa agar dapat disadari, dipahami dan menjadi perhatian bagi segenap pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Tujuannya adalah *meletakkan dasar-dasar sistematis secara kelembagaan maupun program aksi untuk Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa secara nasional*. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran-sasaran yang harus dicapai adalah:

1. Membangun dan membangkitkan kesadaran, minat, perhatian, dan keseriusan (*concern*) semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
2. Mengarahkan kesadaran, minat, perhatian, dan keseriusan itu untuk membangun pembagian kerja sinergis dengan komponen-komponen kebangsaan yang ada.

Secara umum komponen-komponen kebangsaan yang dimaksud di atas terbagi dalam beberapa kelompok besar: Instansi / Departemen Terkait (Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dll); Gerakan-Gerakan Swadaya Masyarakat (Gerakan Jalan Lurus, Yayasan Jatidiri Bangsa, Gema Nusa (Gerakan Membangun Nurani Bangsa), Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia, Barisan Kebangkitan Indonesia Raya); dan Akar Rumpun (Masyarakat Adat).

Program Aksi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan karakter dan pekerti bangsa dalam jangka pendek yang berhasil diidentifikasi melalui studi ini adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan studi lanjutan; Pelaksanaan studi-studi yang dikaitkan dengan upaya pembangunan karakter dan pekerti bangsa perlu diteruskan. Tujuan dan sasaran dari studi-studi tersebut adalah untuk membangun dasar konseptual yang kuat melalui kajian-kajian dari berbagai sudut-pandang disiplin keilmuan. Selain pendekatan antropologi yang menjadi arus-utama dalam studi ini, perlu dikembangkan kajian pembangunan karakter dan pekerti bangsa dari sudut-pandang ilmu psikologi (psikologi sosial, karakter), sosiologi (sosiologi kelompok, sosiologi perkotaan, manajemen konflik), kesejahteraan sosial (pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial), pendidikan (pedagogi, kurikulum), kebudayaan (filologi, folklor, kebudayaan daerah), dan seterusnya.

Workshop; Pelaksanaan *workshop-workshop* dilakukan dengan mengambil tema-tema spesifik yang mendukung tema besar 'tantangan, hambatan, peluang dan ancaman pembangunan karakter dan pekerti bangsa'. Tujuan dan sasaran *workshop* ialah: Menyamakan persepsi tentang konsep, definisi, dan ruang-lingkup pembangunan karakter dan pekerti bangsa di antara berbagai komponen kebangsaan yang dilibatkan, agar ada kesatuan bahasa

dan tindakan dalam menerjemahkan program-program pembangunan karakter dan pekerti bangsa di level implementasinya; Menyamakan persepsi tentang prioritas, pembagian kerja, dan pentahapan kerja dalam melaksanakan program-program pembangunan karakter dan pekerti bangsa di antara komponen-komponen kebangsaan yang berbeda; dan Mengembangkan kerja lintas-sektoral dan lintas-departemen, jika dimungkinkan, untuk melaksanakan suatu program pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang berskala lebih luas dan membutuhkan sumber daya besar.

Kongres nasional PKPB; Diperlukan suatu kegiatan massal yang menampung berbagai aspirasi, gagasan pemikiran, dan sumbang-saran terhadap pembangunan karakter dan pekerti bangsa, guna untuk membuka peluang adanya kerjasama sinergis di antara komponen-komponen kebangsaan pada level nasional. Sebagai suatu kongres nasional, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan meliputi berbagai bentuk acara, antara lain diusulkan adalah: Seminar-seminar Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa; Pameran-Pameran yang mengangkat topik lokal maupun nasional seputar pembangunan karakter dan pekerti bangsa; Deklarasi atau Dokumen Pernyataan Sikap Bersama yang mengetengahkan urgensi pentingnya dan mendesaknya masalah pembangunan karakter dan pekerti bangsa; dan Tema-tema acara kesenian yang mendukung kepada pembangunan karakter dan pekerti bangsa, baik melalui cabang-cabang seni tradisi maupun seni-seni modern (tari, musik, drama, film, sastra, seni lukis).

Legal drafting, Aspek regulasi hukum penting untuk menjamin *political will* pemerintah di bidang pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang jelas-jelas memberikan banyak sinyal negatif yang harus ditanggapi dengan kebijakan dan program kerja yang relevan. Untuk dapat melakukan hal itu perlu adanya kepastian hukum. Strategi *legal drafting* dalam jangka pendek adalah: (1) Menggalang dukungan yang lebih luas dari komponen-komponen kebangsaan yang seide-sepemikiran untuk menyamakan persepsi dan kemudian mengarahkan kerjasama ke tingkat legislasi (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan); (2) Membangun opini publik yang menguntungkan, sehingga upaya untuk memperjuangkan adanya suatu payung hukum yang jelas bagi pembangunan karakter dan pekerti bangsa di tingkat nasional dapat memperoleh dukungan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui strategi media (koran, televisi, radio) maupun dialog-dialog terbuka yang bersifat umum untuk konsumsi publik.

Kerjasama Stakeholder; Dari hasil workshop, diharapkan ada jalinan antara stakeholder terkait dengan visi dan persepsi PKPB. Adapun jalinan tersebut dapat terwujud sebagai berikut: (1) Kerjasama struktural, (2) Pertukaran informasi, dan (3) Pembagian tugas dan kebijakan terkait dengan PKPB.

Strategi dan Program Jangka Menengah diarahkan adalah untuk *menciptakan perangkat-perangkat infrastruktur yang diperlukan baik di pusat maupun daerah, dan adanya strategi promosi yang baik*. Program Jangka Menengah meliputi antara lain program di bidang pendidikan, program pemberdayaan masyarakat untuk PKPB, program hubungan antar Lembaga mendukung prinsip-prinsip *good governance*, program sosialisasi nilai-nilai melalui institusi keluarga, promosi melalui medium kesenian lokal, promosi melalui medium kesenian modern, dan kerjasama stakeholder bersama departemen/instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat adat di daerah.

Program di bidang Pendidikan; Pengertian pendidikan dalam arti penanaman nilai tidak dapat direduksi hanya pada lembaga pendidikan formal dan non-formal saja. Pendidikan nilai-nilai adalah tugas dan tanggung-jawab semua orang. Dalam hal ini bisa dilihat hubungan segitiga *orangtua-pemerintah-masyarakat* yang secara bersama-sama menentukan kualitas pendidikan karakter dan pekerti. Untuk itu, program-program yang dapat dilakukan adalah seperti: (a). Merevitalisasi dan menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti, sehingga tetap relevan dengan pergeseran nilai dan perubahan konteks yang ada. Orang tua perlu dilibatkan agar ada konsistensi yang diajarkan di sekolah dan dipraktikkan di rumah. Varesasi metoda pengajaran misalnya: *outbound*. (b). Untuk memperkuat karakter dan pekerti dibutuhkan adanya suatu mata pelajaran khusus karakter dan pekerti untuk sekolah-sekolah formal (SD, SMP dan SMU), atau muatan nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa menjadi bagian mata pelajaran yang lainnya sehingga menjadi suatu yang terintegratif. Pendidikan nilai-nilai sebelumnya pernah diakomodasi pada mata pelajaran agama dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila), PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), dan sekarang menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Akan tetapi titik-berat pada mata pelajaran tersebut adalah pembelajaran normatif, dalam arti mengenal norma-norma secara kognitif saja, yang baru merupakan satu syarat pendidikan pekerti. Keutuhan pendidikan pekerti baru tercapai bila meliputi aspek kognitif, afektif dan konatif, serta aspek pembiasaan (psikomotorik). ; (c) Selain mengefektifkan wahana pendidikan pekerti yang ada, perlu difikirkan upaya menanamkan pendidikan pekerti melalui wahana penyampai pesan yang populer seperti komik, kartun, dongeng, cerita anak, film, musik, tari, majalah dan lain sebagainya yang mudah dicerna anak-anak dan remaja.

Program Pemberdayaan Masyarakat; Pemberdayaan (keseluruhan) pusat-pusat kegiatan (*community centre*) dalam arti menciptakan tempat-tempat yang baru atau menumbuh-kembangkan *community center* yang sifatnya lokal yang ada pada masyarakat setempat. Gelanggang remaja (sebagai *community center*) diaktifkan kembali, dan di daerah-daerah yang belum mempunyai perlu didirikan yang baru. Karang Taruna dikembangkan sebagai wadah anak-anak muda mengembangkan diri melalui kegiatan sosial, berkesenian, aktivitas ekonomi, maupun keilmuan / kemanusiaan. Atau *community center* yang sifatnya lokal yaitu poskamling (ronda), dll. Pemberdayaan ini sampai pada tingkat bawah pada level masyarakat seperti RT atau RW.

Program Hubungan antar Lembaga; Kampanye Karakter dan Pekerti Pegawai Pemerintahan, dengan sasaran seperti kedisiplinan, pemisahan domain publik-privat secara tegas, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pelayanan prima, dan lain-lain. Kegiatan *role-modeling* dengan menampilkan contoh-contoh konkrit dari orang-orang dalam pemerintahan yang mampu menunjukkan teladan karakter dan pekerti yang unggul (keteladanan). Mekanisme *reward and punishment*, misalnya dengan memberi penghargaan khusus kepada pegawai pemerintahan yang berjasa dalam memberikan pelayanan publik.

Program Sosialisasi Nilai-Nilai melalui Institusi Keluarga; Kampanye penguatan nilai-nilai dalam keluarga, seperti hubungan orang tua - anak, sesama saudara, dan dengan kerabat. Sosialisasi sarana-sarana pendidikan karakter dan pekerti dalam keluarga, seperti lewat cerita dongeng sebelum tidur, kegiatan bersama anggota keluarga, pendidikan agama dalam

keluarga, dan lain-lain. Pemberdayaan (*empowering*) terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam rangka mendukung nilai-nilai karakter dan pekerti dalam keluarga.

Program Sosialisasi Nilai-Nilai Melalui Medium Kesenian Tradisi; Pesta Budaya tahunan, di setiap daerah / provinsi dalam rangka menghidupkan kebudayaan lokal. Menghidupkan kembali kesenian-kesenian lokal yang sudah mati yakni dengan menampilkan kembali baik secara utuh atau mengkreasi sesuai kondisi saat ini (kekinian). Inventarisasi kekayaan tradisi yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa. Pembentukan atau penguatan komunitas-komunitas kesenian di tingkat lokal dan nasional (sanggar, kelompok seni, masyarakat pencita kesenian), khususnya yang mendukung pengembangan karakter dan pekerti.

Program Sosialisasi Nilai-Nilai Melalui Medium Kesenian Modern; Revitalisasi televisi sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa. Pemanfaatan medium kesenian modern dan *pop culture* sebagai sarana memperluas penyampaian pesan, terutama kepada lapisan muda. Melakukan kegiatan-kegiatan di pusat berkumpul (*meeting point / community center*), dimana anggota masyarakat ramai berkunjung, terutama lapisan muda, seperti pusat perbelanjaan, kampus, jalan protokol, dan lain-lain. Festival film pendek, lomba cipta lagu, lomba mengarang, festival teater, dan lain-lain dengan tema karakter dan pekerti bangsa.

Strategi dan Program Jangka Panjang diarahkan adalah untuk: (1) terbentuknya karakter nasional Indonesia yang kuat dan mantap, dengan berlandaskan kepada kebudayaan multikultural bangsa yang terdiri dari suku-sukubangsa yang bersifat serumpun dari segi bahasa dan adat-istiadatnya (*pluralisme serumpun*); (2) tersusunnya akhlak dan pekerti bangsa yang baik pada level perilaku individu, perilaku sosial, maupun perilaku institusional. Program jangka panjang meliputi program yang berkaitan dengan titik tolak tradisi, program yang berkaitan dengan pengembangan tradisi baru, dan program yang berkaitan dengan penciptaan konteks Sosial-Ekonomi-Politik yang Mendukung Munculnya Karakter dan Pekerti.

Program yang Berkaitan dengan Titik-Tolak Tradisi: Banyak nilai-nilai praktis positif dalam tradisi. Nilai gotong-royong saat ini semakin terkikis, bagaimana strategi untuk menumbuhkannya kembali? Program-program jangka panjang hendaknya membantu nilai-nilai praktis dan positif yang berasal dari tradisi tersebut untuk direvitalisasi dan diangkat kembali ke permukaan. Acuan perangkat norma-norma universal yang berlaku umum, seperti misalnya nilai-nilai etika, kode etik profesi, nilai-nilai Hak-Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya, merupakan bagian dari pembangunan pekerti bangsa. Akan kekayaan warisan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang turun-temurun merupakan sumber yang sangat kaya dan tidak habis-habisnya. Perlu inventarisasi, kodifikasi, dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dengan cara menghidupkan kembali dan menempatkan di dalam konteks-konteks terbaru. Nilai-nilai tersebut tidak asing bagi masyarakat karena telah melekat dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari mereka.

Program yang Berkaitan dengan Pengembangan Tradisi Baru: Tidak semua nilai-nilai karakter dan pekerti harus berasal dari tradisi, karena dinamika kehidupan mengharuskan tantangan-tantangan baru yang tidak dapat dijawab dengan tradisi. Oleh karena itu, perlu pengembangan tradisi-tradisi baru yang mendukung adaptasi manusia Indonesia ke dalam dunia kehidupan modern, termasuk untuk mengangkat nilai-nilai lokal agar tetap relevan

dengan zaman. Salah satu masukan peserta FGD, bahwa **BUDAYA TULIS** atau tradisi **TULIS** perlu didukung-dikembangkan untuk mendampingi tradisi lisan yang menjadi milik asli suku bangsa-suku bangsa di Indonesia. Termasuk tradisi disiplin, budaya antri, budaya tepat-waktu, menjaga kebersihan di area-area publik, dan lain-lain yang perlu disosialisasikan.

Program yang Berkaitan dengan Penciptaan Konteks Sosial-Ekonomi-Politik yang Mendukung Munculnya Karakter dan Pekerti: Timbulnya permasalahan karakter dan pekerti bangsa tidak terlepas dari konteks dimana persoalan-persoalan tersebut terjadi, contohnya seperti: (a) Kesempatan kerja: terbatasnya kesempatan kerja memungkinkan pergeseran karakter dan pekerti ke arah yang negatif, (b) Pendidikan: keterbatasan mendapat pendidikan menyebabkan sulit untuk mengadaptasi nilai-nilai baru ke dalam kerangka karakter dan pekerti yang dimiliki, (c) Pemaksaan ajaran dan agama: penanaman nilai-nilai agama dan ajarannya secara kaku akan melemahkan daya adaptasi individu untuk menyesuaikan diri dalam pergaulan masyarakat yang majemuk. Hal ini mempersulit dikembangkan karakter dan pekerti bangsa yang kuat. Termasuk di sini adalah pengajaran nilai-nilai secara dogmatis justru akan mendatangkan reaksi sebaliknya dari pihak yang menerima (misalnya, menertawakan, menjadi sinis, apatis, atau tidak peduli, dll).

Secara keseluruhan, strategi utama yang hendak diambil adalah *menjadikan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa sebagai bagian dari kepentingan nasional yang melibatkan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif.....	v
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Bagan & Gambar	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Mekanisme Pelaksanaan dan Ruang Lingkup Studi	3
1.4. Sistematika Penulisan Laporan	13
BAB II TINJAUAN UMUM.....	7
2.1. Karakter.....	7
2.2. Pekerti.....	10
2.3. Defenisi dan Konsep.....	14

BAB III KILAS BALIK SEJARAH	19
3.1. Polemik Kebudayaan.....	20
3.2. Pembangunan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara	24
3.3. Ir. Soekarno: <i>Character National Building</i>	27
3.4. Orde Baru: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)	29
3.5. Reformasi.....	31
BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI SWOT.....	35
4.1. Isu-isu Permasalahan PKPB Saat ini	35
4.2. Analisis Lingkungan Internal	39
4.3. Analisis Lingkungan Eksternal	41
4.4. Analisis Strategik PKPB	43
BAB V HASIL STUDI LAPANGAN	47
5.1. Kluster I (Sumatera).....	52
5.2. Kluster II (Jawa-Bali).....	60
5.3. Kluster III (Kalimantan).....	68
5.4. Kluster IV (Sulawesi)	74
BAB VI MODEL GENERIK	81
6.1. Model Generik	81
6.2. Model 9 nilai plus 3	82
6.3. Analisis Model.....	83
6.4. Saran dan Rekomendasi	88
BAB VII REKOMENDASI STRATEGI.....	91
7.1. Strategi Jangka Pendek.....	91
7.2. Strategi Jangka Menengah	99
7.3. Strategi Jangka Panjang	105
7.4. Strategi Aplikasi Model Generik.....	109

BAB VIII KISI-KISI STRATEGI PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA	115
8.1. Landasan Konstitusional	115
8.2. Visi dan Misi	116
8.3. Tujuan	116
8.4. Sasaran	117
8.5. Rumusan Konsep PKPB	118
8.6. Strategi Utama	119
8.7. Kebijakan PKPB	119
8.8. Strategi Implementasi PKPB	143
BAB IX PENUTUP	147
PROFIL PENELITI	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Ruang-Lingkup Kegiatan Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa	5
Tabel 2.2.	Unsur-unsur Keutamaan Watak	18
Tabel 2.3.	Konfederasi Virtue	18
Tabel 5.4	Nilai Lintas Kluster	48
Tabel 5.5	Data Konfigurasi Hasil Verifikasi Seluruh Kluster	51
Tabel 5.6.	Tabel Konfigurasi Nilai Kluster Sumatera.....	57
Tabel 5.7	Data Tingkat Kognitif, Afektif, dan Konatif terhadap 9 Nilai	59
Tabel 5.8	Tingkat Sikap Seseorang Terhadap 9 Nilai.....	59
Tabel 5.9	Konfigurasi Nilai Kluster II Jawa-Bali	65
Tabel 5.10	Data Tingkat Kognitif, Afektif, dan Konatif terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti	67
Tabel 5.11	Tingkat Sikap Seseorang Terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti.	67
Tabel 5.12	Konfigurasi Nilai Kluster III Kalimantan.....	72
Tabel 5.13	Data Tingkat Kognitif, Afektif, dan Konatif terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti	73
Tabel 5.14	Tingkat Sikap Seseorang Terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti.	73
Tabel 5.15	Konfigurasi Nilai Kluster IV Sulawesi	78
Tabel 5.16	Data Tingkat Kognitif, Afektif, dan Konatif terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti	79

Tabel 5.	Tingkat Sikap Seseorang Terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti.	80
Tabel 8.17.	Jabaran Program Aksi.....	121
Tabel 8.18.	Rencana Aksi Studi Jangka Pendek	122
Tabel 8.19	Rencana Aksi Workshop	123
Tabel 8.20	Rencana Aksi Legal Drafting.....	124
Tabel 8.21	Rencana Aksi Bidang Pendidikan	125
Table 8.22	Rencana Aksi Bid. Pemberdayaan Masyarakat.....	126
Tabel 8.23	Rencana Aksi Hubungan Antar Lembaga	127
Tabel 8. 25	Rencana Aksi Sosialisasi Medium Kesenian Tradisi	128
Tabel 8.26	Rencana Aksi Sosialisasi Melalui Medium Kesenian Modern	129
Tabel 8.27	Rencana Aksi Kerjasama Stakeholder	130
Tabel 8.28	Rencana Aksi Aplikasi Model Generik	131
Tabel 8.29	Nilai Dasar Hidup: MALU	132
Tabel 8.30	Tertib Sosial: Keseimbangan	133
Tabel 8.31	Hub. Dengan Orang Lain : Tenggang Rasa	134
Tabel 8.32	Hub. Dengan Sistem Sosial: Adaptif dan Tahu Diri.....	135
Tabel 8.33	Tabel Kehormatan Diri: Menjaga Harga Diri	136
Tabel 8.34	Kepemimpinan: Pemimpin adalah Panutan	137
Tabel 8.35	Etos Kerja: Kerja Keras Dan Kreatif.....	138
Tabel 8.36	Tabel Sikap Terhadap Kelompok	139
Tabel 8.37	Budaya Ilmu Pengetahuan.....	140
Tabel 8.38	Budaya Dagang	141
Tabel 8.39	Budaya Mencipta	142

DAFTAR BAGAN & GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Pekerjaan PKPB	4
Bagan 2.2.	Unsur-unsur Pembentuk Karakter Bangsa	10
Bagan 4.2.	Sistematika SPKPB	46
Gambar 5.1	Peta Wilayah Kota Medan.....	52
Gambar 5.2	Peta Kota Yogyakarta	60
Gambar 5.3	Peta Kota Balikpapan	68
Gambar 5.4	Peta Administrasi Profinsi Sulawesi Selatan.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar-Belakang

Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa merupakan upaya yang terdapat pada berbagai konteks ruang dan waktu. Permasalahan-permasalahan yang erat kaitannya dengan situasi moral bangsa serta pembangunan mentalitasnya mendapat perhatian besar dalam hal ini. Khususnya di dalam arus globalisasi, yang masuk melalui berbagai saluran dan media komunikasi menyebar aliran informasi melintasi batas-batas negara, yang pada gilirannya menimbulkan persoalan krusial dimana warga bangsa mempertanyakan jatidiri berhadapan dengan nilai-nilai 'universal' seperti HAM, Hak Milik Intelektual, Konservasi Lingkungan, Pemberantasan AIDS sedunia, dan lain-lain.

Bagi bangsa Indonesia, dalam arti yang berbeda, pembangunan karakter dan pekerti bangsa memiliki makna signifikan tersendiri secara internal. Di samping persoalan kontemporer terkait dengan globalisasi, ia merupakan tema mendasar bagi kesejarahan bangsa Indonesia, sebagai Bangsa Majemuk yang diwarisi dengan nilai-nilai keragaman sukubangsa. Di dalam perjalanan sejarah, komponen-komponen kebangsaan senantiasa berulang-ulang memperdebatkan pertanyaan mengenai identitas dan jatidiri Keindonesiaan itu sendiri. Ini menjadi tanda bahwa jatidiri, karakter dan pekerti, serta nilai luhur merupakan persoalan mendasar yang terlalu penting untuk diabaikan. Barangkali, Indonesia setepatnya memang adalah suatu *imagined society* sebagaimana dikonsepsikan oleh ahli Keindonesiaan Benedict Anderson (1991), yaitu suatu bangsa yang terlahir melalui proses bentukan anggota-anggotanya.

Adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yang pertama kali mempopulerkan nama “Indonesia” ketika beliau dibuang ke Belanda (1913), dengan mendirikan Indonesische Pers-Bureau. Tahun 1922, Mohammad Hatta, mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, kemudian berinisiatif mengubah nama organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda (Indische Vereeniging, 1908) menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpunan Indonesia. Mohammad Hatta pernah menulis, “*De toekomstige vrije Indonesische staat* (Negara Indonesia merdeka yang akan datang), mustahil disebut ‘Hindia’ atau ‘Hindia Belanda’. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (*een politiek doel*), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk memujukannya tiap orang Indonesia (*Indonesier*) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”

Akan tetapi saat ini, pada jajaran normatif dan kesulitaan, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terkenal “ramah-tamah” dan sopan-santun mengalami pembalikan-citra yang luarbiasa manakala berlangsung peristiwa kekejaman dan pelanggaran hak asasi, baik oleh negara maupun masyarakat, penjarahan, pembakaran fasilitas umum termasuk rumah ibadah, pelecehan hukum serta bentrokan fisik antar warga (Abdul Aziz, 1998). Nilai-nilai luhur yang Pancasila, sebagai kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal berbagai sukubangsa yang mendiami Nusantara dan digali oleh *the founding father* sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pada gilirannya seperti kehilangan makna.

Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa, sebagai suatu direktorat baru di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, adalah suatu tugas besar dan berat untuk memulai kembali upaya-upaya sistematis pembangunan karakter dan pekerti bangsa dalam situasi tersebut. Dengan tujuan ideal membangun kembali integritas dan integrasi kebangsaan yang mulai retak, maka dipandang sangat urgen dan mendesak agenda untuk merumuskan suatu strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang sesuai dengan tantangan ke depan yang sedang dan akan dihadapi bangsa ini.

Disadari bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga elemen penting yang akan berperan dalam membentuk suatu strategi nasional bagi pembangunan karakter dan pekerti bangsa, yakni **pemerintah** (dalam hal ini Direktorat Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa serta instansi/departemen terkait), **organisasi kemasyarakatan** (khususnya gerakan-gerakan swadaya yang berinisiatif memelopori dan menggugah kesadaran bangsa mengenai pentingnya persoalan yang sedang dihadapi), dan **akar rumput** (yakni kelompok-kelompok masyarakat adat yang beraktivitas pada level daerah dan nilai-nilai kearifan lokal). Ini merupakan tahapan paling awal, karena pada tahap berikutnya diasumsikan akan melibatkan lebih banyak lagi komponen kebangsaan yang belum disebutkan di sini, seperti kaum ulama, para pendidik, kelompok pemuda, kelompok-kelompok gerakan perempuan, dan lain-lain yang memiliki peran tidak kalah pentingnya.

Untuk menyatukan seluruh elemen tersebut dalam skema bersama, diperlukan pemikiran strategis yang dapat diperinci secara jelas dan memiliki target sasaran yang jelas pula. Sebagian dari upaya tersebut adalah apa yang dilakukan dalam studi ini, yakni menggali nilai-nilai karakter dan pekerti pada sejumlah sukubangsa yang ada di Indonesia. Disamping itu, hasil studi didiskusikan dan dipaparkan kepada elemen-elemen tersebut di atas (pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan akar rumput), untuk disempurnakan dan dipertajam menjadi suatu masukan strategi bagi pembangunan karakter dan pekerti bangsa 5-10 tahun ke depan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Studi penyusunan *Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa* bermaksud adalah untuk memberi pedoman pelaksanaan bagi pembangunan karakter dan pekerti bangsa ke depan. Adapun tujuan kegiatan adalah memberikan masukan/rekomendasi untuk:

- a. Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) PKPB lima tahunan.
- b. Pengembangan kebijakan pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah:

- *Merekomendasikan perumusan konsep, visi, misi kebijakan dan program-program aksi pembangunan karakter dan pekerti bangsa.*
- *Merekomendasikan suatu kerangka strategi implementasi pembangunan karakter dan pekerti bangsa, khususnya untuk 5-10 tahun ke depan.*

1.3. Mekanisme Pelaksanaan Dan Ruang Lingkup Studi

Mekanisme pelaksanaan Studi didasarkan pada pendekatan berbasis lokal, yakni nilai-nilai kesukubangsaan sebagaimana tercermin pada beberapa kota yang diambil sebagai lokasi studi mewakili 4 (empat) kluster yang meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk itu, digunakan metode *grounded research* (lihat **Lampiran 1**), yang dimaksudkan untuk menemukan nilai-nilai dari bawah. Metode ini digunakan secara terbatas, yakni tidak memenuhi rentang-waktu yang cukup panjang (hanya dalam waktu 1 bulan), akan tetapi ini dibutuhkan untuk mendapatkan penggalan nilai-nilai secara langsung di dalam

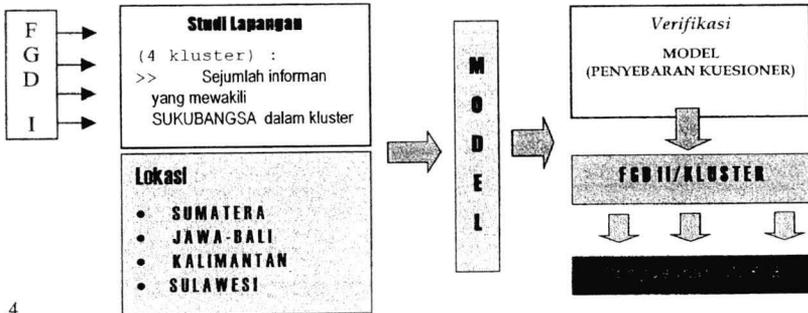
konteks dimana individu-individu bersangkutan saling berinteraksi (yakni konteks masyarakat perkotaan).

Selengkapnya, FORMASI NILAI-NILAI yang hendak digali melalui kegiatan studi ini ditelusuri melalui empat kelompok aktivitas yang saling berkesinambungan.

- FGD I: yakni mengundang para pakar tenaga ahli dari berbagai disiplin terkait (antropologi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, manajemen konflik, dan ilmu komunikasi) untuk menggali temuan berupa isu-isu dan kendala strategis yang dihadapi dalam PKPB dewasa ini.
- Studi *Grounded*: yaitu melakukan penelitian lapangan kepada sejumlah sukubangsa yang dipilih berdasarkan pengelompokan wilayah (KLUSTER) yang dibagi empat: Kluster I (Sumatera) mengambil lokasi di Medan, Kluster II (Jawa-Bali) mengambil lokasi Yogyakarta, Kluster III (Kalimantan) mengambil lokasi Balikpapan, dan Kluster IV (Sulawesi) mengambil lokasi Makassar.
- Studi Verifikasi: Penyebaran kuesioner ke masing-masing kluster untuk mendapatkan verifikasi terhadap model nilai-nilai karakter dan pekerti yang sudah disusun melalui hasil studi lapangan.
- FGD II: mengundang wakil-wakil dari Kluster dan lembaga/instansi terkait untuk mendapat masukan-masukan strategi PKPB ke depan, berdasarkan temuan yang diperoleh pada kegiatan sebelumnya. Dalam FGD ini diundang pula wakil-wakil sukubangsa yang tidak termasuk/belum terwakili dari Kluster (perwakilan non-kluster), serta kelompok relawan (pemerhati, cendikiawan, budayawan yang meminati masalah karakter dan pekerti bangsa serta dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki concern pada masalah pembangunan karakter dan pekerti bangsa).

ALUR FIKIR ini dapat disimak sebagaimana terlihat pada bagan berikut.

Bagan 1.1. Alur Pekerjaan PKPB



Tabel 1.1. Ruang-Lingkup Kegiatan Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

	KEGIATAN	DESKRIPSI
1	Studi Kepustakaan	Melakukan kajian kepustakaan yang relevan
2	Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan	Identifikasi permasalahan, metodologi dan kerangka konsep analisis, instrumen penelitian, serta rencana kerja
3	Penyusunan Laporan Pendahuluan	25 eksemplar
4	Pelaksanaan Pembahasan Laporan Pendahuluan	Dilaksanakan bersama tim narasumber/tim pengarah
5	Studi Lapangan	Observasi, interview, dan penyebaran kuesioner
6	Pengolahan Data dan Analisis	Perancangan konsep kebijakan, strategi, rencana, program aksi
7	Penyusunan Laporan Kemajuan	25 eksemplar
8	Pelaksanaan Pembahasan Laporan Kemajuan	Bersama tim narasumber / tim pengarah
9	Penyempurnaan dan Penajaman Materi	Strategi, rencana program aksi serta model-model PKPB
10	Penyusunan Laporan Akhir Sementara	30 eksemplar
11	Pelaksanaan Pembahasan Laporan Akhir Sementara	Bersama tim narasumber/tim pengarah
12	Penyusunan Laporan Akhir dan <i>Executive Summary</i>	60 eksemplar

Ruang Lingkup Kegiatan, sebagaimana tertera pada tabel 1.1., merupakan tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam studi ini.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan disusun terdiri dari pembabakan sebagai berikut.

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi latarbelakang, tujuan dan sasaran, mekanisme pelaksanaan dan ruang lingkup studi, dan sistematika penulisan laporan.

Bab 2. Tinjauan Umum

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai pembangunan karakter dan pekerti, serta definisi dan konsep yang mendasari pelaksanaan studi. Penjelasan yang ada di dalam bab ini sebagian merupakan kajian literatur dan sebagian lagi adalah masukan-masukan yang diterima melalui FGD.

Bab 3. Kilas Balik Sejarah

Bab ini berisi tinjauan kilas-balik sejarah terhadap tokoh-tokoh nasional telah mengembangkan pemikiran mengenai pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Bab ini terdiri dari Polemik Kebudayaan, Pembangunan Kebudayaan Ki Hajar, Dewantara, Nation Character Building dari Ir. Soekarno, Penataran P4 Orde Baru dan masa Reformasi.

Bab 4. Analisis Lingkungan Strategik (SWOT)

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai isu-isu dan kendala strategis pembangunan karakter dan pekerti bangsa, analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, dan analisis strategiknya.

Bab 5. Hasil Studi Lapangan

Bab ini melaporkan hasil-hasil temuan yang diperoleh pada studi lapangan, hasil-hasil dari studi verifikasi, yang disusun berdasarkan pengelompokan wilayah (Kluster I, II, III dan IV).

Bab 6. Model Generik

Bab ini merupakan abstraksi dari hasil studi lapangan. Berisi tentang model yang berhasil dibangun dari data yang diperoleh di lapangan, penyempurnaan model, dan analisis model.

Bab 7. Rekomendasi Strategi

Bab ini berisi rekomendasi yang diajukan, berupa strategi jangka pendek, strategi jangka menengah dan strategi jangka panjang. Sebagian besar isi bab ini merupakan hasil rekapitulasi masukan-masukan yang diterima dalam FGD II, ditambah diskusi tim ahli dan kajian literatur.

Bab 8. Kisi-Kisi SPKPB

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kerangka ringkas kisi-kisi SPKPB (Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa) untuk 5-10 tahun ke depan. Bab ini sekaligus merupakan intisari dari bab-bab terdahulu.

BAB II

TINJAUAN UMUM

Pembangunan karakter dan pekerti bangsa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara eksternal maupun internal. Bab ini memberikan tinjauan umum pembangunan karakter dan pekerti bangsa, sebagai dasar bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Tinjauan umum tersebut akan memperlihatkan secara garis besar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

2.1. Karakter

2.1.1. Pengertian Karakter Bangsa

Istilah “karakter” (*character*) dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani yang artinya “membentuk ke dalam tulisan” (*to inscribe*). Hal ini mencerminkan bahwa karakter bukanlah sesuatu yang ada secara alamiah/dibawa sejak lahir, melainkan suatu proses pembentukan yang dipengaruhi oleh berbagai masukan yang diterima seseorang dari lingkungannya, mulai dari keluarga, lingkup pertemanan, sekolah, tempat pekerjaan, dan seterusnya. Kamus Webster’s New World Dictionary (Third Collenge Edition) mengartikan karakter sebagai watak yang kuat (*moral strenght, self-discipline, fortitude*).

Karakter bangsa melekat pada sejarah bangsa, sebagai cermin dari rasa senasib-sepenanggungan di dalam suatu komunitas maupun sebagai kesepakatan nilai-nilai dan norma budaya yang mengikat anggotanya. Definisi-definisi berikut ini memberikan gambaran

mengenai karakter nasional sebagai proses sejarah maupun karakter nasional sebagai kebudayaan:

1. **Wilson (2000: ix):** “karakter bangsa adalah generalisasi-generalisasi terhadap karakter nasional atau nasionalitas [yang sesungguhnya memiliki variasi perbedaan di tingkat individu], yang dikembangkan untuk mempertegas hal-hal yang membuatnya berbeda (dengan karakter bangsa-bangsa lain)”.
2. **Bauer (1907):** ... bangsa adalah sekumpulan orang-orang yang dikat oleh nasib yang sama (*a common fate*) sehingga mereka memiliki suatu karakter (nasional) yang sama. Nasib yang sama itu terutama adalah ...sejarah yang sama dan karakter nasional yang sama, yang hampir selalu mempersyaratkan adanya kesatuan bahasa (*uniformity of language*).
3. **Kymlicka (1913:11):** ... ‘bangsa’ diartikan adalah suatu komunitas historis, yang sedikit-banyak telah terinstitusionalisasi secara sempurna, menempati wilayah atau tanah air tertentu, memiliki kesamaan bahasa dan kebudayaan.
4. **Hofstede (1980):** kebudayaan nasional adalah “program mental kolektif (*collective mental programming*) yang mengkondisikan nilai-nilai dan persepsi-persepsi sekumpulan orang”.

Dari defnisi-defnisi di atas, terlihat bahwa karakter nasional memiliki keterkaitan erat dengan persamaan bahasa, nilai-nilai warisan budaya, serta simbol-simbol kultural dan politik yang mengikat dan mewakili citra suatu kelompok komunitas, sehingga pada tingkatan tertinggi disebut bangsa.

2.1.2. Pembangunan Karakter Bangsa

Keberhasilan Jepang sebagai suatu kekuatan ekonomi dunia yang bangkit pasca kehancuran Perang Dunia II merupakan salah satu contoh yang mencolok mengenai pentingnya pembangunan karakter bangsa. Sejak awal, bangsa Jepang menyadari pentingnya identitas nasional yang kuat untuk menopang keberhasilan di bidang-bidang pembangunan lain.

Upaya yang dilakukan Jepang antara lain ialah riset-riset untuk mengevaluasi perubahan karakter nasional setiap 5 tahun sekali, yang dilakukan sejak tahun 1953. Melalui riset-riset berskala nasional tersebut dapat dipantau perubahan-perubahan yang terjadi. Karakter nasional dipahami bukan merupakan sesuatu yang statis dan tidak berubah, melainkan sesuatu yang dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan bangsa mereka di berbagai bidang. Lebih jauh, sejak tahun 1971 diadakan studi-studi komparatif

dengan membandingkan karakter nasional bangsa-bangsa lain, guna mencari masukan dan perbandingan dengan karakter nasional Jepang.

Pembangunan karakter nasional di Indonesia merupakan suatu proses panjang yang dapat dilacak jejaknya sejak kebangkitan kesadaran nasional tahun 1908 (dengan berdirinya Budi Utomo), Sumpah Pemuda 1928, dan selanjutnya berpuncak pada Proklamasi 1945. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pembangunan karakter bangsa menjadi proses integral yang melibatkan keanekaragaman unsur-unsur kebangsaan. Salah satunya adalah upaya Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, yang mengedepankan istilah '*national character building*' sebagai salah satu program pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan di masa itu.

2.1.3. Unsur-Unsur Karakter Bangsa

Factor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya karakter bangsa telah diselidiki oleh sejumlah ahli. Montesquieu membahas masalah karakter bangsa dengan menggunakan istilah *esprit général*, dimana dalam istilah ini tercakup karakteristik-karakteristik moral dan kebiasaan-kebiasaan berfikir dan berperilaku yang berasal dari suatu kombinasi unik antara lingkungan alam atau iklim (*climate*), agama, hukum, kebijaksanaan pemerintah (*maxims of government*), sejarah, nilai-nilai dan tata krama sopan santun sosial (*mores and manners*). Suatu bangsa dapat dibedakan dengan bangsa lain adalah melalui pola bentukan yang muncul dalam kombinasi faktor-faktor tersebut serta kualitas-kualitas moral yang dihasilkannya. Karakter moral terdiri dari perpaduan sifat-sifat baik maupun sifat-sifat buruk suatu bangsa merupakan bagian dari *esprit général*.

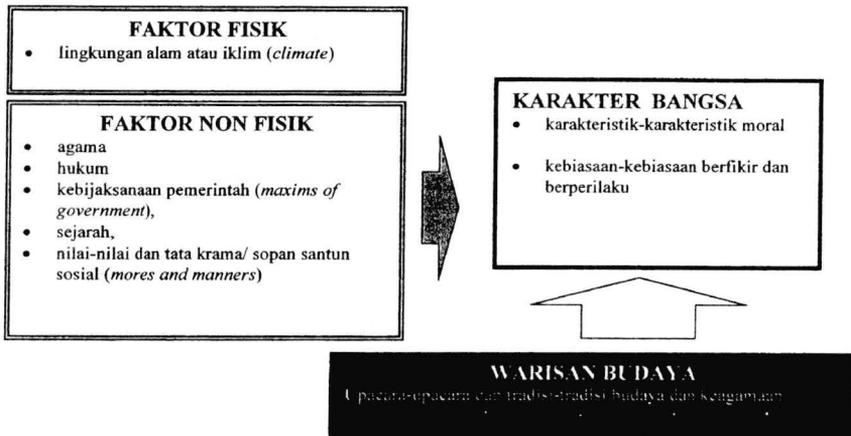
Sebenarnya konsep 'karakter nasional' itu sendiri telah menjadi bahan perdebatan semenjak abad ke-18, yaitu bertitik-tolak dari pengamatan bahwa tiap-tiap bangsa ternyata memiliki karakteristik-karakteristik khusus, kendati para ahli berbeda pendapat tentang faktor atau unsur-unsur apakah yang membentuk keunikan karakter nasional tersebut. Perdebatan umumnya menyangkut perbedaan tentang peranan dari faktor-faktor fisik dan faktor-faktor spiritual di dalam proses pembentukan ciri-ciri nasional suatu bangsa.

Espiard de Laborde (1743) dalam *Essais sur le génie et le caractère des nations*, mengatakan bahwa karakter nasional atau *génie des nations* memiliki dua makna yang berbeda. Pada satu sisi, karakter nasional merupakan 'sebab' (*cause*) dan terdiri dari karakteristik-karakteristik fisik; di sisi lain, ia merupakan akibat (*result*) dan terdiri dari jiwa atau semangat bangsa (*spirit*) yang merupakan kombinasi antara watak alamiah (*natural temper*) dengan kebiasaan (*customs*) dan opini.

Jean-Jacques Rousseau, memperkaya konsep karakter nasional dengan menambahkan unsur kesadaran kebangsaan (*national consciousness*). Diasumsikan bahwa setiap bangsa

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

memiliki karakter khas yang terbentuk dari watak (*temperament*), ciri-ciri fisik (*physical traits*), norma-norma dan kualitas moral (*mores and moral qualities*), namun Rosseau menambahkan upacara-upacara dan tradisi-tradisi budaya dan keagamaan yang memberikan ikatan kesadaran kebangsaan kepada para anggotanya.



Bagan 2.2. Unsur-Unsur Pembentuk Karakter Bangsa

2.2. Pekerti

Pekerti dapat diartikan sebagai keteraturan perilaku yang merupakan hasil perpaduan antara bakat pembawaan dan pengaruh pendidikan serta lingkungan. Dengan kata lain, adanya pekerti tidak lepas dari suatu hasil proses pendidikan dan penanaman nilai-nilai (sosialisasi dan internalisasi), yang dimulai sejak kanak-kanak hingga dewasa.

2.2.1. Pembangunan Pekerti sebagai Penanaman Nilai-Nilai

Pendidikan pekerti tidak sama dengan pendidikan biasa, yang pada umumnya hanya menekankan salah satu dari faktor kognitif, afektif atau psikomotorik. Sementara penanaman

nilai-nilai akan berhasil apabila ketiga aspek kognitif-afektif-psikomotorik berlangsung secara simultan.

Pembangunan pekerti lebih luas lagi, karena tidak hanya pendidikan pekerti di sekolah terhadap anak-anak. Pembangunan pekerti bangsa adalah penanaman nilai-nilai di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga lebih kompleks dan terkait dengan pembinaan mentalitas pada anggota masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan pekerti membutuhkan syarat-syarat, diantaranya adalah:

- a) **Kesatuan Tujuan dan Sasaran.** Pembangunan pekerti melibatkan segenap elemen masyarakat, tidak hanya sekolah dan lembaga pendidikan, sehingga perlu adanya suatu kejelasan visi-misi bersama (*the ultimate goal*) agar tercipta sinergi atau kesatuan tujuan/sasaran. Tiap elemen kemasyarakatan (*stakeholders*) dapat mengambil peran yang berbeda, namun dengan visi-misi bersama ini maka peran-peran tersebut dapat saling mendukung dan menguatkan, sehingga tujuan akhir lebih cepat terselenggara.
- b) **Standar Pekerti.** Tiap program pekerti bangsa seyogyanya menekankan manfaat-manfaat positif dari pola perilaku baik yang disarankan, serta menjadikan pengembangan pekerti sebagai aset kepribadian seseorang. Sekaligus ditegaskan pula konsekuensi-konsekuensi negatif dari perilaku tercela dan mendukung tiap-tiap upaya pengurangan/menghilangkan perilaku-perilaku semacam itu.
- c) **Relevansi.** Untuk mencapai efektivitas yang diharapkan, pembangunan pekerti harus ditopang dengan berbagai kajian, observasi, penelitian, survey dan lain sebagainya yang ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai masalah nyata yang ada di masyarakat. Pendidikan pekerti tidak boleh berhenti pada tataran normatif, melainkan harus terkait langsung dengan sikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari seseorang.
- d) **Skala Prioritas.** Masalah-masalah pekerti bangsa perlu diklasifikasi dan dikelompokkan di dalam suatu skala prioritas, sesuai dengan urgensinya, untuk kemudian dikaitkan dengan pembangunan pekerti bangsa. Dari segi tujuan positif (penguatan pekerti baik), sebagai contoh, adalah program meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial, semangat gotong royong, kepedulian, tertib di jalan, dan lain-lain. Dari segi tujuan negatif (pencegahan pekerti tercela), misalnya program mengurangi kenakalan remaja, kehamilan luar nikah, penyalah-gunaan obat dan minuman keras, pelecehan seksual di tempat kerja, dan lain-lain. Dengan demikian program pekerti bangsa mendapatkan ukuran-ukuran yang kongkret dan relevan dengan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat, dan dapat menjadi acuan kerja untuk para *stakeholder* yang terkait.
- e) **Role Modeling.** Pembangunan pekerti bangsa harus diperkuat dengan teladan nyata (*role modeling*). Apalagi di dalam masyarakat Indonesia, yang notabene masih sangat

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

kuat dipengaruhi budaya paternalistik, maka tokoh-tokoh masyarakat dan *public figure* merupakan sasaran sorotan yang ucapan, perbuatan dan sikapnya kerap ditiru dan dicontoh oleh masyarakat

Adapun pendekatan-pendekatan dalam pendidikan dan penanaman nilai-nilai ada lima (Superka, et. al. 1976). Lima pendekatan tersebut dikembangkan melalui pengalaman dan praktek pendidikan di berbagai negara, yaitu:

- (1) Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*),
- (2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*),
- (3) Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*),
- (4) Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*)
- (5) Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*).

Menurut pakar pendidikan pekerti, DR. T. Ramli Zakaria, pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) adalah pendekatan yang paling tepat digunakan dalam pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti di Indonesia. Walaupun pendekatan ini dikritik sebagai pendekatan indoktrinatif oleh penganut filsafat liberal, namun berdasarkan kepada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan falsafah Pancasila, pendekatan ini dipandang paling sesuai. Alasan-alasan untuk mendukung pandangan ini antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan Pendidikan Budi Pekerti adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri individu. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
2. Menurut nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan pandangan hidup Pancasila, manusia memiliki berbagai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Setiap hak senantiasa disertai dengan kewajiban, misalnya: hak sebagai pembeli, disertai kewajiban sebagai pembeli terhadap penjual; hak sebagai anak, disertai dengan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua; hak sebagai pegawai negeri, disertai kewajiban sebagai pegawai negeri terhadap masyarakat dan negara; dan sebagainya. Dalam rangka Pendidikan Budi Pekerti, individu perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajibannya, supaya menyadari dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya.
3. Selanjutnya, menurut konsep Pancasila, hakikat manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, dan makhluk individu. Sehubungan dengan hakikatnya itu, manusia memiliki hak dan kewajiban asasi, sebagai hak dan kewajiban dasar yang melekat eksistensi kemanusiaannya itu. Hak dan kewajiban

asasi tersebut juga dihargai secara berimbang. Dalam rangka Pendidikan Budi Pekerti, individu juga perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajiban asasinya sebagai manusia.

4. Dalam pengajaran Budi Pekerti di Indonesia, faktor isi atau nilai merupakan hal yang amat penting. Dalam hal ini berbeda dengan pendidikan moral dalam masyarakat liberal, yang hanya mementingkan proses atau keterampilan dalam membuat pertimbangan moral. Pengajaran nilai menurut pandangan tersebut adalah suatu indoktrinasi, yang harus dijaui. Individu harus diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan nilainya sendiri. Pandangan ini berbeda dengan falsafah Pancasila dan budaya luhur bangsa Indonesia, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, berzina, berjudi, adalah perbuatan tercela, yang harus dihindari; orang tua harus dihormati, dan sebagainya. Nilai-nilai ini harus ditanamkan kepada individu, sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam pengajaran Budi Pekerti faktor isi nilai dan proses, keduanya sama-sama dipentingkan.

Berbagai metode pengajaran yang digunakan dalam pendekatan-pendekatan lain dapat digunakan juga dalam pengajaran Pendidikan Budi Pekerti. Implementasinya sebagai berikut:

- (1) Metode yang digunakan dalam Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif. Misalnya mengangkat dan mendiskusikan kasus atau masalah Budi Pekerti dalam masyarakat yang mengandung dilemma, untuk didiskusikan dalam kelas. Penggunaan metoda ini akan dapat menghidupkan suasana kelas. Namun berbeda dengan Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif di mana yang memberi kebebasan penuh kepada individu untuk berpikir dan sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan tingkat perkembangan *moral reasoning* masing-masing, dalam pengajaran Pendidikan Budi Pekerti siswa diarahkan sampai pada kesimpulan akhir yang sama, sesuai dengan nilai-nilai sosial tertentu, yang bersumber dari Pancasila dan budaya luhur bangsa Indonesia;
- (2) Metoda pengajaran yang digunakan Pendekatan Analisis Nilai, khususnya prosedur analisis nilai dan penyelesaian masalah yang ditawarkan, bermanfaat jua untuk diaplikasikan sebagai salah satu strategi dalam proses pengajaran Pendidikan Budi Pekerti. Seperti telah dijelaskan, dalam mata pelajaran ini, aspek perkembangan kognitif merupakan aspek yang dipentingkan juga, yakni untuk mendukung dan menjadi dasar bagi pengembangan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ingin ditanamkan. Hal ini sejalan dengan penegasan Haydon (1995)

- bahwa pengetahuan dan pemahaman konsep adalah penting dalam pendidikan moral, untuk membentuk sikap moral yang lebih stabil dalam diri seseorang;
- (3) Metoda pengajaran yang digunakan dalam Pendekatan Klarifikasi Nilai, dengan memperhatikan faktor keadaan serta bahan pelajarannya yang relevan, dapat diaplikasikan juga dalam pengajaran Pendidikan Budi Pekerti. Namun demikian, seperti dijelaskan oleh Prayitno (1994), penggunaannya perlu hati-hati, supaya tidak membuka kesempatan bagi individu, untuk memilih nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakatnya, terutama nilai-nilai Agama dan nilai-nilai Pancasila yang ingin dibudayakan dan ditanamkan dalam diri mereka;
 - (4) Metoda pengajaran yang digunakan dalam Pendekatan Pembelajaran Berbuat bermanfaat juga untuk diaplikasikan dalam pengajaran "Pendidikan Pancasila" di Indonesia, khususnya pada peringkat sekolah lanjutan tingkat atas. Individu pada peringkat ini lebih tepat untuk melakukan tugas-tugas di luar ruang kelas, yang dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan lingkungan, seperti yang dituntut oleh pendekatan ini. Namun demikian, mengingat kelemahan-kelemahan pendekatan ini, seperti dikemukakan di atas, penggunaan metoda dan strategi pengajaran berdasarkan kepada pendekatan ini dapat digunakan dalam batas-batas yang memungkinkan. Untuk ini perlu dirumuskan program-program yang sederhana dan memungkinkan untuk dilaksanakan pada masing-masing daerah.

2. 3. Definisi Dan Konsep

Dalam kegiatan penyusunan strategi PKPB ini, dilakukan pembahasan dan diskusi melalui forum FGD (*Focus Group Discussion*), diskusi tenaga ahli, dan kajian literatur untuk menentukan pengertian-pengertian dasar dari konsep pembangunan karakter dan pekerti. Dalam hal ini unsur pembentuk karakter dan pekerti bangsa dipilah menjadi empat elemen terkait yakni: *nilai luhur, pekerti, karakter dan jatidiri*.

a. Nilai Luhur

Nilai luhur mengandung pengertian segenap nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek etik dan estetik manusia, dimana ia merupakan produk dari pengalaman dan kearifan yang diperoleh dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Di dalamnya terkandung nilai kebajikan dan keindahan. Di dalam pepatah Melayu ada ungkapan '*yang baik itu budi, yang indah itu bahasa*', dalam pengertian bahwa *nilai kebaikan* (aspek etik) dan *nilai*

keindahan (aspek estetik) memiliki kaitan yang sangat erat. Akan tetapi, nilai luhur mengandung pula aspek pragmatik dan fungsional. Pada praksis sosialnya, nilai luhur terkait dengan MARTABAT, dalam arti pengembangan nilai-nilai luhur haruslah mampu mengangkat martabat seseorang, baik martabat budaya, martabat ekonomi, maupun martabat estetikanya.

Dengan kata lain, Nilai luhur dilihat tidak semata-mata berkenaan dengan kearifan yang menngandung hal-hal yang BAIK dan INDAH saja, melainkan harus pula BERMANFAAT. Hal ini terkait dengan kesalah-pahaman yang terjadi selama ini, bahwa nilai-nilai luhur diasumsikan semata-mata adalah nilai-nilai kebajikan ideal seperti sopan-santun, berbuat baik kepada sesama, hormat kepada orang tua, dan lain sebagainya. Dalam konteks kehidupan modern, seyogyanya diluruskan kembali bahwa nilai-nilai luhur mencakup segala nilai yang relevan dengan perkembangan masyarakat, baik itu nilai kebudayaan, nilai ekonomi, nilai politik, maupun nilai etik dan estetik yang hidp di suatu masyarakat. Sehingga, sebagai contoh misalnya, nilai 'bekerja keras' patut dipandang sebagai salah satu nilai luhur yang perlu ditumbuh-kembangkan di samping nilai-nilai luhur lainnya.

Per definisi, pengertian kebahasaan dari nilai luhur dapat dicari dari oposisi binernya, yaitu *nilai rendah* (tidak luhur). Di sini harus dipahami bahwa nilai rendah *tidak sama* dengan nilai negatif (karena nilai negatif lawannya adalah nilai positif). Dari pengertian ini, dapat ditarik suatu premis hipotetis bahwa nilai luhur yang dicari dalam pembangunan karakter dan pekerti bangsa ialah nilai-nilai yang POSITIF dan INDAH sekaligus BERGUNA. Untuk bersikap realistik, pada kenyataannya harus dipahami pula bahwa selalu terdapat *gap* atau kesenjangan antara nilai luhur sebagai nilai-nilai idel dalam suatu masyarakat dengan *nilai massa*, yaitu nilai-nilai yang senyatanya dianut dan dipraktekkan sebagian besar anggota masyarakat. Dala hal ini nilai luhur bisa didefinisikan secara sederhana adalah '*nilai-nilai positif-ideal yang menjadi acuan bagi satuan abstrak (bangsa)*', baik ia sebagai warisan dari generasi-generasi sebelumnya maupun sebagai hasil adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan (sosial, budaya, politik dan ekonomi).

Di dalam konteks berbangsa-bernegara dan di dalam konteks Keindonesiaan, maka **nilai-nilai luhur Pancasila** sebagai kristalisasi nilai-nilai kebajikan dan kebijaksanaan yang diwariskan pendahulu-pendahulu bangsa, adalah acuan dan pedoman nilai yang mengikat kepada warganegara.

b. Karakter dan Pekerti

Karakter dan pekerti merupakan aspek yang saling-terkait dalam hal perwujudan atau mempraktekkan nilai-nilai di dalam tingkahlaku seseorang, baik berupa firan, perkataan

maupun perbuatan, dimana pekerti merupakan dasar terbentuknya karakter dalam suatu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan.

Budipekerti tumbuh melalui proses didikan sejak kanak-kanak, dimana lambat-laun ia menjadi suatu ciri yang menetap dan konsisten (ajek) sehingga disebut *karakter*. Ketika pekerti menjadi karakter maka ia sulit untuk berubah lagi, karena telah tertanam sebagai pola dalam seseorang berperilaku sehari-hari. Oleh karena karakter dan pekerti adalah terkait dengan pendidikan, maka ia dapat ditumbuhkan lewat pembentukan aspek kognitif, afektif, kognitif, dan politik. Pengertian 'politik' di sini ialah adanya kesadaran mengenai hak dan kewajiban kolektif seseorang sebagai warga sosial masyarakat maupun sebagai warga negara suatu bangsa.

Salah satu definisi pekerti yang diajukan peserta FGD adalah: *pekerti yaitu suatu sikap etis berkelanjutan yang dipilih dengan akal budi, dan manakala sikap etis tersebut menetap pada diri seseorang, maka ia disebut karakter*. Melalui definisi ini tergambar, bahwa pekerti bermula dari penanaman aspek kognitif (belajar dan mengetahui nilai-nilai baik dan mampu membedakannya dengan nilai-nilai buruk), yang selanjutnya berkembang menjadi sikap afektif yang dihayati seseorang, kemudian dipraktikkan di dalam keseharian sehingga lambat-laun menjadi suatu sifat yang tetap/ajek dan akhirnya dapat disebut *karakter* bagi orang tersebut. Suatu nilai keutamaan (misalnya, kejujuran, keberanian, kesetiaan, kerja keras) disebut sebagai pekerti apabila dipraktikkan di dalam perilaku (misalnya, bertindak jujur, bertindak hemat, disiplin dan tepat waktu) namun apabila perilaku tersebut (misalnya, tepat waktu) tidak berkelanjutan maka belum bisa ia disebut sebagai karakter.

Selain itu, definisi di atas menekankan bahwa pembentukan karakter dan pekerti melibatkan masalah *pilihan*, bahwa seseorang harus memilih diantara berbagai nilai-nilai yang disediakan oleh masyarakat/kebudayaannya. Dengan kata lain, karakter dan pekerti menuntut ada kedewasaan di dalam diri seseorang. *Kedewasaan pekerti* identik dengan kedewasaan seseorang dalam menilai, yaitu dalam rangka memilih dan menetapkan nilai-nilai yang dianut dan dipraktikkan di dalam kehidupannya.

c. Jatidiri

Jatidiri merupakan suatu bentuk persepsi dari pihak-pihak luar yang mengamati kebudayaan yang bersangkutan. Untuk kasus kebudayaan Indonesia, perlu dilihat dari perjalanan sejarahnya bahwa jatidiri bangsa Indonesia terkait erat dengan keberadaannya sebagai negeri yang pernah dijajah. Sebagaimana bangsa-bangsa Asia-Afrika lain yang mengalami periode penjajahan, maka masalah jatidiri bangsa Indonesia terkait erat dengan *syndroma post-kolonial*, yaitu pencarian jatidiri yang dilatarbelakangi oleh pengalaman

penjajahan dan terus-menerus mengalami pergulatan antara tradisi yang diwariskan dari masa lalu dengan modernitas yang merupakan kenyataan yang dihadapi saat ini.

Istilah 'jatidiri' acapkali disepadankan dengan karakter nasional, karena karakter nasional adalah kekhususan-kekhususan yang memberi ciri khas kepada suatu bangsa. Sebagai contoh, ketika mengamati bangsa-bangsa Eropa yang beragam, Jean-Baptiste de Boyer d'Argens, *Lettres juives* (The Hague, 1738, 6 vols.) menemukan bahwa penduduk masing-masing negeri yang dikunjunginya ternyata memiliki seperangkat karakteristik khas dan unik yang disebutnya "le caractère de la nation".

d. Keutamaan Watak (*Virtue*)

Sebagai tambahan terhadap pembahasan dan definisi konseptual di atas, maka dari sudut filsafat diketahui, bahwa pembangunan karakter dan pekerti bertitik-tolak dari konsep VIRTUE, yakni nilai-nilai keutamaan yang diharapkan melekat menjadi milik karakter seorang individu yang berkebudayaan dan beradab tinggi. *Virtue* atau keutamaan, bersifat universal, dapat berlaku tanpa melihat perbedaan kebudayaan dan tingkat peradaban suatu bangsa.

1. Keberanian (*Courage*) : kekuatan emosional yang meliputi penggunaan kehendak untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhadapan dengan tantangan, baik eksternal maupun internal; contohnya adalah keberanian melawan bahaya (*bravery*), keteguhan hati (*perseverance*), dan otentisitas atau kejujuran.
2. KEADILAN (*Justice*) : daya-daya kekuatan sipil yang mendasari komunitas-komunitas masyarakat yang sehat; contohnya adalah sportivitas (*fairness*), kepemimpinan, dan sikap sebagai warga yang baik atau *teamwork*.
3. KEMANUSIAAN (*Humanity*) : daya-daya kekuatan interpersonal yang meliputi "mengasihi (*tending*) dan bersahabat (*befriending*)" terhadap orang lain; contohnya adalah cinta dan rasa persahabatan.
4. KESABARAN (*Temperance*) : daya-daya kekuatan untuk melindungi terhadap hal yang berlebihan; contohnya pemberian maaf, kerendahan-hati, sikap ksatria (*prudence*), dan mengendalikan diri (*self-control*).
5. KEBIJAKSANAAN (*Wisdom*) : daya-daya kekuatan kognitif yang memungkinkan mencari dan memanfaatkan ilmu pengetahuan; contohnya kreativitas, rasa ingin tahu, penilaian (*judgment*), dan pandangan (*perspective*).
6. TRANSENDESI (*Transcendence*) : daya-daya kekuatan yang menghubungkan diri kepada alam yang lebih besar dan dengan demikian memberikannya makna; contohnya adalah *gratitude*, harapan (*hope*) dan spiritualitas.

Tabel 2.2. Unsur-Unsur Keutamaan Watak

Core Virtues

Virtue	Description
Courage	Emotional strengths that involve the exercise of will to accomplish goals in the face of opposition, external or internal; examples include bravery, perseverance, and authenticity (honesty)
Justice	Civic strengths that underlie healthy community life; examples include fairness, leadership, and citizenship or teamwork
Humanity	Interpersonal strengths that involve "tending and befriending" others (Taylor et al., 2000); examples include love and kindness
Temperance	Strengths that protect against excess; examples include forgiveness, humility, prudence, and self-control
Wisdom	Cognitive strengths that entail the acquisition and use of knowledge; examples include creativity, curiosity, judgment, and perspective (providing counsel to others)
Transcendence	Strengths that forge connections to the larger universe and thereby provide meaning; examples include gratitude, hope, and spirituality

Shared Virtue: The convergence of valued human strengths across culture & history

Dahlsgaard; Christopher Peterson; Martin E P Seligman

Review of *General Psy*, 2005, vol.9, No.3, pg. 203-213

Tabel 2.3. Konfederasi Virtue

Table 2

Convergence of Virtues

Tradition	Courage	Justice	Humanity	Temperance	Wisdom	Transcendence
Confucianism		E	E	T	E	T
Taoism		E	E	E	E	T
Buddhism		E	E	E	T	E
Hinduism	E	E	E	E	E	E
Athenian philosophy	E	E	E	E	E	T
Christianity	E	E	E	E	E	E
Judaism	E	E	E	E	E	E
Islam	E	E	E	E	E	E

Note. E = explicitly named; T = thematically implied.

Tabel di atas menunjukkan bagaimana 6 VIRTUE utama tersebut dalam keberadaannya di berbagai tradisi besar dunia, yaitu Konfusianisme, Taoisme, Budhisme, Hinduisme, Filsafat Yunani, Agama Kristen, Yahudi dan Islam.

BAB III

KILAS BALIK SEJARAH

A great civilization never goes down unless it destroy itself from within (Arnold Toynbee).

A nation divided against itself, cannot stand (Abraham Lincoln)

Penyusunan Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa tidak terlepas dari kesinambungan sejarah, dimana pada Bab ini pembangunan karakter dan pekerti bangsa akan melihat kepada aspek kesejarahannya. Tujuannya adalah untuk:

1. Mendapatkan deskripsi historis mengenai upaya-upaya yang pernah dilakukan tokoh-tokoh bangsa terkait dengan pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
2. Memberikan analisis strategis berupa kekuatan dan kelemahan pada masing-masing gagasan/upaya yang telah dilakukan itu, sebagai standar pembanding terhadap upaya yang dilakukan saat ini (yaitu kegiatan penyusunan strategi karakter dan pekerti bangsa).
3. Melakukan apresiasi permasalahan, yang menunjukkan kepada urgensi dan tingkat kompleksitas yang dihadapi. Hal ini terkait dengan harapan bahwa strategi

pembangunan karakter dan pekerti bangsa dapat dijadikan program jangka panjang dan berkelanjutan.

Pembahasan sejarah mengenai pembangunan karakter dan pekerti bangsa di sini tidak dimaksudkan untuk memberi gambaran mendetail terhadap fakta-fakta historis, sebab hanya terfokus pada beberapa momen sejarah yang penting, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

3.1. Polemik Kebudayaan

Salah satu nama yang penting bagi sejarah kebudayaan Indonesia adalah Sutan Takdir Alisyahbana (1908-1994). Ia lahir di Natal, Sumatera Utara pada 11 Februari 1908, dikenal sebagai penyair, novelis, filsuf, ahli hukum, dan futurolog. Sutan Takdir menolak gagasan tentang kebudayaan Indonesia yang merupakan kontinuitas dari kebudayaan masa silam. Menurut STA, Indonesia yang ditjita-tjitakan oleh generasi baru bukan sambungan Mataram, bukan sambungan keradjaan Banten, bukan keradjaan Minangkabau atau Bandjarmasin. Kebudayaan Indonesia tidaklah mungkin sambungan kebudayaan Djawa, Melaju, Sunda, atau kebudayaan lainnya (Achdiat K Mihardja, Polemik Kebudayaan, 1954).

Polemik yang bersambung terjadi di Pujangga Baru, surat kabar Suara Umum, Warta Deli dan lain-lain. STA berhadapan dengan tokoh kebudayaan dan pendidikan saat itu; seperti Sanusi Pane, Poerba Tjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir dan Ki Hajar Dewantara. Sejak saat itu polemik pun terus bergulir, hingga menyeret dialog berbagai tema penting dalam rangka pembangunan kebudayaan Indonesia baru. STA menyerukan untuk membangun integritas individu pencipta budaya, dengan landasan kebebasan kreatif yang demokratis, disertai wawasan internasional. Peristiwa itulah yang disebut **Polemik Kebudayaan (1935-1936)**.

Latar pendidikan Sutan Takdir adalah sekolah tinggi kehakiman (Rechtshoge school). Jakarta (1941), gelar meester in de rechten (Mr) melekat pada namanya, di samping gelar Profesor dan Doktor. Tahun 1948 ia pergi ke Amsterdam mengunjungi Kongres Filsafat. Sebelumnya, ia sudah belajar filsafat ke Jerman, Belanda, Perancis, AS dan Jepang. Pernah juga menjadi Fellow pada Center for Advanced Studies in the behavioral science, Standart (1956-61) dan East-West Center, Hawaii (1961-62). Tahun 1963-1968 ia menjadi dosen di Kuala Lumpur. Pada tahun 1972 atas dorongannya Kongres Filsafat sedunia terselenggara. Sebagai lanjutan dari Kongres tersebut, bersama budayawan se-Indonesia dan bangsa lain ia

mendirikan Association Fort Art Anda the Future, disusul Kongres II (1990). Ia juga menjadi anggota organisasi internasional, antara lain Societe de Linguistique de Paris dan UNESCO, International Commision for the Scientific dan Cultural Development of Mankind and Study of Mankind, USA. Di tahun 1970 ia menerima bintang Satyalencana Kebudayaan oleh Pemerintah Jerman Pada 1976, kemudian ia diangkat sebagai anggota kehormatan dari Koninklijk Instituut voor Tall, Landa en Volkenkunde, Leiden, Belanda.

Puluhan buku juga berhasil ditulisnya, dan setiap buku mendapat perhatian yang serius di masyarakatnya. Yang paling populer adalah roman ide berbentuk novel Layar Terkembang (1936) yang bercerita tentang emasipasi wanita. Disusul Grotta Azzura (1979), Kalah dan Menang (1978) yang berbicara masalah filsafat kebudayaan.

3.1.1. Pokok Perdebatan

Lewat tulisannya *Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru*, STA membagi sejarah Indonesia menjadi dua bagian yang sentral, pertama zaman pra-Indonesia sampai akhir abad ke-19, kedua zaman Indonesia. Menurutnya, zaman Indonesia tidak boleh dianggap sebagai sambungan dari zaman pra-Indonesia yang dikecamnya sebagai zaman jahiliyah Indonesia. Sebab, di sana ada perbedaan yang terlalu jauh. Pada zaman Indonesia, terdapat semangat yang belum ada dalam zaman Jahiliyah Indonesia, yaitu semangat bersatu untuk menuju kebudayaan baru dan layak di sisi bangsa-bangsa lain. Sedang zaman pra-Indonesia adalah zaman yang mirip suku baduwi di Arab yang tak mengenal peradaban dan kebudayaan, ditandai dengan penolakan kebudayaan luar.

Maka dari sinilah, Sutan menghendaki bangsa Indonesia harus lebih dinamis dan maju setapak. Lalu ia memberikan solusi, menawarkan obat yang mujarab bagi penyembuhan luka atas dekadensi zaman jahiliyah Indonesia yang berlangsung lama. Obat pilihan itu adalah *memperkenalkan kebudayaan Barat melalui segala lini institusi masyarakat dan pendidikan*. Mirip yang terjadi pada Thaha Husein di Mesir, Sutan Takdir juga berpolemik dipicu dari pembentukan kebudayaan baru, dengan mengusung nilai-nilai Barat, sebagai lawan dari kebudayaan Timur yang dianggapnya telah membeku (*jumud*).

STA meyakini bahwa kebudayaan Indonesia baru harus benar-benar bebas dari kebudayaan lama. Cita-cita masa depan bangsa menurutnya tidak berakar pada masa silam, melainkan pada harapan kemuliaan di kemudian hari. Ia juga menilai bahwa masyarakat kepulauan Nusantara ini telah berabad-abad statis, mati. Untuk mencapai cita-cita baru itu, mereka harus menjadi dinamis, hidup. Alat yang dapat dipakai untuk mencapai kondisi dinamis itu menurutnya adalah kebudayaan Barat.

Sikap menoleh kepada kebudayaan Barat oleh STA ini berangkat dari analisisnya terhadap kondisi rakyat bumiputera pada tahun 1930-an. Menurutnya, semangat keindonesiaan yang menghidupkan kembali bangsa Indonesia yang berabad-abad mati pada hakikatnya diperoleh dari Barat: Budi Utomo dilahirkan oleh orang-orang yang mendapat didikan Barat; cara organisasi yang dipakai untuk mengganti persatuan berdasar keturunan diadopsi dari Barat; para tokoh pergerakan nasional sebagian besarnya mendapat didikan atau pengaruh Barat.

Tentu saja, gagasan ini memang tak diterima semua kalangan. Bahkan beberapa ada yang sangat tersinggung. Mereka mengira bahwa Sutan telah mengejeknya sedemikian rupa budaya Timur yang luhur dan santun. Memang Sutan telah menuding bahwa kaum pesantren yang feodal dan Taman Siswa yang egoistis dan materialistis tak mampu membawa napas budaya bangsa yang terpuruk yang hampir ajal.

Maka, gagasan STA untuk “menoleh ke Barat” mendapat tentangan dari tokoh-tokoh seperti Sanusi Pane, Dr Sutomo, Purbatjaraka, Adinegoro, dan Ki Hajar Dewantara. Sanusi Pane membantah bahwa zaman Indonesia tidak boleh dianggap terusan zaman pra-Indonesia. Menurutnya, sejarah adalah rantai masa yang berada di belakangnya. Manusia tidak dapat tiba-tiba menjadi dewasa tanpa melalui masa kanak-kanaknya. Hal itu sama artinya dengan mengadakan barang dari yang tidak ada. Ia memberi contoh, Pujangga Baru lahir karena adanya Pujangga Lama. Tanpa adanya Pujangga Lama tidak akan lahir generasi baru yang merupakan hasil kritik terhadap generasi lama.

Perdebatan ini sering kali disederhanakan sebagai perdebatan antara kubu modernis dan kubu tradisional. Tapi, apabila kita melihat lebih jauh, silang pendapat ini melibatkan juga tokoh-tokoh yang modernis, mereka menerima ilmu pengetahuan modern dan mengadopsi apa yang mereka pahami sebagai kebudayaan Barat. Mereka juga menentang tradisi feodalisme dan menolak jika kebudayaan Indonesia baru harus sepenuhnya diambil dari kebudayaan feodal ataupun mentah-mentah dari kebudayaan rakyat.

Mereka yang menentang Sutan Takdir tidak mengingkari pencapaian-pencapaian kebudayaan Barat. Mereka pun hasil dari pendidikan modern Barat. Yang mereka permasalahan adalah *landasan kebudayaan Indonesia sendiri yang harus kokoh, sehingga siap berdialog dengan budaya Barat*. Sebab kalau tidak, konsep “melihat ke Barat” dari Sutan Takdir akan menjadi sebuah pengabdian tanpa syarat.

Pokok-pokok pemikiran STA bukan hanya mengguncang masyarakat saat itu. Pemikir dan budayawan yang seangkatannya seperti Ki Hajar Dewantara dan Sanusi Pane menanggapi pemikiran STA, seraya mengingatkan STA bahwa Timur adalah arah kemajuan budaya yang harus dipertahankan Indonesia mendatang.

3.1.2. Kekuatan dan Kelemahan

Sebagai suatu peristiwa Kebudayaan yang penting, yang terjadi bahkan sebelum Indonesia diproklamarikan sebagai negara merdeka, Polemik Kebudayaan menggambarkan pilihan-pilihan kebudayaan dan arah pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Polemik ini mencoba merumuskan dengan jelas, manusia Indonesia seperti apa dan orientasi kebudayaan kemana yang merupakan pilihan terbaik bagi masa depan bangsa Indonesia.

a. Kekuatan

- **Polemik Kebudayaan** mendiskusikan dan memperdebatkan landasan paling mendasar dari pembangunan karakter dan pekerti bangsa, yaitu masalah ORIENTASI KEBUDAYAAN NASIONAL: Apakah bangsa Indonesia harus bersetia kepada warisan kebudayaannya sendiri atau melakukan 'lompatan kepada kebudayaan dunia' yang dalam hal ini diwakili peradaban Barat.
- **Polemik Kebudayaan** mendapat tanggapan yang luas dan menjadi bahan pembicaraan pada segenap lapisan masyarakat, kendati dipicu hanya melalui media yang terbatas yaitu surat-kabar.
- **Polemik Kebudayaan** melibatkan tokoh-tokoh pemikir kebudayaan dan pendidikan yang paling berpengaruh pada masa itu, sehingga jejak pemikiran dan perdebatan mereka masih terasa bahkan setelah peristiwa polemik itu lama berlalu.

b. Kelemahan

- **Polemik Kebudayaan** dirumuskan pada tataran konseptual, namun tidak sempat diwujudkan kepada level operasional, kecuali oleh tokoh-tokohnya sendiri. Sutan Takdir melihat bahwa untuk menuju masyarakat dan kebudayaan baru, harus dimulai dari penyegaran bahasa dan sastra. Menurutnya bahasa dan sastra adalah jantung kebudayaan sebab terlibat dan menyatu dalam dinamika masyarakat. Maka sebagai reaksi yang nyata, Sutan menampik bentuk sastra lama, jenis pantun dan syair. "Kita buang dan lupakan saja sastra lama dan kita bangun sastra yang baru" begitulah jargon yang selalu melekat di bibirnya. Sebagai wujud dari kata-kata itu, ia membentuk sastra baru, yaitu sastra soneta (1933), dan menerbitkan sekaligus memimpin Pujangga Baru, majalah Indonesia pertama untuk bidang sastra dan budaya. Ia pun menerbitkan buku Kebangkitan Puisi Baru Indonesia. Sebaliknya, Ki Hajar Dewantara mewujudkan pendiriannya dengan memperkokoh Perguruan

Taman Siswa yang mengusung gagasan kebudayaan yang berjatidiri ketimuran (yang dianggap melestarikan nilai-nilai kebudayaan lama oleh STA).

- **Polemik Kebudayaan** tidak dilanjutkan dengan konsep sistematis, yaitu bagaimana membangun kebudayaan nasional, meskipun gema dari gagasan-gagasan yang diperdebatkan muncul juga pada berbagai kesempatan. Sebagai contoh, definisi bahwa kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah (penjelasan UUD 1945 Pasal 34), tidak lain adalah gagasan Ki Hajar Dewantara yang merupakan salah satu lawan debat STA.
- **Polemik Kebudayaan** masih merupakan rintisan awal mengenai pembangunan karakter dan pekerti bangsa, yaitu berupa gagasan-gagasan pokok dan fundamental seperti orientasi kebudayaan, dasar-dasar pembangunan kebudayaan, dan seterusnya. Polemik Kebudayaan belum menyentuh kepada strategi, bagaimana pembangunan kebudayaan itu akan dilakukan.

3.2. Pembangunan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara

Dalam sejarah Indonesia, nama Ki Hadjar Dewantara tercatat sebagai salah seorang tokoh pergerakan nasional dengan pemikiran-pemikiran antikolonialisme dan antifeodalisme. Salah satu warisan pentingnya adalah sekolah Taman Siswa dan sistem pendidikan yang membebaskan rakyat bumiputera dari cengkeraman kolonial. Tak hanya itu, pemikiran-pemikiran Ki Hadjar tentang kebudayaan nasional turut mewarnai perdebatan kaum intelektual bumiputera di paruh awal abad ke-20 dan menjadi basis bagi pembentukan rasa kebangsaan Indonesia.

Pertanyaan tentang identitas nasional telah dilontarkan Ki Hadjar saat ia menulis sebuah artikel berjudul *Als ik eens een Neerlande was* (Andai Aku Seorang Belanda) pada tahun 1913. Artikel ini mengkritik keras rencana perayaan kemerdekaan Belanda yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda dengan mewajibkan rakyat bumiputera yang menjadi jajahan Belanda memberikan sumbangan uang. Meski demikian, selain kritik keras terhadap sikap pemerintah kolonial, artikel tersebut telah pula mengajarkan tentang harapan dan aspirasi akan kemerdekaan bagi kaum bumiputera.

Gagasan Ki Hadjar tentang nasionalisme selanjutnya ikut mewarnai gerakan sosial politik menentang kolonialisme Belanda. Pemikiran-pemikiran Ki Hadjar bukan saja mendapat tentangan keras dari pemerintah kolonial, tetapi juga memicu perdebatan di

kalangan intelektual bumiputera sendiri. Perdebatan tentang kebudayaan tersebut dikenal dengan sebutan Polemik Kebudayaan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

3.2.1. Konsep “TRI-KON”

Di buku kumpulan karya Ki Hadjar, ia menguraikan arti dasar kebudayaan sebagai buah budi manusia. Kata kebudayaan sendiri berasal dari kata *cultura* yang merupakan perbendaharaan bahasa Latin. Kata *cultura* itu merupakan perubahan dari kata *colere* yang berarti memelihara, memajukan serta memuja-muja. Ini berarti kata *cultura* itu tidak saja mengandung arti buah budi manusia, tetapi yang juga penting adalah arti memelihara dan memajukan. Itulah yang, menurut Ki Hadjar, menjadi tujuan dari segala usaha kultural.

Tujuan memelihara dan memajukan kehidupan manusia sering kali harus berhadapan dengan kekuatan alam yang menghambat ataupun pengaruh zaman yang merintangai usaha manusia tersebut. Ketika berjuang menghadapi kekuatan alam dan pengaruh zaman itu, manusia melahirkan kebudayaan baru. Dengan demikian, kebudayaan juga merupakan hasil perjuangan manusia dalam menaklukkan rintangan alam dan menyesuaikan diri dengan pengaruh zaman atau masyarakatnya. Selain itu, kebudayaan tidak pernah mempunyai bentuk abadi, tetapi terus-menerus berganti wujudnya karena perubahan alam dan zaman. Kebudayaan yang hidup di zaman lampau memajukan kehidupan manusia, boleh jadi di zaman sekarang justru mempersulit manusia. Zaman dahulu, misalnya, arca-arca sangat berfaedah sebagai alat pendidikan. Saat ini arca-arca itu hanya meninggalkan jejak-jejak kekunoan dan aspek keindahan.

Pemikiran tentang kebudayaan nasional menjadi bahasan yang sering muncul di dalam buku ini. Menurut Ki Hadjar, kebudayaan selalu mempunyai sifat nasional, "*karena rakyat yang menimbulkan kebudayaan tersebut ialah semua orang yang hidup di dalam satu lingkungan alam dan satu lingkungan zaman*". Orang-orang itu, meskipun sebenarnya memiliki kebudayaan yang saling berbeda, tetapi mereka saling berhubungan sehingga mau tidak mau akan terjadi pertukaran kebudayaan.

Dalam kaitan dengan kebudayaan nasional, Ki Hadjar menuturkan bahwa kebudayaan nasional terbentuk dari puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, baik kebudayaan lama maupun baru. Ia mencontohkan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu. Meskipun demikian, bahasa-bahasa daerah lainnya, dalam perkembangannya, turut menyumbang pertambahan kosa kata bahasa Indonesia. Hal yang sama terjadi di lapangan kesenian di mana unsur-unsur seni tiap daerah bisa saling memengaruhi satu sama lain.

Ki Hadjar bukan sekadar membangga-banggakan kebudayaan masa silam. Lebih jauh, Ki Hadjar menganggap penting adanya perkawinan budaya yang demokratis antara pihak-pihak yang berasimilasi. Tanpa demokrasi, yang terjadi adalah kemunduran dan kematian salah satu kebudayaan, atau penjajahan satu kebudayaan oleh kebudayaan lainnya.

Perkembangan kebudayaan nasional, menurutnya, harus melalui jalan yang disebutnya tri-kon, yaitu memiliki *kontinuitas* dengan kebudayaan yang telah silam, menjalankan *konvergensi* dengan jalannya kebudayaan-kebudayaan lain, dan akhirnya bersifat *konsentris* dalam persatuan dengan kebudayaan dunia walaupun tetap mempertahankan kepribadian sendiri. Konsep tri-kon ini harus menjadi pedoman dalam pergaulan dengan kebudayaan asing. Dengan demikian, kebudayaan nasional tidak akan meninggalkan kepribadiannya, namun juga terbuka terhadap kebudayaan lain.

Gagasan Ki Hajar Dewantara justru bermaksud menguburkan sisa-sisa kebudayaan kolonial. Selain itu yang ditakutkan oleh Ki Hadjar adalah rendahnya tingkat pendidikan rakyat Indonesia. Ki Hadjar melihat bahwa pendidikan barat yang dilaksanakan di Hindia Belanda bersifat sangat elitis sehingga tidak menjangkau rakyat jelata. Pendidikan itu sendiri juga berorientasi ke negeri Belanda. Akibatnya, elite bumiputera yang mengenyam pendidikan Belanda itu dijauhkan dari realitas bangsanya sendiri dan pada gilirannya akan menumpulkan pembentukan kesadaran kolektif bangsa. Lebih jauh lagi, menurut Ki Hadjar, tanpa kebanggaan dan pengetahuan yang cukup tentang masa lalu dan kebudayaan sendiri, apa yang bisa diharap selain ketundukan dan kekaguman berlebihan pada kebudayaan yang lebih berkuasa, yang tidak lain adalah kebudayaan sang penjajah?

3.2.2 Kekuatan dan Kelemahan

a. Kekuatan

- Konsep Pembangunan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara telah dirumuskan secara lebih operasional, dimana parameter-parameter pembangunan kebudayaan dapat segera dikaitkan dengan berbagai aspeknya seperti pendidikan, kesenian, hubungan kebudayaan nasional-kebudayaan daerah, dan lain-lain.
- Konsep Pembangunan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya jati diri bangsa, sebagai salah satu tema pokok pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

- Penerapan konsep Pembangunan Kebudayaan telah dioperasionalkan lebih jauh oleh Ki Hadjar, yaitu kepada bidang pendidikan sebagai salah satu instrumen pokok dan dasar dari pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

b. Kelemahan

- Konsep Pembangunan Kebudayaan Ki Hadjar tidak mencakup lapangan kebudayaan yang sangat luas, khususnya pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang menuntut strategi dan program-program aksi secara bertahap dan jangka panjang.
- Konsep Pembangunan Kebudayaan Ki Hadjar didasari terutama oleh sikap anti-kolonialisme dan anti feodalisme yang kuat, khususnya dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang saat ini harus didefinisikan-ulang dalam konteks globalisasi yang lebih kompleks dan lebih cair.
- Penerapan pada level strategis, khususnya strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa, dari konsep pembangunan kebudayaan Ki Hadjar membutuhkan identifikasi dan kerjasama antar *stakeholder* dan pendekatan partisipatif-emansipatoris dimana masyarakat adalah subyek utamanya.

3.3. Ir. Soekarno: *Nation Character Building*

Ir. Soekarno (6 Juni 1901 - 21 Juni 1970) adalah Presiden pertama Indonesia, menjabat periode 1945 - 1966. Selain itu, merupakan tokoh nasional yang memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Dr. Mohammad Hatta.

Soekarno dilahirkan dengan nama Kusnososro Soekarno. Ayahnya bernama Raden Sukemi, seorang guru di Surabaya, Jawa. Ibunya berasal dari Bali. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Pada usia 14 tahun, seorang kawan ayahnya yang bernama HOS (Hadji Oemar Said) Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke *Hoogere Burger School (H.B.S.)*. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi *Jong Java (Pemuda Jawa)*. Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke *Technische Hoger School* (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto

Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi *National Indische Partij*.

Sepanjang hidupnya, sejarah pemikiran Soekarno mencakup berbagai konsep di bidang politik (nasionalisme, marhaenisme, demokrasi terpimpin, Masipol/USDEK), ekonomi (ajaran berdikari, amanat penderitaan rakyat/AMPERA), kebudayaan (arsitektur, pariwisata, seni lukis), dan hubungan internasional (Gerakan Non-Blok, Konferensi Asia-Afrika/Dasa Sila Bandung), pemberdayaan perempuan (melalui bukunya, *Sarinah*), dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa, Soekarno adalah pencetus gagasan *Nation Character Building* (pembangunan karakter bangsa). Soekarno terbakar oleh kesadaran bahwa bangsa Indonesia sebagai rakyat tanah jajahan (Hindia Belanda) mengalami kemerosotan mentalitas dan harga diri. "*Eine Nation von kuli und kuli unter den Nationen*," begitulah ucapan Helfferich (Indonesia adalah bangsa kuli di bawah bangsa-bangsa lain). Dalam analisis Mohammad Hatta, menyebut hal ini adalah sebagai "kerusakan sosial" akibat penindasan VOC, *cultuurstelsel*, dan kebengisan dalam pelaksanaan *Agrarische Wet* 1870. Maka gagasan *Nation Character Building* bermaksud menolak stigma tersebut dan membangkitkan kembali harga-diri bangsa Indonesia sehingga dapat tegak dan merasa sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Gagasan ini dirumuskan dalam berbagai pidato dan tulisan, kemudian terkait-erat dengan konsep **TRISAKTI** (*berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan*) yang dirumuskan Soekarno pada tahun 1964.

3.3.1 Kekuatan

- Konsep *Nation Character Building* merupakan gagasan pertama dari tokoh nasional Indonesia mengenai pembangunan karakter dan pekerti bangsa, yang secara jelas dan eksplisit menggunakan "jatidiri bangsa", "watak bangsa" (karakter nasional), dan "harga diri bangsa dalam konsep ini menjadi lebih luas daripada sekedar masalah kebudayaan dan orientasi budaya.

3.3.2 Kelemahan

- Sebagai suatu strategi, program *Nation Character Building* telah dirumuskan secara operasional (yaitu meliputi politik, ekonomi dan kebudayaan), dan memiliki maksud-tujuan jangka panjang yang jelas (membangun karakter dan harga diri sebagai bangsa).

Akan tetapi, pada level implementatif tidak berhasil diterjemahkan kepada program-program aksi yang sistematis dan bertahap sehingga tidak bersifat berkelanjutan.

- Pada strategi implementasinya, program *Nation Character Building* tidak ditopang dengan kestabilan sistem politik dan sistem ekonomi (berbagai gejolak politik dan kemacetan ekonomi terjadi berkali-kali), dimana sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan harus tersedia. Oleh karena itu, belum memberikan hasil-hasil yang diharapkan.
- Pada dasarnya program *Nation Character Building* belum dirumuskan dalam paradigma partisipatif (*top-down*),

3.4. Orde Baru: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Soeharto (lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921), adalah Presiden Indonesia yang kedua setelah Soekarno. Bergabung dengan pasukan kolonial Belanda dan belajar di akademi militer Hindia Belanda, KNIL. Selama perang dunia II, ia menjadi komandan batalion di dalam militer yang disponsori oleh Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA (pembela tanah air). Di tahun berikutnya bekerja sebagai pejabat militer di Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Kemudian Pindah ke staf komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung. Sebelumnya, Letkol Soeharto menjadi komandan penumpasan pemberontakan di Makassar dibawah Komando Kolonel Alex Kawilarang. Pada 1962 ia mencapai jabatan mayor jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas membebaskan Irian Barat. Selama konfrontasi Indonesia-Malaysia, Soeharto adalah seorang komandan Kostrad, yang bermarkas di Jakarta. Hal terpenting yang diperoleh Soeharto dari operasi militer ini adalah perkenalannya dengan Kol. Laut Sudomo, Mayor Ali Murtopo, Kapten Benny Murdani yang kemudian tercatat sebagai orang-orang terpenting dan strategis di tubuh pemerintahannya kelak. Sekembali dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi mayor jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai komandan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) hingga 1965.

Pemikiran politik Soeharto mengenai pembangunan karakter dan pekerti bangsa adalah konsep Pancasila sebagai asas tunggal. Selain itu, Soeharto menginginkan Pancasila dimasyarakatkan melalui suatu mekanisme yang disebut “penataran”. Untuk itulah pada 22 Maret 1978 MPR menetapkan P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (Tap MPR No II/MPR/1978). Disebut juga, *Eka Prasetya Pancakarsa*, yang berarti kesetiaan

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

kita yang tunggal pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikatnya adalah merupakan manusia pribadi dan sekaligus juga manusia sosial yang tidak mungkin hidup tanpa masyarakat. Dan dengan lima karsa (kehendak) kita akan mampu mengamalkan kelima sila dari Pancasila secara bulat dan utuh.

Entitas Pancasila inilah yang agaknya menempati posisi khusus dalam cara pandang Soeharto. Penerjemahan karakter dan pekerti bangsa bertitik-tolak dari suatu ideologi dan digerakkan secara massal melalui mekanisme penataran tersebut. Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan, "Hanya pegawai negeri dan anggota ABRI yang memahami Pancasila, UUD 1945, dan GBHN yang akan dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan baik." (Soeharto: *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, 1989:337).

3.4.1. Kekuatan

- Penerapan Pendidikan Pancasila tidak hanya dilakukan terbatas kepada pelajar melalui PMP dan sejarah, melainkan kepada masyarakat luas melalui P4.
- Pelaksanaan strategi pembangunan karakter dan pekerti melalui P4 telah didukung dengan infrastruktur kelembagaan yang cukup luas (adanya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat **BP7**).
- Strategi implementasi P4 dilakukan secara berjenjang (sesuai jumlah jam dan tingkatan peserta), dan secara sistematis dikembangkan pada berbagai level dan konteks kepesertaan.
- Mendapat dukungan penuh dari segi ketersediaan sumberdaya (SDM dan anggaran/finansial) dan sarana-sarana yang dibutuhkan.
- Memiliki payung hukum yang kuat melalui TAP MPR serta perangkat peraturan dan perundang-undangan di bawahnya.

3.4.2. Kelemahan

- Pelaksanaan P4 telah disalahpraktekkan sebagai suatu kewajiban yang bersifat indoktrinatif dan dijadikan persyaratan untuk jabatan-jabatan formal, sehingga kehilangan sifat kesukarelaan yang menjadi dasar pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

- Metode permasalahannya melalui berbagai jenis dan jenjang penataran berjalan efektif, tapi tidak dibarengi dengan pelaksanaan secara praktek di dalam kehidupan sehari-hari baik kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
- Metode dan materi muatan P4 tidak mengembangkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Metodologi Pendidikan Pancasila dilakukan dengan cara-cara indoktrinasi, bukannya diskusi terbuka dengan mengutamakan daya nalar, daya kritis, perenungan dan penghayatan pengalaman pribadi tentang Pancasila. Peserta mengalami keterpaksaan mengikuti acuan resmi, dan takut untuk berbeda pendapat, sehingga secara materi tidak terjadi perkembangan penalaran dan penghayatan yang diharapkan.

3.5. Reformasi

Era reformasi dimulai melalui suatu krisis, yaitu krisis moneter yang melanda sejumlah negara Asia pada pertengahan 1997 dan akhirnya terkena kepada mata uang rupiah Indonesia. Kegoncangan di bidang ekonomi tersebut memberikan efek dramatis terhadap struktur perekonomian nasional dan segera merembet ke level politik, dan pada puncaknya telah memaksa Soeharto turun dari kursi jabatan kepresidenan.

Kondisi pasca-Krisis lebih baik pada negara-negara Asia lain yang terkena, ketimbang Indonesia. Hampir satu dasawarsa, namun perkembangan ekonomi, politik dan ketertiban sosial Indonesia masih dibayang-bayangi dampak negatif dari krisis tersebut. Sementara negara-negara lain relatif telah kembali pulih dalam waktu 2-5 tahun.

Sejalan dengan itu, sebagian tokoh pemuka masyarakat mulai menyadari bahwa krisis yang terjadi memiliki akar persoalan yang lebih mendalam daripada sekedar krisis ekonomi dan politik. Bahwa dalam situasi tersebut dapat terlihat dengan jelas dibutuhkan figur manusia Indonesia dengan suatu karakter yang kuat dan tangguh, serta pekerti yang baik dan peka, untuk mengatasinya dan menemukan jalan keluar. Maka, masalah karakter dan pekerti bangsa kembali diangkat ke permukaan.

Ada berbagai elemen kemasyarakatan yang menunjukkan keprihatinan, dan sebagian mereka ada yang menggabungkan diri untuk menyusun suatu gerakan secara swadaya dalam rangka pemulihan karakter dan pekerti bangsa. Di antaranya, seperti misalnya:

▪ **Gerakan Jalan Lurus**

Didirikan 17 Juni 2001 oleh dr. Soelastomo. Gerakan ini melahirkan sebuah Manifes Ekonomi dan Sosial, yang diikarkan Manifes tersebut diikrarkan, 17 Juni 2003 di Jakarta bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Ke-2 Gerakan Jalan Lurus. Manifes tersebut menggambarkan jalan atau proses yang selayaknya dilalui untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sosial.

▪ **Yayasan Jatidiri Bangsa**

Yayasan Jatidiri bangsa didirikan dengan tujuan ingin mengembalikan jati diri bangsa yang selama ini cenderung telah dilupakan. Diketahui oleh H.Soemarno Soedarsono, Prof DR. M. Quraish Shihab, Soerjadi Soediro, dan Drs. Radius Prawiro.

Yayasan ini menyelenggarakan Temu Nasional peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-78 yang berakhir Senin 16/10/2006, yang menghasilkan lima butir Deklarasi Jati Diri Bangsa.

▪ **Gema Nusa (Gerakan Membangun Nurani Bangsa)**

Dipelopori oleh KH Abdulah Gymnastyar, Gema Nusa dideklarasikan di Monumen Bandung Lautan Api (BLA) Tegallega 12 Septemeber 2004, dan di Jakarta pada tanggal 10 November 2004. Menyelenggarakan berbagai kegiatan melalui jaringan sukarelawan yang menjadi anggotanya. Sebagian besar mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan, seperti guru, pelajar, mahasiswa dan karyawan berbagai lembaga pendidikan swasta serta pemerintahan.

▪ **Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia**

Dideklarasikan 31 Agustus 2005 diTeater Perpustakaan Nasional, Jakarta dengan ketua Drs Irsyad Sudiro, Msi. Dengan tujuan "terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia yang berkualitas, terhormat, sejahtera lahir dan batin". Dasar gerakan ini adalah mengacu kepada nilai-nilai: (a) ajaran agama; (b) falsafah bangsa Pancasila; (c) peraturan perundangan yang berlaku; (d) nilai-nilai luhur budaya bangsa dan (e) adat-istiadat yang masih dipelihara dan tidak bertentangan dengan keempat hal tersebut di atas.

▪ **Barisan Kebangkitan Indonesia Raya**

Dibentuk atas prakarsa mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, KH Ali Yafie, dan sejumlah tokoh lainnya, pada hari Selasa 27 Januari 2004 di Jakarta. Latar belakangnya, keprihatinan yang disebabkan oleh berlanjutnya kondisi keterpurukan sejak muncul krisis multidimensi lima tahun lalu.

▪ **Tim Indonesia Bangkit**

Terdiri dari 35 orang ekonom muda seperti Drajat Wibowo (anggota komisi XI DPR), Fadhil Hasan, Aviliani, Hendri Saparini, dan Binny Buchori. Kelompok ini giat mengamati bidang ekonomi, terutama isu-isu yang peka terhadap proses pemulihan Indonesia dari krisis dan masalah sosial.

3.5.1. Kekuatan dan Kelemahan

a. Kekuatan

- Berkarakter lebih populis, bertolak dari swadaya dan prakarsa masyarakat sendiri, dan tidak bersifat doktriner/pemaksaan.
- Menyusun agenda-agenda yang lebih terfokus dengan pembatasan ruang-lingkup yang lebih jelas, dan diarahkan melalui strategi implementasi tertentu.
- Mengaitkan nilai-nilai pada level normatif di satu sisi, dengan operasionalisasinya pada level perilaku di sisi lain. Sehingga pelaksanaan pada tingkat praktek lebih dapat diukur dan dievaluasi.
- Menekankan mekanisme *bottom-up* dan praktek-praktek yang sederhana dan dapat dilakukan sehari-hari, menuju kepada abstraksi di tingkat nilai-nilai karakter dan peking yang diinginkan. Dengan sifatnya yang tidak doktriner dan tidak ideologis, maka lebih mudah diserap oleh masyarakat.

b. Kelemahan

- Umumnya kegiatan yang dilakukan masih terpisah-pisah dalam agendanya masing-masing, belum menjadi suatu *networking*.
- Biasanya masih mengandalkan kepada suatu figur atau tokoh, sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang paternalistik.
- Untuk mencapai strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang menyeluruh dan bersifat jangka panjang, gerakan-gerakan swadaya ini tetap membutuhkan suatu dukungan *political will* dan sambutan dari pemerintah; jika tidak akan berhenti tanpa mampu mempertahankan kesinambungannya.
- Belum berakar pada suatu basis akar rumput, khususnya di daerah-daerah yang umumnya menganut nilai-nilai yang bersifat masyarakat adat.

BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI SWOT

Untuk menetapkan strategi diperlukan pengetahuan mengenai *positioning*, yaitu dimana posisi seseorang, sebuah organisasi, atau yang lebih luas (bangsa) di dalam lingkungannya. Pembagian lingkungan secara sederhana adalah lingkungan internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Melalui analisis terhadap lingkungan, yang biasa disebut SWOT, maka diketahui posisi saat ini (*existing condition*), serta faktor-faktor yang menentukan arah strategis selanjutnya.

4.1. Isu-Isu Permasalahan PKPB Saat Ini

Dewasa ini terdapat berbagai isu dan permasalahan yang erat kaitannya dengan strateg pembangunan karakter dan pekerti bangsa ke depan. Di bawah ini adalah hasil diskusi dari FGD (*Focus Group Discussion*), melalui penyampaian berbagai sudut-pandang dan

kompetensi berbagai disiplin ilmu, dalam rangka menjabarkan persoalan-persoalan seputar karakter dan pekerti yang dihadapi bangsa.

a. Isu Perubahan Global

Isu mendasar yang dihadapi, tidak saja oleh bangsa Indonesia melainkan seluruh bangsa di dunia adalah fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang mendorong terjadinya pertukaran dan persebaran informasi secara cepat antar negara, yang kerap disebut proses *globalisasi*. Salah satu perubahan nyata yang dapat dirasakan dari proses globalisasi adalah terbukanya *dinamika segitiga* antara pasar, pemerintah, dan masyarakat. Ada kekhawatiran dalam konteks ini, akan mampukah pemerintah menghadapi pertumbuhan kekuatan pasar yang begitu kuat dan semakin kuat? Hal ini menjadi pertanyaan besar, sebab pemerintah memikul tanggung-jawab untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang lemah dan termarginalisasi, termasuk dari kekuatan pasar yang sering terlalu menekan.

Dalam konteks pembangunan karakter dan pekerti bangsa, pergeseran nilai akibat pengaruh globalisasi dengan nyata dapat diamati, dimana tujuan hidup orang sekarang bukan bagaimana menjadi 'orang yang berbudi luhur' (NILAI BAIK) melainkan 'menjadi orang yang sukses' (NILAI GUNA). Hal ini dapat diperiksa, misalnya dengan menanyakan siapa kira-kira yang lebih diidolakan oleh remaja saat ini, apakah Bunda Theresa yang tanpa pamrih berbuat kebajikan bagi orang-orang miskin di India atau pemenang kontes AVI yang diliputi gebyar lampu dan sorotan kamera?

Maka, di dalam strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa harus mampu dirumuskan tanggapan terhadap fenomena ini. Terjadinya perubahan global menunjukkan akselerasi dramatis di berbagai bidang, sehingga diramalkan akan melahirkan masyarakat post-industri (*post-industrial societies*) yang memiliki karakteristik-karakteristik yang sangat berbeda dengan masyarakat industri.

b. Disintegrasi Nation-State dan Konflik Sosial

Dinamika perubahan sosial masyarakat Indonesia sejak akhir 1990an ditandai dengan memaraknya konflik (baik horizontal maupun vertikal) serta kecenderungan disintegrasi sebagai sebuah bangsa.

Akar konflik, dari sudut filsafat, adalah ketika seseorang melihat orang lain sebagai **Yang Lain** (the Other) yang harus dikalahkan. Ketika Yang Lain dilihat sebagai lawan, bukan kawan, maka semakin subur ketegangan sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Hal ini diperkuat lagi dengan nilai-nilai kebudayaan yang terlalu menekankan KOMPETISI (prinsip '*menang dengan mengalahkan*'), menyebabkan makin merosotnya kepedulian. Yang Lain dilihat bukan sebagai pihak yang harus ditolong, melainkan sesuatu yang harus dikalahkan.

Pada prinsipnya, untuk strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa, kondisi ini menuntut dilakukannya investasi sosial untuk memupuk modal sosial berupa *trust*, yakni menumbuhkan kembali rasa saling percaya di antara kelompok-kelompok yang berseberangan.

c. Homogenisasi Nilai-Nilai

Secara teoritis-konseptual yang disebut 'bangsa Indonesia' sebenarnya TIDAK ADA, karena yang riil adalah 'rumpun-rumpun bangsa' yang dipersatukan dalam konsep 'pertautan budaya'. Lebih jauh lagi proses kolonialisasi yang panjang telah menanamkan rasa senasib sepenanggungan di antara rumpun-rumpun bangsa tersebut. Dengan proses kolonialisasi, rumpun-rumpun bangsa di Indonesia mengalami pengkotak-kotakan (berdasarkan wilayah geografis) yang diciptakan oleh pemerintah kolonial dan – secara disadari atau tidak – masih diteruskan oleh pemerintah hingga sekarang. Inilah kesalahannya ketika Pancasila, sebagai *kristalisasi* nilai-nilai luhur bangsa yang digali oleh *the founding fathers*, hendak diterapkan secara homogen tanpa memandang perbedaan di antara rumpun-rumpun tersebut. Akhirnya, 'kesatuan' diterjemahkan sebagai 'kesamaan', 'kesatuan' diterjemahkan sebagai 'kesamaan'.

Penyempitan wacana nilai-nilai luhur bangsa semacam ini, cenderung menciptakan tafsir tunggal sehingga menafikan kenyataan bahwa pembentukan karakter dan pekerti juga adalah *masalah pilihan* yang mengandaikan diakuinya keragaman/ pluralitas nilai-nilai di dalam masyarakat. Sebagian besar tokoh pahlawan nasional, sebagai contoh, adalah tokoh-tokoh yang menonjol di bidang kemiliteran/kekuasaan politik dan sangat sedikit tokoh intelektual. Patung-patung yang menghiasi kota, nama gedung, nama jalan, bahkan nama universitas yang merupakan wahana akademis pun lebih banyak menggunakan nama-nama tokoh pahlawan perang atau penguasa militer. Hal ini butuh kekesimbangan, sehingga tidak ada bias yang mengarah kepada homogenisasi nilai-nilai yang mempengaruhi pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

d. Melemahnya Etos Budaya

Metode pengembangan nilai-nilai luhur yang dilakukan secara tidak seimbang dan sentralistik di masa lalu cenderung menenggelamkan etos-etos unggul yang dimiliki oleh sukubangsa-sukubangsa, sehingga sebagian dari etos tersebut ada yang hilang/punah, ada

yang rusak, ada pula yang tidak berkembang. Beberapa contoh etos unggul yang dimiliki sukubangsa Indonesia misalnya: *etos dagang dan merantau* (Minangkabau), *etos kerja* (Madura), *etos pertanian* (Jawa), *etos maritim* (Bugis). Etos-etos unggul-positif tersebut perlu diidentifikasi dan diinventarisasi, untuk kemudian ditransformasikan dan ditularkan kepada suku-suku lain melalui proses revitalisasi; sehingga keragaman yang ada dapat memberikan kemanfaatan bagi bangsa keseluruhan. Studi ini menindak-lanjuti permasalahan dengan melakukan kajian kesukubangsaan di daerah-daerah.

d. Terkikisnya Warisan Lokal

Gejala lain yang memberikan faktor negatif terhadap pembangunan karakter dan pekerti bangsa adalah kecenderungan terkikisnya warisan budaya dan warisan sejarah bangsa. Pada satuan terkecil pemerintahan, yakni tingkat desa, terjadi marjinalisasi terhadap kekayaan budaya dan sejarah lokal, karena terlalu ditekankan kepada prinsip sentralisasi kekuasaan sebagaimana pada UU no.15/1975 tentang pemerintahan Desa. Selain itu, karena kurangnya apresiasi dan upaya pelesatarian, banyak warisan lokal yang punah atau tidak terawat. Banyak yang telah hilang dalam bentuk-bentuk artistik (perahu, rumah, dll), serta tokoh Mitologi/legenda lokal yang melekat pada masyarakat (contohnya: Sakerah, pahlawan lokal Madura). Padahal kekayaan warisan lokal ini merupakan salah satu sumber acuan yang efektif untuk mengembangkan karakter dan pekerti bangsa, karena sifatnya yang dekat dan melekat dengan ingatan kolektif masyarakat.

Kendati permasalahan ini sebagian telah diantisipasi dengan Kebijakan Otonomi Daerah, yang memberi keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk mendefinisikan persoalan dan memecahkan permasalahan dengan pendekatan lokal, namun secara nyata belum terlihat upaya-upaya menyeluruh dan efektif untuk respon hal ini. Di sini dipahami, bahwa sukubangsa-sukubangsa yang ada pun sesungguhnya mengalami proses rekonstruksi/reinventing, yaitu tengah dalam proses mendefinisikan dan menemukan kembali jati dirinya di tengah tekanan globalisasi, khususnya mengenai simbol-simbol warisan budaya.

f. Praksis Sosial yang Kontradiktif

Tabrakan nilai-nilai (antara modern-tradisi, pluralisme-homogenisme, pusat-daerah, agama-sekuler, dan seterusnya) saat ini cenderung menghasilkan masyarakat yang ambigu. Standar nilai-nilai menjadi lebih tak terbaca, dan orang cenderung jatuh kepada pilihan pragmatisme, memilih apa yang mudah dan menguntungkan saja. Pada akhirnya, praksis

sosial menjadi kontraditif: orang berbuat salah tapi sukses akan dihormati/disegani, sementara orang jujur/baik tapi tidak kaya akan dipandang remeh.

Keseluruhan isu-isu di atas berkembang menjadi berbagai permasalahan di lapangan kehidupan berbangsa-bernegara, sebagaimana tercermin pada gejala-gejala yang tampak maupun masih bersifat laten. Di bawah ini adalah analisis SWOT terhadap pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

4.2. Analisis Lingkungan Internal

4.2.1. Kekuatan (*Strenghts*)

a. Tradisi / Etos Lokal

- Tradisi lokal menyimpan khasanah yang kaya akan nilai-nilai karakter dan pekerti, dengan keragaman dan variasinya.
- Keterikatan individu kepada tradisi lokal masih kuat, kendati mereka telah hidup di kota-kota dengan sarana/prasarana modern.
- Banyak nilai-nilai kearifan lokal yang dulu tidak dihargai, sekarang mendapat apresiasi lebih baik dan tidak kalah dengan nilai-nilai dari luar.

b. Payung Ideologis Pancasila

- Pancasila merupakan kerangka normatif yang dapat diterima oleh semua pihak. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Sila-sila dari Pancasila terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga nilai serta norma yang bertentangan pasti akan ditolak.
- Pancasila diakui sebagai milik bersama oleh semua lapisan masyarakat maupun sukubangsa-sukubangsa yang berbeda.

- Pancasila diharapkan dapat menjadi ideologi yang terbuka, setelah mengalami proses sakralisasi dan indoktrinasi pada masa sebelumnya.

c. Proses Demokratisasi

- Pasca-reformasi, kesadaran masyarakat akan hak-haknya semakin meningkat. Termasuk dengan keberhasilan proses pemilihan umum langsung di tingkat nasional maupun lokal.
- Kesadaran pemerintah semakin meningkat, bahwa pendekatan sentralistik, *top-down*, dan tertutup (*rigid*) tidak tepat untuk konteks pembangunan saat ini.
- Pemberdayaan masyarakat meningkat di berbagai sektor, terutama pihak-pihak yang lemah seperti petani, buruh, nelayan, kaum pekerja perempuan, anak-anak, dan lain sebagainya. Termasuk kelompok-kelompok pemberdayaan yang bergerak di sektor ekonomi (kredit usaha, koperasi, UKM)
- Kesadaran (*awareness*) akan lingkungan hidup meningkat. Eksploitasi alam melalui pemilik modal kuat semakin diawasi (penebangan hutan, penambangan liar, pencemaran lingkungan oleh industri, dll).

4.2.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Kelemahan Sistemik

- PKPB terkait dengan hal-hal yang urgen, meliputi hal-hal yang mengancam integritas dan kesatuan bangsa.
- Ada contoh kasus, seorang murid yang nilainya buruk ketika di Indonesia. Tapi sewaktu sekolah di Amerika justru memperoleh penghargaan dari pemerintah AS. Hal ini mungkin karena ada sistem yang salah.
- Agenda reformasi belum secara tajam memberikan konsep yang strategis sebagai acuan yang berkesinambungan. Era reformasi, meski telah melakukan amandemen UUD, belum bisa memberikan konsep. Akhlak mulia dan pembanguna karakter dan pekerti bangsa mungkin bisa menjadi bagian terkait dari pengamalan Pancasila.
- Dengan SPKPB bangsa berada pada sikap yang nasionalis sekali. Sudah ada dasar atau wadahnya telah dimiliki yaitu Pancasila dan P4, tapi bagaimana mengaplikasikannya masih sangat sulit.

- Hadis: "Di sebuah kaum hanya bisa berdiri karena ada akhlak, jika tidak ada maka runtuhlah bangsa tersebut." Bangsa memang sedang mengalami kemerosotan, terutama dalam masalah akhlak. Ini adalah persoalan normatif, artinya semakin diajarkan maka semakin ditertawakan. Sebab hal ini tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tapi bagaimana melembagakannya.

b. Kelemahan Level Normatif

- Kalau tujuannya ingin menanamkan kembali karakter bangsa Indonesia, maka perilaku yang baik mulai menipis (seperti: sopan-santun anak-anak yang mulai menipis, perilaku yang kurang santun, dll).
- Ada salah satu yang penting yaitu adanya budaya permisifisme yang sangat tinggi. Hal ini seharusnya dikikis terlebih dahulu.

c. Kelemahan Perilaku Individu

- Pada tataran perilaku gejala yang dapat diamati adalah meningkatnya kecenderungan perilaku egosentrisme, individualistis, materialistis, dan anarkis di berbagai lapisan masyarakat
- Perilaku Anarkis/Tidak Toleran yang berlawanan dengan karakter bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan sopan-santun. Sekarang menunjukkan gejala sebaliknya dengan maraknya tindakan-tindakan kekerasan di berbagai lapisan sosial.
- Individualisme-Materialisme meningkat dengan kecenderungan sikap hidup yang tidak mempedulikan kesetiakawanan sosial, sehingga meningkatkan ketegangan sosial antara lapisan bawah dan atas.

4.3. Analisis Lingkungan Eksternal

Fenomena globalisasi sejak dekade 1980an telah menimbulkan kecemasan semua bangsa, karena mengingat bahaya bahwa identitas nasional akan tenggelam menjadi keseragaman identitas global yang bersifat mendunia. Globalisasi berarti semakin besar pula ancaman tergerusnya identitas nasional dalam proses tersebut. Kekhawatiran ini tidak saja

dirasakan oleh bangsa-bangsa di negara berkembang melainkan termasuk juga di negara-negara maju. Tiap negara harus merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk menanggulangi dampak negatif globalisasi tanpa bangsa harus mengisolasi diri dari pergaulan dunia.

Globalisasi sendiri diakui adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dalam pergaulan bangsa-bangsa, yakni suatu keniscayaan yang ditopang oleh kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi sehingga meniadakan kendala ruang-waktu di antara negeri-negeri yang berjauhan secara tempat.

4.3.1. Peluang (*Opportunities*)

- Kemajuan pesat teknologi informasi, memicu proses akselerasi pertukaran informasi melintasi batas-batas negara dimana setiap bangsa memperoleh kesempatan bersaing secara terbuka. Maka abad 21 dikatakan adalah abad pengetahuan dan informasi, bercirikan persaingan (*competitiveness*), keahlian (*competence*), dan akselerasi perubahan di segala bidang. Sekaligus di dalamnya terdapat peluang-peluang yang tidak ditemukan pada masa sebelumnya.
- Aspek nilai-nilai dan karakter dewasa ini dipandang signifikan terhadap daya saing individu maupun suatu masyarakat. Karakter dan pekerti dikedepankan sebagai *soft competence* untuk mengimbangi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu *hard-competence* yang memprasyaratkan suatu bangsa untuk menang dalam persaingan abad 21. Pembentukan karakter dan pekerti mendukung penguasaan ilmu-pengetahuan dan teknologi, tidak saja untuk meningkatkan daya saing serta keunggulan bangsa, melainkan juga memperkokoh kuatnya jatidiri bangsa di pentas global.

4.3.2. Ancaman (*Threats*)

- Pada pokoknya adalah budaya masyarakat yang harus dibenahi karena untuk membentuk suatu ketahanan yang nasional, hal ini penting untuk dikaji. Kita melihat apa yang kita tuju adalah bermula dari suatu ancaman, yaitu **Ancaman Global**. Saat ini berkembang budaya yang instan, konsumeristik, dsb. Hal ini adalah hasil dari budaya global. Ancaman ini harus kita *cover* untuk mencari solusinya.

- *Meningkatnya ketidak-amanan global dengan maraknya Aksi Terorisme* : Aksi peledakan bom dengan tujuan politis merupakan gejala baru yang mewarnai kehidupan bangsa belakangan ini. Ini merupakan pengaruh dari situasi ketidak-amanan global yang melanda semua negara saat ini, dan sebagai suatu manifestasi rapuhnya pondasi nilai-nilai dan tatanan sosial suatu bangsa.

4.4. Analisis Strategik PKPB

4.4.1. Kendala-Kendala Strategik

a. Metode

Untuk melaksanakan pembangunan karakter dan pekerti bangsa secara efektif berbagai metode tersedia. Penanaman nilai-nilai karakter dan pekerti memerlukan metode secara bertahap, yaitu:

- Tahap Pengenalan/sosialisasi nilai-nilai
- Tahap Mencipta Contoh/Keteladanan (*role modelling*)
- Tahap *Reinforcement* melalui pengulangan dan pemberian *reward/punishment*.

Ketiga tahapan pokok ini adalah acuan standar pembangunan nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa. Setiap tahap harus menggunakan metode tersendiri dan memiliki kendalanya sendiri, akan tetapi pada prinsipnya tahap-tahap yang ada harus dilakukan secara berkesinambungan (tidak terputus-putus), untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Selain itu, tiap program PKPB harus mengidentifikasi bagaimana kondisi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Ada tiga model yang menggambarkan kondisi nilai-nilai di masyarakat yaitu:

- Kondisi Nilai Melemah: strateginya adalah menghidupkan kembali (*revive/revitalisasi*) nilai-nilai yang melemah tersebut.
- Kondisi Nilai Rusak/Usang: strateginya merekonstruksi nilai-nilai yang rusak/usang tersebut.

- Kondisi Nilai Hilang/Terputus: memperbaharui dan menemukan kembali (*reinvention*) nilai-nilai yang hilang/terputus tersebut.

Dengan pengenalan terhadap kondisi nilai-nilai yang ada, maka diharapkan program PKPB yang dilaksanakan lebih memiliki fokus dan tepat sasaran.

b. Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi, penyusunan strategi PKPB harus melewati cara-cara pendekatan konvensional dan terbatas sebagaimana dilakukan di masa lalu. Idealnya, strategi PKPB adalah :

- Simultan
- *Empowering*
- Proses
- Didukung dengan *ikon* (ikon PKPB), yaitu tokoh-tokoh publik maupun tokoh-tokoh panutan (baik tokoh kontemporer maupun tokoh historis) yang dijadikan acuan/teladan masyarakat.

Prinsip pokoknya adalah bagaimana mengembangkan pendekatan yang emansipatif-partisipatoris. Selain itu diperlukan pula:

- *Aspek perencanaan*: Membuat *road-map* Pembangunan Budaya (*objectives* jangka pendek, menengah, jangka panjang).
- *Aspek evaluasi kinerja*: Perlu ada *Operation Research* untuk memonitor program sedang berjalan.
- *Aspek kerjasama/sinergi*: Pusat jangan melakukan sendiri, Daerah perlu diberdayakan (menciptakan *networking* pembangunan budaya).

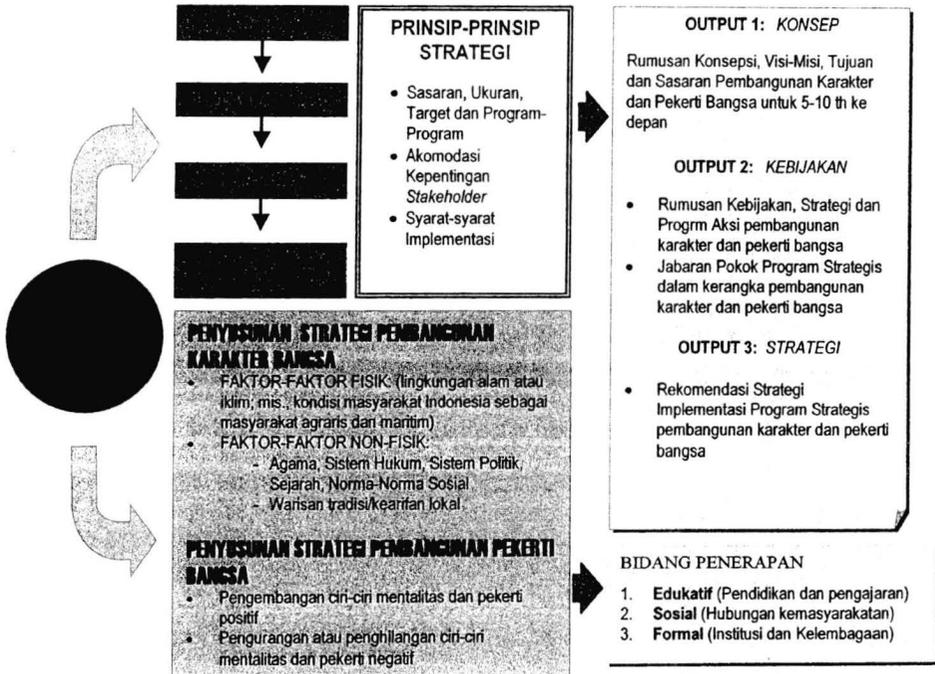
4.4.2. Bidang Penerapan SPKPB

Bidang terapan pembangunan karakter dan pekerti bangsa sesungguhnya meliputi hampir semua sisi kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa- bernegara. Karena

bagaimana pun, masalah karakter dan pekerti bangsa senantiasa terkait dengan masalah pendidikan, komunikasi massa, hukum, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pertahanan-keamanan dan seterusnya. Namun, untuk penerapan pada tahap strategi jangka pendek dan menengah, pada kegiatan ini akan difokuskan menjadi tiga bidang pokok, yang dijelaskan di bawah ini.

1. **EDUKATIF (Bidang Pendidikan dan Pengajaran)** bertujuan memberi pokok-pokok arahan materi ajaran baik bagi pendidikan formal maupun informal dalam merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan nilai luhur bangsa bagi generasi muda. Dengan kata lain, bidang ini adalah upaya penerusan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus bangsa sehingga mereka tidak mudah tercerabut dari 'akar' nilai-nilai yang telah termanifestasikan dalam kehidupan individu maupun kemasyarakatan bangsa sejak dulu.
2. **SOSIAL (Bidang Hubungan Kemasyarakatan)** bertujuan memberi arahan pengembangan pola hubungan kemasyarakatan yang berorientasi pada upaya penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
3. **FORMAL (Bidang Insitusi dan Kelembagaan)** bertujuan memberikan arahan strategis pengembangan kelembagaan yang mendukung upaya pembangunan karakter dan pekerti bangsa di tingkat nasional dan lokal

Adapun, keterkaitan antara bagian demi bagian dalam strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa adalah seperti terlihat pada Gambar 2.2.



Bagan 4.2. Sistematika SPKPB

BAB V

HASIL STUDI LAPANGAN

Kegiatan studi lapangan adalah kajian ilmiah untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai masukan untuk merumuskan strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Kegiatan ini dilakukan dengan mengirim peneliti keempat kluster yang telah ditetapkan diwakili oleh kota-kota besar yaitu Medan, Yogyakarta, Balikpapan, dan Makassar. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif (*grounded research*) dan didukung dengan metode kuantitatif untuk menguji model (studi verifikasi).

Dalam studi *grounded research*, fokus bersumber pada kajian nilai-nilai yakni dalam hal ini menggali, menemukan, dan mengumpulkan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat (suku bangsa). Dalam hal ini suku bangsa yang terbagi atas empat kluster (lihat pada sub bab berikutnya). Secara keseluruhan, temuan data yang didapat dalam *grounded research* (lihat tabel 4) diabstraksikan lebih lanjut menjadi dimensi-dimensi karakter dan pekerti bangsa. Hasilnya sebagai berikut:

1. **Sumber Nilai** : Nilai Adat Bersumber dari Nilai Agama
2. **Nilai Dasar Hidup** : Malu

3. **Tertib Sosial** : Keseimbangan
4. **Hubungan dengan Orang Lain** : Tenggang Rasa
5. **Hubungan dengan Sistem Sosial** : Adaptif dan Tahu diri
6. **Kehormatan Diri** : Menjaga Harga Diri
7. **Kepemimpinan** : Panutan
8. **Etos Kerja** : Kerja Keras dan Kreatif
9. **Sikap terhadap Kelompok** : Orientasi kepada Kelompok Kesukuan

Tabel 5.4 Nilai Lintas Kluster

DIMENSI KARAKTER BANGSA	Tabel Nilai Lintas Kluster				
	POLA ANTAR KLUSTER	KLUSTER SUMATERA	KLUSTER JAWA-BALI	KLUSTER KALIMANTAN	KLUSTER SELAWESI
TERTIB SOSIAL	Keseimbangan	<i>Keseimbangan</i>	<i>Keselajaran</i>		
HUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN	Tenggang rasa	<i>Tenggang rasa</i>	<i>Sikap harus mengikuti aturan</i>	<i>Tenggang rasa</i>	<i>Tenggang rasa dan menghormati orang lain</i>
HUBUNGAN DENGAN SISTEM SOSIAL	Adaptif dan Tahu diri	<i>Terbuka & adaptif</i>			
NILAI DASAR HIDUP	Malu	<i>Benar, jujur & rasa malu</i>			
SIKAP TERHADAP KELOMPOK	kesukuan	<i>Orientasi pada kelompok kesukuan</i>			
SUMBER NILAI	Nilai adat bersumber dari nilai agama (takwa)	<i>Agama dan adat tidak terpisahkan</i>	<i>Agama dan adat tidak terpisahkan</i>		
KEPEMIMPINAN	Panutan	<i>Memiliki Panutan</i>	<i>Memiliki Panutan</i>	<i>Memiliki Panutan</i>	<i>Memiliki Panutan</i>
ETOS KERJA	Kerja Keras dan Kreatif	<i>Kerja keras</i>	<i>Bekerja keras untuk hidup</i>	<i>Bekerja keras untuk hidup</i>	<i>Berusaha dan kreatif</i>
KEHORMATAN DIRI	Menjaga Harga diri		<i>Menjaga harga diri</i>		<i>Menjaga harga diri dan keluarga</i>

Studi verifikasi merupakan satu rangkaian dalam studi lapangan yakni dengan mekanisme penyebaran kuesioner untuk mendapatkan gambaran tingkatan / ukuran terhadap hasil temuan *grounded research*. Dimensi-dimensi karakter dan pekerti (adat bersumber agama, malu, tertib sosial dan keseimbangan, tenggang rasa, adaptif dan tahu diri, menjaga harga diri, kepemimpinan, etos kerja keras, dan sikap terhadap kelompok / suku) yang kemudian diukur melalui studi verifikasi.

Untuk melakukan pengukuran verifikasi melalui kuesioner nantinya akan digunakan teori SIKAP, dimana dikatakan bahwa apabila dilihat dari strukturnya sikap terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen kognitif,afektif dan konatif :¹

1. Komponen kognitif, berupa apa yang dipercayai oleh subjek pemilik sikap. Kepercayaan datang dari apa yang pernah kita lihat atau apa yang telah kita ketahui. Berdasarkan itu, terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek. Setelah kepercayaan itu dibentuk maka ia akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu. Di dalamnya juga terdapat pengalaman pribadi yang cenderung membuat stereotip sehingga apabila stereotip melekat lama, orang akan mempunyai sikap yang lebih didasarkan pada predikat yang dilekatkan pada objek. Hal ini akan sulit untuk diubah.
2. Komponen afektif, menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Komponen ini secara umum disamakan dengan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Reaksi emosional banyak ditentukan oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar bagi objek yang dimaksud.
3. Komponen Konatif (perilaku) dalam sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Asumsi dasar adalah bahwa kepercayaan dan perasaan mempengaruhi perilaku. Kecenderungan berperilaku secara konsisten dan selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individu.

Maka selanjutnya operasionalisasi konsep SIKAP yang di maksud dalam penelitian ini merupakan sikap individu dalam memahami sembilan nilai karakter dan pekerti .² Terdapat 3 komponen yang digunakan untuk mengukur sikap individu dalam memahami nilai karakter dan budi pekerti bangsa, yaitu :

¹ James T. Tedeschi, Svonn Lindskold, dan Paul Roswnfield, *Introduction to Social Psychology*, Minnesota: West Publishing Company, 1990, hlm.143

² <http://education.yahoo.com/reference/encyclopedia/entry?id=13837>

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

1. Komponen kognitif, berupa pengetahuan dan kepercayaan tertentu dalam diri individu yang dalam ini berkaitan dengan sembilan nilai karakter dan budi pekerti bangsa yang terdiri dari :
 - ♣ Pengetahuan individu tentang pengetahuan tentang nilai adat bersumber dari agama
 - ♣ Pengetahuan tentang nilai dasar hidup malu
 - ♣ Pengetahuan tentang nilai tertib sosial keseimbangan
 - ♣ Pengetahuan tentang nilai hubungan dengan orang lain yang berupa tenggang rasa
 - ♣ Pengetahuan tentang nilai hubungan dengan sistem sosial yang berbentuk adaptif dan tahu diri
 - ♣ Pengetahuan tentang nilai kehormatan diri yang berupa menjaga harga diri
 - ♣ Pengetahuan tentang nilai panutan dalam kepemimpinan
 - ♣ Pengetahuan tentang nilai etos kerja yang berupa kerja keras dan kreatif
 - ♣ Pengetahuan tentang nilai kesukuan sebagai bentuk sikap terhadap kelompok

2. Komponen afektif, yang menyangkut emosional subjektif terhadap suatu objek sikap, yang dalam penelitian ini merupakan perasaan subjektif individu terhadap sembilan nilai karakter dan budi pekerti bangsa, yang terdiri dari :
 - ♣ Perasaan terhadap nilai masyarakat yang bersumber dari agama
 - ♣ Perasaan terhadap nilai dasar hidup malu
 - ♣ Perasaan terhadap nilai tertib sosial berupa keseimbangan
 - ♣ Perasaan terhadap nilai hubungan dengan orang lain berupa tenggang rasa
 - ♣ Perasaan terhadap nilai hubungan dengan sistem sosial yang berbentuk adaptif dan tahu diri
 - ♣ Perasaan terhadap nilai kehormatan diri yang berupa menjaga harga diri
 - ♣ Perasaan terhadap nilai panutan dalam kepemimpinan
 - ♣ Perasaan terhadap nilai etos kerja berupa kerja keras dan kreatif
 - ♣ Perasaan terhadap nilai kesukuan sebagai bentuk sikap terhadap kelompok

3. Komponen Konatif, yang menyangkut perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan perilaku atau kecenderungan berperilaku individu terhadap sembilan nilai karakter dan budi pekerti bangsa, yang terdiri dari :
- ☞ Perilaku individu terkait dengan nilai yang bersumber dari nilai agama
 - ☞ Perilaku individu terkait dengan nilai dasar hidup malu
 - ☞ Perilaku individu terkait dengan nilai tertib sosial berupa keseimbangan
 - ☞ Perilaku individu terkait dengan nilai hubungan dengan orang lain berupa tenggang rasa
 - ☞ Perilaku individu terkait dengan nilai hubungan sistem sosial yang berbentuk adaptif dan tahu diri
 - ☞ Perilaku individu terkait dengan nilai kehormatan diri yang berupa menjaga harga diri
 - ☞ Perilaku individu terkait dengan nilai panutan dalam kepemimpinan
 - ☞ Perilaku individu terkait dengan nilai etos kerja berupa kerja keras dan kreatif
 - ☞ Perilaku individu terkait dengan nilai kesukuan sebagai bentuk sikap terhadap kelompok

Dari dimensi-dimensi karakter dan pekerti tersebut, verifikasi yang didapat keseluruhan kluster adalah sebagai berikut:

Tabel.5.5 Data Konfigurasi Hasil Verifikasi Seluruh Kluster

No	Nilai	Kluster I	Kluster II	Kluster III	Kluster IV	Hasil
1	Adat bersumber dari agama	R	T	R	R	<i>Rendah</i>
2	Malu	T	T	T	T	<i>Tinggi</i>
3	Tertib Sosial & Keseimbangan	R	R	R	T	<i>Rendah</i>
4	Tenggang Rasa	R	T	R	R	<i>Rendah</i>
5	Adaptif & Tahu Diri	R	S	R	T	<i>Sedang</i>
6	Kepemimpinan	R	T	T	R	<i>Sedang</i>
7	Etos Kerja Keras	T	T	T	T	<i>Semua Tinggi</i>
8	Sikap Terhadap Kelompok/ Suku	T	T	R	T	<i>Tinggi</i>
9	Menjaga Harga Diri	T	T	T	T	<i>Semua Tinggi</i>

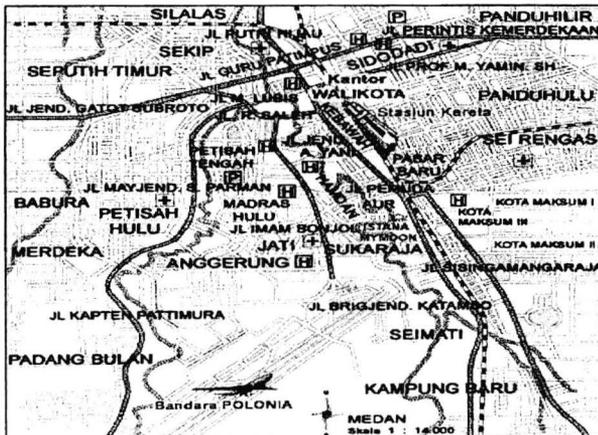
5.1. Kluster I (Sumatera)

5.1.1. Kota Medan Secara Sosio-Kultural

Sebagai pusat perdagangan baik regional maupun internasional, sejak awal Kota Medan telah memiliki keragaman suku bangsa, dan agama. Oleh karenanya, budaya masyarakat yang ada juga sangat pluralis yang berdampak beragamnya nilai – nilai budaya tersebut. Keragaman suku, tarian daerah, alat musik, nyanyian, makanan, bangunan fisik, dan sebagainya, justru memberikan kontribusi besar bagi kemajemukan kota Medan dan keunikan tersendiri.

Saat ini di kota Medan hidup berdampingan berbagai suku bangsa seperti Melayu, Batak dengan berbagai sub-etnisnya, Jawa, Minangkabau, Tionghoa dan Tamil atau yang lebih dikenal dengan sebutan ‘orang keling’ karena warna kulit mereka yang hitam. Keunikan kota Medan dengan banyaknya suku bangsa tersebut karena di kota Medan tidak pernah ada konflik dalam skala besar dengan yang didasarkan atas Suku, Agama, Ras dan AntarGolongan (SARA). Kesemua suku bangsa menciptakan harmonisasi kehidupan perkotaan, dengan tidak berusaha untuk saling mendominasi satu sama lainnya ataupun berusaha untuk mencampuri persoalan masing-masing suku bangsa.

Gambar 5.1 Peta Wilayah Kota Medan



Masing-masing suku bangsa seolah memberikan kontribusinya masing-masing bagi keragaman corak perkotaan kota Medan. Suku Jawa memegang jumlah penduduk pendatang terbesar, Suku Melayu sebagai 'pemilik historis' karena kota Medan terletak di tanah Melayu, suku Batak yang identik dengan Kota Medan, serta Tionghoa dan Tamil sebagai suku bangsa pendatang yang memberikan warna tersendiri bagi keragaman kota Medan.

Corak kehidupan yang menonjol dari kehidupan berbagai suku bangsa di kota Medan adalah berusaha untuk tidak mencampuri urusan suku bangsa lainnya. Setiap suku bangsa berusaha untuk dapat bertahan hidup dengan mengembangkan nilainya masing-masing yang tidak bertentangan dengan suku bangsa lainnya. Setiap anggota dari suku bangsa juga memegang nilai adat-istiadatnya sukunya masing-masing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai suku lainnya. Hal ini seolah-olah membuat kesan bahwa setiap suku hidup dengan nilainya sendiri dan tidak mempedulikan suku lainnya. Namun kondisi ini menjadikan setiap suku terikat dalam hubungan fungsional dengan suku lainnya. Suku Melayu memberikan kontribusi sebagai 'kebudayaan dominan' di kota Medan, Suku Batak dengan banyaknya jumlah pegawai pemerintahan dan sebagainya yang berasal dari suku ini, Suku Minang dan Tionghoa yang banyak menguasai sektor perdagangan dan Jasa dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, pemilihan suku bangsa didasarkan dengan pertimbangan bahwa suku bangsa yang bersangkutan berasal dari daerah *cluster* yang sama, yakni *cluster* Sumatera. Untuk itu dipilih suku bangsa Melayu, suku bangsa Batak dengan sub suku bangsa Batak Toba, Batak Simalungun dan Batak Karo, serta suku bangsa Minangkabau. Pertimbangan memilih ketiga suku bangsa diatas didasarkan karena Suku Melayu merupakan 'pemilik' dari kota Medan yang terletak di tanah Melayu dan kebudayaan dominan di kota Medan, Suku Batak dengan banyaknya orang Batak yang mengembangkan kota Medan serta Suku Minang sebagai suku pendatang yang berhasil dalam bidang perekonomian di kota Medan.

5.1.1.2. Suku Bangsa Batak, Minangkabau, dan Melayu

a. Batak

Sukubangsa Batak berasal dari daerah di sekitar danau Toba. Mereka dikenal memiliki nilai-nilai karakter dan pekerti yang khas, sehingga mudah dibedakan dari suku-suku bangsa lain. Wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh Batak yang ditemui menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

- a. Orang Batak ada prinsip pokok yang sama mengenai pola kekerabatan, yaitu bagaimana mengatur hubungan antar kelompok / marga. Prinsip ini disebut DALIHAN NA TOLU (dalam bahasa Batak Toba), TOLU SAHUNDULAN (Batak Simalungun) atau RAKUT SI TELU (Batak Karo). Koreksi mengenai *Dalihan Na Tolu*. Arti *Dalihan Na Tolu* adalah tungku yang kakinya tiga, kalau kakinya berkurang satu maka tungku tidak bisa berdiri. Dalam konteks sosial hula-hula misalnya adalah atasan di kantor (yang harus dihormati). Sebaliknya hula-hula harus bisa menjadi teladan dan lebih dahulu harus menunjukkan perhatian dan kasih-sayang untuk mendapatkan penghormatan. Selengkapnyanya sebagai berikut:
 - o *Somba mar hula-hula (bormat kepada pihak hula-hula).*
 - o *Elek mar boru (sayang kepada pihak boru).*
 - o *Manat mardongan tubu (harmonis dengan sesama).*
- b. Ikatan kesukuan dibangun melalui hubungan marga. Sesama orang Batak yang baru berkenalan memiliki kebiasaan melakukan MARTAROMBO (menelusuri silsilah keturunan) melalui *martutur* (bahasa Batak Toba) atau *ertutur* (bahasa Batak Karo). Kebiasaan ini adalah menentukan posisi masing-masing pihak dalam struktur hubungan kemargaan.
- c. Suku bangsa Batak terdiri atas lima sub suku (marga), yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Karo, dan Batak Pakpak.
- d. Batak Toba dikenal temperamental / kasar; karena mereka senang keterbukaan / keterusterangan dan berbicara apa adanya. Kadang-kadang tidak peduli lawan bicara tersinggung atau tidak.
- e. Tujuan hidup orang Batak dipandu oleh nilai HAMORAON (kekayaan berupa anak laki / perempuan); HAGABEON (kekayaan materi); HASANGAPON (martabat sosial).
- f. Adat dan agama dipandang punya fungsi berbeda (agama mengatur hub. Manusia-Tuhan, adat mengatur hubungan antar manusia). Dalam hal ini, Adat dan Agama saling menutupi.
- g. Untuk hubungan dengan kelompok di luar kerabat dan orang non Batak, prinsipnya adalah orang lain dianggap saudara atau SENINA. Pola ini menghasilkan hubungan toleransi, tenggang rasa dan kerjasama dengan orang-orang di luar suku bangsa Batak.
- h. Batak terdiri dari sub-sub suku bangsa berbeda. Batak Simalungun menganut prinsip HABONARON DO BONA (kebenaran adalah awal / pangkal segalanya) yang mengajarkan keteguhan sikap; namun di sisi lain, orang Simalungun mudah kehilangan

identitas; ketika bergaul seringkali terserap kepada sub-suku Batak lainnya (terutama Batak Toba).

- i. Pewarisan nilai-nilai dilakukan secara praktek, remaja / pemuda diukutkan dalam PARHOBAS (membantu di dapur ketika pesta) agar belajar tata cara upacara adat.

b. Minangkabau

Sukubangsa Minangkabau mendiami daerah sepanjang Bukit Barisan, tersebar mulai dari pesisir (Padang Pariaman) hingga ke dataran tinggi (Bukit Tinggi). Nilai-nilai karakter dan pekerti Minangkabau mengajarkan kemandirian dan kerja keras, dimana mereka dikenal sebagai suku bangsa yang aktif merantau untuk mencari penghidupan di luar wilayah mereka. Melalui wawancara dengan tokoh-tokoh Minangkabau yang ditemui di Medan, diperoleh temuan sebagai berikut:

- a. Minangkabau identik dengan agama Islam (*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*). Dahulu falsafah orang Minang merujuk kepada alam, oleh karena itu pepatah yang berkembang adalah *adat bersendi sara'*. Setelah Islam masuk di tanah Minang pepatah tersebut berubah menjadi *adat bersandi alur dan patut*.
- b. Adanya Nilai adaptasi (*dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung*).
- c. Adanya Nilai toleransi (*tenggang raso*).
- d. Ada Nilai tidak menyinggung perasaan orang lain (*bajalan peliharo kaki, bicaro peliharo lidah*).
- e. Adanya nilai sopan santun (*kuek rumah dek basandi, rusak sandi rumah binaso; kuek bangso dek budi, rusak budi bangso binaso*).
- f. Adanya Nilai kemandirian.
- g. Ada Nilai tanggung jawab keluarga (*anak dipangku, kemanakan dibimbing*).
- h. Kecintaan yang kuat kepada kampung halaman (tradisi *pulang basamo*).
- i. Budaya Merantau yang salah satunya adalah karena tekanan sosial bagi seorang lelaki di kampung halaman lebih besar daripada di perantauan (sistem *matrilinea*).
- j. Masyarakat Minang: egaliter. Adanya cerdik pandai, ulamai, ulama dan adat lebih merupakan cermin sistem sosial, bukan hirarkis. Pemimpin dalam pepatah Minang *ditinggikan seranting, didahulukan selangkah*, jadi tidak terlalu berjarak dengan uyang dipimpin dan sangat mungkin rakyat melakukan kritik / debat dengan pemimpinya.

- k. "*Anak dipangku kemanakan dibimbing*" itu pepatah baru juga, karena dulu seorang ayah bertanggungjawab hanya terhadap kemanakan. Kalau sekarang kedua-duanya (anak dan kemanakan).
- l. Sarana sosialisasi di dalam keluarga sangat rapuh. Yang efektif: *Lapau* (kedai kopi).
- m. Pembagian harta warisan: Laki-laki tidak boleh mengurangi harta (menjual) yang diperoleh orang tuanya tanpa persetujuan anak perempuan. Lelaki tidak mendapat pembagian tertentu, tapi yang ada otoritas (harus diajak berunding bila harta warisan hendak dijual).

c. Melayu

Sukubangsa Melayu tersebar luas di Nusantara, akan tetapi mereka terutama mendiami wilayah Riau, Kalimantan, dan Semenanjung (Malaysia). Melayu merupakan penduduk asli kota Medan, dengan adanya kerajaan Melayu Deli dan Istana Maimun yang kerap menjadi obyek wisata. Nilai-nilai karakter dan pekerti orang Melayu menekankan budibahasa yang santun dan sikap mengalah. Dari wawancara dengan tokoh-tokoh Melayu di Medan, diperoleh temuan sebagai berikut:

- a. Ada 8 Aspek Nilai-nilai pokok Melayu (aspek kepemimpinan, hubungan antar kelompok, antara keluarga, etika kerja, malu dan segan, kesederhanaan, gotong royong).
- b. Nilai kepemimpinan menekankan kepada penguasaan ilmu (*kalau kepala tidak berisi, timbang ke tengah baiklah ke pinggir*).
- c. Adat Melayu identik dengan agama Islam. Benar bahwa Melayu itu Islam, Islam itu Melayu (identik). Tapi ada nilai-nilai tepung tawar yang sebenarnya berasal dari kebudayaan Hindu bisa diadopsi.
- d. Nilai gotong – royong dan malu / segan merupakan nilai positif yang kini sudah jarang digunakan.
- e. Orang Melayu menjunjung adat-istiadat. Mereka selalu bertanya, Adat *resam* apakah masih dijaga? (*baik mati anak asal jangan mati adat*).
- f. Kekayaan material adalah nomer dua, yang utama nilai-nilai kebajikan dan Ketuhanan.
- g. Ada stereotipe orang Melayu pemalas/malas bekerja, karena memiliki kebiasaan suka bersantai-santai. Namun, stereotipe ini mungkin tidak benar lagi untuk zaman sekarang, karena pemuda-pemuda Melayu pun sadar bahwa mereka harus semakin rajin menuntut ilmu dan bersaing dalam berbagai profesi.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

- h. Arti pepatah '*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*' bukan merantau seperti pada konteks Minang, karena konsep merantau tidak ada pada Suku bangsa Melayu. Tapi lebih pada penyesuaian diri di lingkungan orang lain.
- i. Nilai kepemimpinan Melayu ditekankan pada budaya malu. Kepemimpinan dalam masyarakat Melayu didasarkan pada kemampuan dan budaya malu. Malu kalau tidak bisa memimpin dengan baik. Ada stereotipe bahwa budaya Melayu malas, tapi hal ini tentu harus dikikis.

5.1.3. Konfigurasi Nilai-Nilai Suku Bangsa yang Diteliti

Melalui sorting terhadap data lapangan yang diperoleh di kota Medan, ditemukan bahwa nilai-nilai karakter dan pekerti suku bangsa Batak, Minang, dan Melayu memiliki sejumlah kesamaan, namun terdapat pula perbedaan sebagaimana dapat dibaca dari tabel perbandingan di bawah ini (keterangan MH = nilai yang mencerminkan hubungan Manusia dan Hidup; MM = mencerminkan hubungan Manusia-Manusia; MA= mencerminkan hubungan Manusia-Alam; MK = mencerminkan hubungan Manusia-Kerja).

Tabel 5.6. Tabel Konfigurasi Nilai Kluster Sumatera

Tabel Konfigurasi Nilai Kluster Sumatera				
POLA NILAI BUDAYA	BATAK (TOBA KARO, SIMALUNGUN)	MINANG	MELAYU	ORIENTASI NILAI BUDAYA
PRINSIP DASAR SISTEM SOSIAL	<i>Daiban na tolu, Tolu Sabundulan, Rekut si telu</i> Prinsip dasar masy. Batak yang bertujuan untuk mencari keseimbangan dalam hidup	<i>Tiga tungku sejarangan</i> : dlm masy yg harmonis hrs ada 3 keahlian: cerdik pandai, ulama dan adat.	Adat resam: baik mati anak asal jangan mati adat Agar kehidupan sosial berjalan dg baik, maka hrs berpegang pada adat dan melestarikan adat.	MH, harmonis/ keseimbangan
ORIENTASI HIDUP	Mencapai: <i>Hamoraon</i> (kekayaan mempunyai keturunan), <i>Hagabeon</i> (bekerja keras utk mendapatkan kecukupan materi), <i>Hasangapon</i> (martabat tinggi)	Mencapai kemandirian dalam hidup: mampu bertanggung jawab terhadap keluarga secara luas (<i>anak dipangku kemandakan dibimbing</i>)	Mencapai kerhidaan Tuhan dan menjadi manusia yang berbudi: merendahkan diri, tidak menonjolkan diri, tidak mau memaksakan kemauan	MH

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

HUBUNGAN KERJASAMA UNTUK MENCIPTAKAN KEHARMONISAN	Membina hubungan tenggang rasa dengan kerabat maupun bukan kerabat (Sanina (Toba); <i>Senina</i> (Karo))	<i>Tenggang raro</i> , sopan santun, dan adaptif agar mudah diterima oleh pihak lain	Menghormati orang lain, menghormati tamu, gotong-royong	MM
MENJUNJUNG KEBENARAN DAN KEJUJURAN	<i>Habonaran do bona</i> (karo), kebenaran adalah awal dari segalanya. Tidak berbohong agar tidak merugikan diri sendiri dan keluarga	Budaya malu, jika mengajak sanak famili bekerja bersama	Malu jika melakukan perbuatan tercela, tidak benar, tidak jujur	MM, MH
ETOS DALAM MERANTAU	<i>Ertutur</i> (karo), <i>martutur</i> (toba & simalungun) Mencari sesama golongan etnik di perantauan	<i>"jika pergi merantau, carilah induk semang"</i> mencari sesama golongan etnik di perantauan	-	MH, etnosentris
AGAMA DAN ADAT	Agama dan adat saling melengkapi, adat mengatur hub. Man-man, agama mengatur hub. Man-tuhan	<i>"adat basandi syaria, syaria basandi kitabullah"</i> adat didasari atas nilai-nilai keagamaan, terutama islam	Islam = Melayu, Melayu = Islam.	MH
SARANA SOSILISASI	Keluarga sebagai penentu posisi ego dalam keluarga luas dan sebagai sarana sosialisasi; mengikutsertakan remaja dlm acara adat (<i>parbobas</i>)	Keluarga dan surau sebagai sarana sosialisasi agama dan adat	Keluarga sebagai sarana sosialisasi melalui pantun, petuah, gurindam, hikayat	MM
ADAPTASI	Keterbukaan menerima orang lain	<i>Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung</i>	<i>Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung</i>	MA, MH, MM
PENEMPATAN DIRI	<i>Ertutur</i> (karo), <i>martutur</i> (toba & simalungun) Mengetahui posisi ego dalam kekerabatan.	<i>Takruang ndak di luar, tampik dari ateh</i> : kalau pun terkurung di luar, kalau pun terhimpit di atas	<i>Kalau kepala tidak berisi timbang ke tengah baiklah ke pinggir</i>	MM

5.1.4. Nilai-Nilai Suku Bangsa dalam Verifikasi

Temuan data pada kluster Sumatera menunjukkan 3 nilai karakter dan pekerti yang bernilai tinggi (T), dalam arti nilai tersebut disepakati atau diverifikasi responden sebagai nilai yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan mereka. Nilai tersebut adalah *Menjaga Harga Diri*, *Etos Kerja Keras* dan *Sikap terhadap Kelompok/Suku*. Enam nilai lain mendapat verifikasi rendah (R).

Tabel 5.7 Data Tingkat Kognitif, Afektif, dan Konatif terhadap 9 Nilai

Nilai	Kognitif	Afektif	Konatif
Adat Bersumber Dari Agama	Rendah (65%)	Tinggi (63,3%)	Tinggi (58,3%)
Malu	Rendah (98,3%)	Rendah (58,3%)	Tinggi (80%)
Tertib Sosial & Keseimbangan	Rendah (100)	Rendah (88,3%)	Rendah (63,3%)
Tenggang Rasa	Rendah (100%)	Rendah (70%)	Rendah (70%)
Adaptif & Tahu Diri	Rendah (75%)	Seimbang (50%)	Rendah (76,7%)
Menjaga Harga Diri	Tinggi (63,3%)	Tinggi (90%)	Tinggi (96,7%)
Kepemimpinan	Tinggi (53,3%)	Tinggi (83,3%)	Rendah (83,3%)
Etos Kerja Keras	Tinggi(53,3%)	Tinggi (86,7%)	Tinggi (96,7%)
Sikap Terhadap Kelompok/Suku	Tinggi (61,7%)	Tinggi (81,7%)	Tinggi (91,7%)

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap orang pada kluster I terhadap 9 nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Tingkat Sikap Seseorang Terhadap 9 Nilai

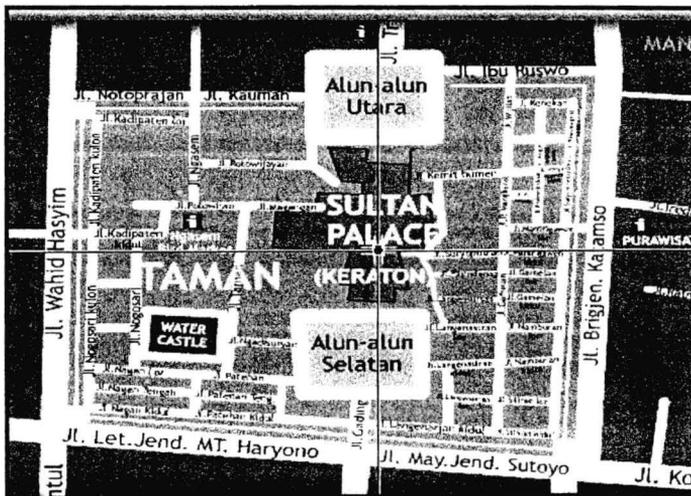
Nilai	Sikap
Adat Bersumber Dari Agama	Rendah (65%)
Malu	Rendah (63,3%)
Tertib Sosial & Keseimbangan	Rendah (70%)
Tenggang Rasa	Rendah (80%)
Adaptif & Tahu Diri	Rendah (68,3%)
Menjaga Harga Diri	Tinggi (51,7%)
Kepemimpinan	Rendah (65%)
Etos Kerja Keras	Tinggi (51,7%)
Sikap Terhadap Kelompok/Suku	Tinggi (61,7%)

5.2. Kluster II (Jawa-Bali)

5.2.1. Yogyakarta Secara Sosio-Kultural

Kondisi Yogyakarta sekarang jauh berubah dari kondisi awalnya terbentuknya kota ini. Yogyakarta menjadi kota yang plural saat sekarang ini. Kondisi ini tidak lepas dari daya tarik kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya. Contoh sederhana dari pluralnya kota Yogyakarta dapat ditunjukkan dari banyaknya kendaraan khususnya sepeda motor yang berplat nomor beragam dari A, AB, B, BE, K, KH, R, S, P sampai Z.

Gambar 5.2 Peta Kota Yogyakarta



Alat transportasi yang paling banyak dan digemari oleh masyarakat Yogyakarta baik penduduk setempat ataupun pendatang adalah sepeda motor. Hal ini dikarenakan sarana transportasi kendaraan umum dari segi jumlah terbatas dan tidak efisien untuk sarana

transportasi kota Yogyakarta. Oleh karena itu tidak heran jika lalu lintas jalan padat lebih dominan karena banyaknya sepeda motor. Tentu saja tidak sulit untuk menemukan kendaraan dengan berplat nomer kendaraan yang beragam beragam di Yogyakarta. Selain sepeda motor sebagai alat transportasi, kendaraan umum menjadi alternatif lainnya yaitu bus kota, andong, dan becak. Namun, karena didasarkan keterbatasan angkutan umum tersebut seperti jumlah yang terbatas dll, akhirnya hal ini yang mendasari sepeda motor menjadi dominan sebagai transportasi.

Beragamnya masyarakat kota Yogyakarta yaitu dengan masuknya para pendatang baik dari sekitar Yogyakarta atau pun luar daerah, datang dengan berbagai tujuan salah satunya adalah pendidikan. Berdirinya UGM sebagai perguruan tinggi pertama tidak dipungkiri menjadi daya tarik bagi para pendatang. Made (45) pendatang asal Bali mengutarakan hal yang demikian yaitu datang ke Yogyakarta dengan alasan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, bahkan sekarang ia sudah menjadi dosen di UGM. Dapat diasumsikan bahwa sebagai besar para pendatang datang ke kota Yogyakarta dengan tujuan pendidikan dan akhirnya tidak sedikit kemudian menetap di Yogyakarta mengembangkan usaha atau kerja. Seperti yang halnya Fajar (29) pendatang asal Flores setelah menyelesaikan masa studi di salah satu perguruan tinggi swasta, ia kemudian membuka usaha jualan dan akhirnya memperistri penduduk setempat.

Gambaran beragamnya mahasiswa yang ada di Yogyakarta dapat dilihat dari ikatan-ikatan mahasiswa daerah asalnya di kota Yogyakarta, dimana memiliki asramanya masing-masing menyebar di sekitar kota Yogyakarta. Ada pun ikatan mahasiswa yang ada, sekitar 31 asrama antara lainnya yaitu: asrama putri Cut Nyak Dien (Aceh), wisma bukit barisan (sumut), asrama sultan taha saefudin (jambi), asrama putra (papua), dll.

Dalam penelitian ini, suku bangsa yang menjadi fokus adalah suku bangsa Jawa, Madura, dan Bali. Hal ini didasarkan sebagai pada ketiga suku bangsa itu masuk dalam pengelompokan wilayah kluster II. Selain itu, suku bangsa Jawa adalah sebagai suku bangsa yang secara budaya dominan di kota Yogyakarta, suku bangsa Madura dalam lapisan sosial mempunyai posisi yang signifikan di bidang ekonomi, dan suku bangsa Bali dari jumlahnya relatif cukup banyak mendiami kota Yogyakarta.

5.2.2. Suku Bangsa Jawa, Madura, dan Bali

a. Jawa

Tradisi yang dikembangkan suku bangsa Jawa mengajarkan berbagai nilai-nilai karakter dan pekerti yang kaya. Melalui sarana kesenian (wayang, tari, gamelan, tembang),

nilai-nilai tersebut diteruskan dari generasi ke generasi. Lewat wawancara dengan tokoh-tokoh kebudayaan Jawa diperoleh temuan bahwa ada seperangkat nilai-nilai yang melekat dengan budaya Jawa, antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai keksatriaian (*satrio*):
 - i. *Nyeniji* (mampu bekerjasama/berserikat dengan semua pihak)
 - ii. *Greget* (semangat / gairah)
 - iii. *Senggob* (memiliki jatidiri yang kuat)
 - iv. *Ora mingkob* (bertanggung-jawab atas apa yang dikomitmenkan)
- b. Nilai *pribatin* (menahan diri/ jangan berlebih-lebihan)
- c. Nilai *rukun*
- d. Nilai *pekewuh* (sungkan/ malu)
- e. Tidak "*gumunan*" (terpesona materi/dunia)
- f. Nilai "*nrimo*" (berusaha keras, namun jika tidak berhasil maka ia menerima takdirnya)
- g. Nilai *unggah-ungguh* (adab sopan-santun)
- h. Nilai *tepo-sliro* (mengukur diri orang lain melalui penilaian diri sendiri dalam arti positif).
- i. "*Ojo rumongso biso*" bermakna perbuatan yang dilakukan jangan membuat orang lain cedera. Sebagai misal, menolong orang lain boleh, tapi jangan sampai anak – istri sendiri tidak makan.
- j. "*Giak-giak watok kelaton, alon-alon waton kelakon*" (giat-giat mencapai tujuan, tapi kalau tidak bisa ya pelan-pelan).
- k. Kondisi khusus kadang-kadang bisa mengubah karakter. Kejadian bencana gempa tempo hari, sebagai contoh, menyebabkan watak mental orang Yogya berubah. "Marah karena merasa menjadi tontonan".

Pelestarian nilai karakter dan pekerti suku bangsa Jawa dilakukan terutama lewat keluarga. Akan tetapi saat ini terdapat tantangan yang cukup berat, dimana kaum muda semakin sulit untuk diajarkan dengan nilai-nilai tersebut, mengingat pergaulan hidup mereka yang semakin luas dan cenderung kepada gaya modern. Menurut salah satu informan, orang tua sekarang perlu "*ceriwis*" memperkenalkan nilai-nilai budaya Jawa karena anak sekarang sulit, mereka tidak tahu tapi jarang bertanya.

b. Madura

Sukubangsa Madura mendiami pulau "garam" Madura yang terletak di bagian ujung Timur pulau Jawa. Mereka dikenal memiliki nilai-nilai karakter dan pekerti yang khas, dan dengan mudah dapat dibedakan di antara suku-suku bangsa lain di Jawa. Madura memiliki kegigihan dalam bekerja, terutama mereka membangun usaha lewat sektor informal. Watak khas Madura ditandai dengan perilaku yang tegas mempertahankan pendirian dan harga diri, kadang-kadang menjurus kepada sikap keras dan seakan-akan mau menang sendiri. Penjelasan dari tokoh-tokoh Madura yang ditemui di Yogyakarta memberikan temuan-temuan sebagai berikut:

- a. Bagi orang Madura, masalah harga diri sering terjadi penyelesaian lewat kekerasan (*carok*), namun hal ini berkurang dengan makin tinggi pendidikannya. *Carok* adalah istilah semata dalam bahasa Madura, yaitu berkelahi dengan senjata tajam. Jadi tidak khusus untuk orang Madura, orang (suku bangsa) yang lain pun kalau berkelahi dengan senjata tajam bisa disebut *carok*. Mengenai Harga diri: sebenarnya suku bangsa yang lain pun sama, tapi ada yang menahan marah ada yang tanpa pikir panjang. Bagi suku bangsa Madura, harga diri ini adalah kalau menyangkut:
 - *Masalah wanita / istri*: peribahasanya, kalau istri dilirik orang lain, yang mati kamu atau saya.
 - *Masalah tanah*.
- b. Mengenai pendidikan, pelajaran agama dianggap lebih penting daripada sekolah umum. Pemuda-pemuda Madura mendapatkannya melalui tradisi mondok.
- c. Ikatan pengelompokan sosial Madura sangat kuat (biasanya membentuk jaringan sosial tersendiri); akibatnya kadang-kadang terkesan kurang dapat bersatu dengan suku-suku lain (eksklusif).
- d. Perkumpulan-perkumpulan sosial Madura biasanya berfungsi menyelesaikan konflik, membantu usaha ekonomi, dan lain-lain hajat kebutuhan hidup.
- e. Ciri-ciri khusus watak Madura: (a) Penghormatan kepada orang tua, guru / kyai; (b) Sangat takut pada pemerintahan / birokrasi; (c) Masalah agama, meskipun tidak terlalu taat ibadah tapi kalau membela tidak takut mati, karena ingin masuk surga.
- f. Suku bangsa Madura yang masih asli sebenarnya sangat terbuka dan ramah. Misal ada orang kemalaman, pasti masih diterima meskipun tidak kenal dan tidak bisa bahasa Madura.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

- g. Hubungan kekerabatan kuat (lebaran harus pulang, ketemu keluarga) walaupun menghabiskan biaya.
- h. Ketika menikah, biaya ditanggung pihak wanita. Setelah menikah tempat tinggal disediakan oleh pihak wanita sebelum memiliki rumah sendiri.
- i. Secara umum, budaya dasar Madura sama dengan Jawa. Termasuk bahasa dan tingkatan. Contohnya bahasa Madura Sumenep itu halus (seperti Solonya Jawa).

c. Bali

Sukubangsa Bali mendapat ciri khas dari adat-istiadat mereka yang lekat dengan upacara keagamaan (Hindu). Kehidupan orang Bali lekat dengan pura dan kegiatan komunal yang disebut banjar. Termasuk ketika mereka merantau ke luar pulau Bali, tradisi tersebut berusaha tetap dipertahankan. Temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh-tokoh Bali di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Kasta mulai ditinggalkan, saat ini sifatnya lebih mirip “trah” atau diidentikkan dengan jenis pekerjaan.
- b. Acuan dasar budaya Bali adalah Nilai TRIHITA KARANA, yang berintikan keseimbangan antara Manusia-Tuhan-Alam.
- c. Penerapan konsep rumah 3 bagian (suci, profan dan kurang profan) sulit dilakukan di kota besar, karena membutuhkan tanah yang luas.
- d. Selain melalui aktivitas sembayang dan upacara keagamaan, pewarisan nilai-nilai dilakukan lewat wayang, tari, gamelan dan cerita rakyat / folklor (misalnya cerita “Pan Balangtamak”).

5.2.3. Konfigurasi Nilai-Nilai Suku Bangsa Kluster II

Konfigurasi nilai-nilai karakter dan pekerti pada kluster Jawa-Bali tersusun dalam pola lebih menyebar dan lebih kompleks. Prinsip kepemimpinan, sebagai contoh, pada suku bangsa Jawa menekankan watak ksatria, sementara Bali menyesuaikan dengan sistem kasta, dan Madura menekankan peran pemimpin sebagai pembela para anggotanya yang lebih lemah. Demikian pula untuk nilai-nilai karakter dan pekerti yang lain, menunjukkan

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

persebaran antara satu suku bangsa dan lainnya serta dirumuskan secara lebih kompleks pula, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Konfigurasi Nilai Kluster IF Jawa-Bali

POLA NILAI BUDAYA	JAWA	BALI	MADURA	ORIENTASI NILAI BUDAYA
PRINSIP KEPEMIMPINAN	Watak Satrio Kepemimpinan harus tegas, berkarakter dan bertanggung jawab	Sesuai dengan kasta, kasta ksatria memimpin sesuai dengan hukum karmapala. Bahwa ksatria harus memimpin.	<i>Pemimpin harus membela anggota kelompok</i> (contoh, Tokoh Sakerah)	MM, MH, MA
SIKAP TERHADAP ORANG LAIN	<i>Wedi, isin, pekewuh</i> Takut salah, malu, sungkan dalam menghargai orang lain <i>Tepo seliro</i> Mengerti diri dan orang lain <i>Unggah-ungguh</i> Pekerti tata krama tutur kata yang baik dan rendah diri dengan	Hukum karmapala: perbuatan jahat kepada orang lain menimbulkan balasan setimpal pada pelakunya Kasta tidak lagi menjadi batasan kaku dalam pergaulan sosial tatakrama ditentukan berdasarkan status sosial/ kasta	Mempertahankan harga diri: <i>lebih bagus poteh tulang timbang poteh mata</i> Tidak mau mengalah karena tidak ingin harga dirinya direndahkan; sifat keras dan terkesan temperamental	MM
SIKAP HIDUP TERHADAP MATERI	Tidak " <i>gumunan</i> " Menghargai benda/materi agar jangan serakah	Untuk menikmati kehidupan materi, jangan menghabiskan harta warisan keluarga, melainkan harus mencari sendiri	Tidak mengejar materi: <i>Wong urip iku numpang lewat ae</i>	MH
ETOS KERJA	<i>Nrimo</i> : pasrah ketika sudah bekerja	<i>Siyak siyu</i> , mudah putus asa ketika dihadapkan pada masalah	Bekerja keras untuk hidup	MH, dorongan hidup
PRINSIP HIDUP	<i>Ojo rumungso biso, nanging biso rumongso</i> Mawas diri, bahwasanya manusia sangat terbatas kemampuannya <i>Ngono yo ngono nanging ojo ngono</i> Manusia itu terbatas tindakannya <i>Ojo dumeh lembah manah andep asor</i> Rendah diri untuk mendudukkan keterbukaan	<i>eda ngaden awak bisa, depang anake ngadanan</i> (jangan merasa mampu, biarkan org lain yang menilai) Terus terang dan merendah (<i>mebaledan</i>)	Menjaga harga diri, tanggung jawab dan kewajiban agama Berusaha menduduki posisi dan status yang diakui oleh masyarakat Kehidupan akhirat yang paling utama, mendapat berkat Tuhan dengan harapan kebahagiaan di akhirat.	MH

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

	<i>Alon alon waton kelakon</i> Hati-hati dalam melakukan pekerjaan yang ada <i>Ojo suthik kedanan</i> Berilah orang lain beramal jangan serakah dalam memberi			
POLA KEBERSAMAAN	<i>Mangan ora mangan asal kumpul</i> Setia kawan diutamakan walaupun tidak berguna	Sistem sosial <i>Subak, banjar, seka</i>	Jaringan sosial sebagai sarana utk mempererat silaturahmi orang Madura	MM, hidup kolektif
PRINSIP KESELARASAN	<i>Hamemayu hayuning bawono: membuat dunia menjadi cantik dan agar lestari</i> Keselarasan hidup yang sesuai dengan hubungan manusia dengan ruhan, alam dan manusia	<i>Tribita Karuna</i> Keselarasan manusia-Tuhan; manusia-manusia dan manusia-alam		MH, MM, MA
SOSIALISASI	<i>Maca pat ceritera sebelum tidur</i> ceritera tentang kesopanan, cita-cita luhur	<i>Pan Balangtamak</i> cerita tentang orang kecil mengalahkan penguasa	Cerita rakyat <i>Sakerah</i> : tokoh 'preman' atau gali namun banyak membantu orang Madura menyelesaikan masalahnya.	MM, MH
HARGA DIRI	<i>Dadi yo banyu emoh nyawuk, dadio godhong emoh nyuwek, ilang-ilangan endok siji</i> , sikap orang Jawa apabila marah besar, tidak ada toleransi		<i>Carok: lebih baik poteh tulang limbang poteh mata</i> ; harga diri adalah lambang dari tanggung-jawab	MM, ketika konflik tidak teratasi
MERANTAU DEMI MEMPERBAIKI EKONOMI		Menjaga warisan ("sawah secuwil yang tidak boleh diutak-utik")	Merantau dalam konteks bekerja dan mencari untung, karena tanah Madura tidak subur	MK, dorongan mencari penghidupan lebih baik
AGAMA DAN ADAT	Budaya lebih melekat pada keseharian daripada agama (agama sudah sering dimanfaatkan utk kepentingan tertentu)	Agama dan Adat di Bali sudah menjadi satu	Akhirat lebih penting dari dunia; pendidikan agama lebih penting daripada sekolah umum	MH

5.2.4. Nilai-Nilai Suku Bangsa dalam Verifikasi

Data kluster Jawa-Bali memberikan verifikasi terhadap semua nilai (T) kecuali nilai Adaptif dan Tahu Diri yang bernilai seimbang (S) dan Kepemimpinan yang bernilai rendah (R).

Tabel 5.10 Data Tingkat Kognitif, Afektif, dan Konatif terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti

Nilai	Kognitif	Afektif	Konatif
Adat Bersumber Dari Agama	T(63,3%)	T (90%)	T(83,3%)
Malu	T (96,7%)	T (83,3%)	T (76,7%)
Tertib Sosial & Keseimbangan	R (98,3%)	R (60%)	T (70%)
Tenggang Rasa	R (100%)	T (56,7%)	T (53,3%)
Adaptif & Tahu Diri	S (50%)	T (61,7%)	R (68,3%)
Menjaga Harga Diri	T (78,3%)	T (68,7%)	T (96,7%)
Kepemimpinan	T (81,7%)	T (88,3%)	R (76,7%)
Etos Kerja Keras	T (53,3%)	T (86,7%)	T (96,7%)
Sikap Terhadap Kelompok/Suku	T (71,7%)	T (88,3%)	T (91,7%)

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap orang pada kluster II terhadap 9 nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11 Tingkat Sikap Seseorang Terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti

Nilai	Sikap
Adat Bersumber Dari Agama	Tinggi (60%)
Malu	Tinggi (65%)
Tertib Sosial & Keseimbangan	Tinggi (61,7%)
Tenggang Rasa	Tinggi (51,7%)
Adaptif & Tahu Diri	Seimbang (50%)
Menjaga Harga Diri	Tinggi (55%)
Kepemimpinan	Rendah (55%)
Etos Kerja Keras	Tinggi (55%)
Sikap Terhadap Kelompok/Suku	Tinggi (55%)

Kalau kita amati dari banyaknya bahasa daerah yang dipakai orang-orang yang kita temui di tempat-tempat umum maka kita akan menduga sedang berada di daerah Jawa, karena banyak bahasa Jawa dipakai antar mereka yang beretnis Jawa. Hal itu memang bukan hal yang aneh karena etnis terbanyak yang ada di kota Balikpapan adalah etnis Jawa dan etnis Bugis. Menurut data BPS pada sensus terakhir tahun 2000 jumlah etnis Jawa sebanyak 162.317 jiwa dan etnis Bugis setengahnya yaitu 83.613 jiwa dari total penduduk 400.000 jiwa. Dari data tahun 2000 tersebut kurang lebih jumlah etnis Jawa di Balikpapan sebanyak 40% dan etnis Bugis 20% dari total penduduk dan sisanya dibagi rata untuk etnis lainnya seperti Madura, Toraja, Ambon, Banjar, Dayak, dll. Bahkan saat ini menurut perkiraan Bapak Agusminsyah jumlah penduduk Jawa sudah mencapai 60% dan etnis Bugis sekitar 35%. Menurutny perkembangan ini sangat mengejutkan dan sangat berbeda dan terbalik dengan beberapa belas tahun lalu dimana suku mayoritas terdahulu adalah etnis Bugis yang diikuti etnis Jawa.

Etnis Jawa, terdiri dari etnis Jawa dari berbagai daerah seperti daerah Blitar, Malang, Ponorogo, Pacitan, Yogya, Semarang dan lainnya. Etnis-etnis di Balikpapan diwadahi dalam paguyuban atau kerukunan besar berdasarkan suku bangsa and wadah lebih kecil berdasarkan sub etnis atau daerah masing-masing. Secara umum etnis Jawa yang berasal dari daerah-daerah ini diwadahi oleh Forum Komunikasi Keluarga Jawa Timur (FKKJT). Begitupula etnis-etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan di bawah wadah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), dimana terdiri dari etnis Bugis, Buton, Mandar dan lainnya. Meskipun demikian etnis-etnis yang berada di dua wadah tersebut memiliki wadah-wadah sendiri lebih kecil berdasarkan sub etnis dan daerah asal mereka masing-masing seperti Paguyuban Ponorogo, Paguyuban Blitar atau Ikatan Keluarga Toraja (IKAT), Kerukunan Keluarga Besar Makasar (KKBM) dll.

5.3.2. Suku Bangsa Dayak, Banjar, dan Kutai

a. Dayak

- a. *Keragaman* adat Dayak sangat luas, karena sukubangsa Dayak memiliki keragaman yang sangat tinggi (ada yang mengatakan lebih tepat digolongkan sebagai 'bangsa', bukan suku bangsa). Data Majelis Adat Dayak menyebutkan ada 6 (**enam**) kelompok suku besar dengan 514 sub-suku Dayak yang berlainan satu sama lain.
- b. Adat Dayak *tidak tepat* dikatakan bersumber dari agama, karena pada sukubangsa Dayak adat mendahului datangnya agama dengan adanya Agama Kepercayaan Kaharingan.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

- c. Mengenai *simbol-simbol* yang digunakan adat Dayak, ada simbol 'Burung Enggang' pada Dayak Kenyah, namun tidak mewakili seluruh suku Dayak yang lain, karena tiap-tiap suku (bahkan sub-suku) mengambil binatang atau tumbuhan khusus yang berbeda-beda sebagai simbolnya (ada yang mengambil simbol buaya, misalnya). Simbol perdamaian adat Dayak adalah DARAH, sementara mandau adalah simbol kejantanan / pertahanan, tutup guci adalah simbol komunikasi, lukisan kalung berbeda-beda maknanya. Satu lagi simbol yang tidak disebutkan adalah MATAHARI, yang dipandang sebagai asal – usul yang melahirkan suku bangsa Dayak.
- d. Simbolisasi LUKISAN TRADISI DAYAK (disebut *Kalung*) terdiri dari: Manusia, Guci, Pohon Menjalar, Warna-warna (Merah, Kuning, Putih, Hitam, Hijau)
- e. Nilai keadilan tersirat dalam pepatah *adil batalina, basurau basurunga* yang pada intinya adalah menghormati hak-hak orang lain.
- f. Dayak memiliki ciri komunalistik: yaitu adanya HEPUNG (lahan tanaman milik sosial/ milik bersama)
- g. Tradisi Penghormatan kepada tamu pada suku Dayak ditandai dengan: upacara penyambutan tamu..

b. Banjar

Sukubangsa Banjar tersebar di Kalimantan, sebagian kecil tinggal di kota-kota besar di Jawa sebagai pedagang emas dan intan. Nilai-nilai tradisi Banjar menyatu dengan agama (Islam), terutama menekankan kepada pembentukan akhlak dan pekerti yang baik. Wawancara dengan tokoh-tokoh Banjar berisi temuan sebagai berikut:

- a. Banjar dari istilah '*Kayuh Baimbai*' (mendayung bersama-sama) sebagai ungkapan bahwa sukubangsa Banjar cenderung untuk mengutamakan bekerjasama sesama manusia.
- b. Suku bangsa Banjar tidak berwatak tertutup (introvert), namun lebih tepat disebut 'membatasi diri' atau 'menahan diri', agar tidak jatuh kepada kesombongan.
- c. Kepemimpinan pada Banjar dipilih berdasarkan:
 - Urutan Senioritas.
 - Bagaimana ibadahnya (agamis).
 - Konsistensi kata dan perbuatan.

- d. Etos kerja suku bangsa Banjar sesungguhnya adalah tidak mudah putus asa, apabila sudah bekerja keras tapi tidak berhasil maka harus dapat menerima apa pun hasilnya.
- e. Ada 9 Prinsip tradisional Banjar (yang diambil dari Islam): syukur, tawadhu, berprasangka baik, amanah, silaturahmi, tawakal, ikhlas, dan takwa. Kesembilan prinsip ini mencerminkan hubungan manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

c. Kutai

Sukubangsa Kutai terbentuk melalui tradisi kerajaan / kesultanan yang menjadi pusat orientasi kebudayaan mereka. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka sudah mengenal hirarki atau struktur sosial yang biasanya ditandai dengan bahasa. Hal ini terutama pengaruh dari kerajaan Majapahit terhadap Kutai di masa lalu. Temuan mengenai suku bangsa Kutai yang ditemui di Balikpapan adalah:

- a. Kebudayaan Kutai terbentuk dari dua ciri dominan: ciri kerajaan (kesultanan) dan ciri religius.
- b. Kedekatan dengan alam: semboyan *Tuah Limbah Tuntung Langgong* (Berkat Hutan Kita Makmur).
- c. Nilai Kepatuhan dan Penghormatan ditafsirkan orang Kutai ada tiga bentuk: kepatuhan terhadap orangtua, kepatuhan terhadap adat istiadat dan agama, serta kepatuhan kepada Raja atau taat kepada pemerintahan.
- d. Etos kerja “tiada hari tanpa kerja”, merupakan adaptasi Kutai terhadap tradisi matapencarian berladang di sepanjang aliran sungai yang menuntut mereka berpacu dengan musim.

5.3.3. Konfigurasi Nilai-Nilai Suku Bangsa Kluster III

Nilai-nilai karakter dan pekerti pada kluster Kalimantan lebih sederhana, dimana antara suku bangsa Dayak, Banjar dan Kutai tidak merumuskan nilai-nilai yang ada secara rumit/kompleks melainkan melalui simbol-simbol yang sederhana (misalnya, burung, pohon, dan lain-lain). Akan tetapi, isi kandungan nilai-nilai yang ada di dalamnya sesungguhnya tidak

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

bergeser jauh dari kluster-kluster lain, dimana etika kebersamaan dan hubungan harmonis dengan sesama merupakan suatu ciri yang umum dipertahankan.

Tabel 12. Konfigurasi Nilai Kluster III Kalimantan

POLA NILAI BUDAYA	DAYAK	BANJAR	KUTAI	ORIENTASI NILAI BUDAYA
PRINSIP HIDUP	Bekerja selaras kemampuan alam <i>Jujur</i> Dapat menerima aturan manapun dan melaksanakannya <i>Jujur</i> berterusterang sesuai dengan yang dikatakan dan ditindaki	Sesuai ajaran agama	Hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan	MM, komitmen
KEPEMIMPINAN	Pemimpin harus mengayomi, jiwa besar dan rendah hati, rela berkorban demi bawahannya seperti burung enggang	-	Pemimpin adalah seseorang yang lebih bijaksana dari bawahannya, memiliki pengalaman luas	MM, paternalistik
SIKAP TERHADAP ORANG LAIN	Berbagi milik apabila tetangga tidak mempunyai, tenggang rasa dan menghormati terhadap tetangga, Tidak ingin menyakiti orang lain, selalu menghindari masalah kecuali melanggar kejujuran	<i>Kayu baya</i> , dapat bersaudara dengan siapapun dan terbuka, berprasangka baik terhadap orang lain, mendendam dan disimpan dalam hati apabila tidak berkenan dengan tindakan orang lain yang mengkhianati sehingga tertutup terhadap orang lain (yang mengkhianati) sehingga cenderung introvert	Menghormati dengan tutur kata yang baik disimbolkan dengan tingkatan bahasa terhadap orang lain	MM, sikap terhadap orang lain
ETOS KERJA	Kepemilikan dan hasrat tidak melebihi kebutuhan	Mudah putus asa apabila tidak berhasil dalam usaha	Rajin bekerja dan siap memecahkan masalah apabila menimpanya	MK, dorongan hidup

5.3.4. Nilai-Nilai Suku Bangsa dalam Verifikasi

Kluster kalimantan memberikan jawaban verifikasi rendah terhadap sebagian besar nilai (R) kecuali untuk tiga nilai, yaitu masing-masing nilai Malu, Menjaha Harga Diri dan Etos Kerja Keras.

Tabel 5.13 Data Tingkat Kognitif, Afektif, dan Konatif terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti

Nilai	Kognitif	Afektif	Konatif
Adat Bersumber Dari Agama	R (80%)	T (85%)	T (80%)
Malu	T (88,3%)	T (56,7%)	T (76,7%)
Tertib Sosial & Keseimbangan	R (100%)	R (60%)	S (50%)
Tenggang Rasa	R (100%)	T (51,7%)	S (50%)
Adaptif & Tahu Diri	R (70%)	T (73,3%)	R (68,3%)
Menjaga Harga Diri	T (65%)	T (70%)	T (95%)
Kepemimpinan	R(48,3%)	T (90%)	R (80%)
Etos Kerja Keras	T (53,3%)	T (86,7%)	T (96,7%)
Sikap Terhadap Kelompok/Suku	R (51,7%)	T (81,7%)	T (85%)

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap orang pada kluster III terhadap 9 nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14 Tingkat Sikap Seseorang Terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti

Nilai	Sikap
Adat Bersumber Dari Agama	Rendah (73,3%)
Malu	Tinggi (75%)
Tertib Sosial & Keseimbangan	Rendah (58,3%)
Tenggang Rasa	Rendah (51,7%)
Adaptif & Tahu Diri	Rendah (60%)
Menjaga Harga Diri	Tinggi (75%)
Kepemimpinan	Rendah (66,7%)
Etos Kerja Keras	Tinggi (53,3%)
Sikap Terhadap Kelompok / Suku	Rendah (63,3%)

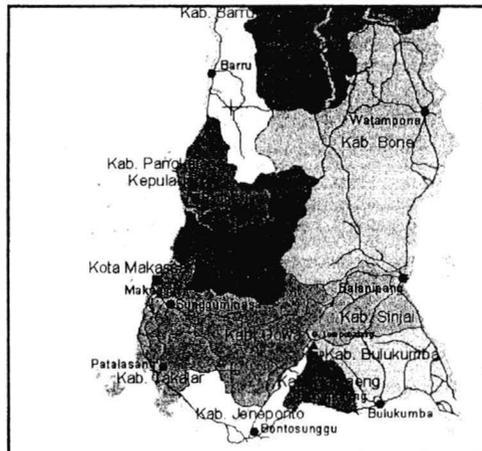
5.4. Kluster IV (Sulawesi)

5.4.1. Makassar Secara Sosio-Kultural

Kota Makassar dikenal sebagai salah satu kota perdagangan terbesar di Indonesia. Kota yang penduduknya didominasi oleh etnis Bugis-Makassar memiliki jiwa pedagang cukup tinggi, apalagi didukung dengan pola konsumsi masyarakat kota Makassar. Hampir disepanjang jalan-jalan kota Makassar berjejer ruko-ruko tempat untuk berdagang. Beberapa tempat seperti Tanjung, Daya, dan di jalan A.Pettarani ditemukan kawasan perdagangan yang sedang dibangun ataupun yang sudah terbangun namun belum banyak diisi.

Kota Makassar mempunyai kedudukan strategis sebagai pusat pelayanan dan pengembangan di Propinsi Sulawesi Selatan bahkan sebagai pusat pelayanan bagi Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kebesaran Makassar pada masa lalu yang tidak hanya dikenal sebagai kota besar di nusantara, tetapi juga sebagai salah satu kota besar dunia karena keterbukaan akses Makassar terhadap perdagangan internasional.

Gambar 5.4 Peta Administrasi Profinsi Sulawesi Selatan



5.4.2. Suku Bangsa Bugis, Makassar, dan Toraja

a. Makassar

Sukubangsa Makassar merupakan penduduk asli kota Makassar. Dibandingkan suku bangsa lain di Sulawesi, orang Makassar lebih kuat menonjolkan pentingnya harga diri, dimana dikatakan, “*segala hal boleh pergi atau hilang dari kita asalkan harga diri tetap dipertahankan*”. Harga diri/Malu sebagai pusat nilai orang Makassar diterapkan dalam berbagai konteks:

- a. *Siri Na Pacce*: harga diri yang bila dilukai mengakibatkan sakit hati/dendam.
- b. *Sipakalabbiri*: saling menghargai dalam pergaulan sehari-hari.
- c. *Sipakalampo*: suka memberi bantuan moril & materil.
- d. *Pannadakkann*: bertuturkata yang baik, khususnya kepada yg lebih tua.
- e. *Pangali*: segan dan rasa takut kepada Tuhan.

Nilai-nilai *siri* sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan, namun belum banyak diarahkan untuk tujuan-tujuan lebih positif, misalnya *siri* bila malas belajar, *siri* bila melakukan korupsi, dan lain-lain. Salah satu medium pewarisan nilai-nilai karakter dan pekerti orang Makassar adalah *dondo*, yaitu se bentuk nyanyian yang mengandung pesan-pesan moral dinyanyikan kepada anak-anak menjelang tidur.

b. Bugis

Selain *siri*, sebagaimana dianut suku bangsa Makassar, orang Bugis mengedepankan prinsip egalitarian atau kesederajatan di antara sesama manusia (“*Sinna Tau Ripancajie Pada Maneng Mud*”, diterjemahkan yaitu “Semua Manusia Yang Diciptakan Sama”). Prinsip ini menuntun kepada sikap dan perilaku sebagai berikut:

- a. *Sipakalebbi*’. Berarti bahwa pentingnya saling menghormati sesama manusia.
- b. *Sipakainge*’. Berarti bahwa pentingnya saling mengingatkan pada jalan yang mulia.
- c. *Sipakatau*. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Khusus dalam hubungan sosial sehari-hari dengan sesama, pedoman nilai yang digunakan adalah menjaga tiga hal:

Strategi Pembangunan Karakter dan Peking Bangsa

- a. *Sipakasiri*: rasa malu/menjaga martabat kehormatan diri.
- b. *Sipakalebbi*: menghormati terhadap sesama manusia, menghargai perbedaan.
- c. *Sipakaraja*: sikap memposisikan orang pada posisi terhormat/bermartabat, misalnya pembiasaan lawan bicara dengan penyebutan *Puang'* atau *Petta'* (gelar Kebangsawanan)

Sebagaimana Makassar, Bugis mewariskan nilai-nilai melalui cerita-cerita rakyat yang mengandung ajaran nilai tertentu (*pao pao rikadong, Sambalo, Bombo'illa, I Lagalolo*, dan lain-lain), serta nyanyian pengantar tidur yang disebut *Yabelaké*.

- Ada nilai-nilai positif yang belum dibahas dari suku bangsa Bugis. Contohnya bagaimana kekuasaan dibagi tanpa kekerasan. Di kerajaan Wajo diterapkan sistem federasi. Kedaulatan raja bisa dikoreksi. Ketika raja sudah tidak dianggap berpengaruh: rumah-rumah dibalik tidak menghadap ke rumah raja.
- Di Bugis ada berbagai perdebatan tentang kebudayaan di masa lalu dan sekarang terutama dengan adanya globalisasi.
- Ada krisis internal terhadap pengaruh globalisasi seperti gaya hidup materialistis.
- Ada tingkatan-tingkatan sosial dengan gelar kebangsawanan: *Karaeng, Andi*, dan lain sebagainya.
- Motivasi untuk maju pada suku bangsa Bugis, ada usaha-usaha untuk meningkatkan status sosial. Bila melalui pendidikan masih kurang berhasil, maka ada usaha untuk menjual tanah untuk naik haji. Ada cerita anekdot, untuk meraih status sosial, pemilik kebun yang uangnya berlimpah membeli kulkas tapi ternyata bukan untuk lemari es, hanya untuk menyimpan baju karena tidak tahu fungsinya.
- Etos kerja untuk berusaha keras. Seorang laki – laki ketika telah menikah maka harus mati-matian bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya dan ini adalah *siri* tertinggi.
- Ada prinsip-prinsip yang mulai mengalami erosi. Dulu kalau ada wanita hamil di luar nikah, (seharusnya) dia harus dibunuh untuk menghilangkan malu (*siri*) keluarganya. Tapi sekarang sudah mulai dibiarkan dan ditoleransi.

b. Toraja

Orang Toraja dikenal dari tradisi budaya yang unik, misalnya upacara kematian yang sangat meriah dan diselenggarakan secara besar-besaran, penguburan mayat di goa-goa batu, serta tradisi lainnya.

- a. Nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan (*Misa kada di Potno, Pantan Kada di Pomate*: satu kata kita hidup bersama, perbedaan akan menghancurkan kita = bersatu kita teguh bercerai kita runtuh).
- b. Cerita Si Kaya dan si Miskin mengandung nilai kesetiakawanan sosial.
- c. Nilai kekeluargaan: bahwa beban untuk mengurus rumah tidak hanya dipikul oleh bapak dan ibu, tapi anak juga berperan mengurus rumah.
- d. Upacara kematian disebut *Rambu Solok* (matahari terbenam) karena harus dimulai pada saat matahari terbenam.
- e. Kebalikannya adalah *Rambu Tuka*: pengungkapan syukur seperti pendirian rumah, dsb, yang dilakukan saat matahari terbit.
- f. Tatanan atau struktur sosial di Toraja ada 4
 - Tanak Bulaan (emas) – Kalangan Bangsawan.
 - Tanak Bassi – Kalangan Orang kedua Bangsawan.
 - Tanak Karurung – Kalangan Orang Merdeka.
 - Tanak Kuakua – Kalangan Budak.
- g. Kalau ada yang menikah lintas strata ini akan dihukum dikubur dengan ditumbun dengan tanah tanpa digali lubang.
- h. Mengenai sabung ayam, setiap bangsawan meninggal dan akan dikubur harus diadakan sabung ayam (tapi tanpa taruhan), harus ada darah yang tumpah sebagai lambang mengantarkan arwah ke alam yang baru.
- i. Rumah Tongkongon adalah simbol kebersamaan orang Toraja. Namun, rumah tongkongon bukan simbol kebersamaan sosial secara luas (terhadap orang di luar sukubangsa Toraja/kerabat) tapi hanya kepada internal kerabat-keluarga.
- j. Rumah *Tongkongon* biasanya paling besar dan merupakan tempat pesta keluarga – pesta (perayaan) kematian.
- k. Sikap Suku bangsa Toraja terhadap orang lain adalah ramah, terbuka, tetapi mudah tersinggung jika berkaitan dengan intervensi yang merusak adat-istiadat.
- l. Dalam kaitan agama-adat, di Toraja adat lebih dahulu dari pada agama. Islam lebih dahulu masuk Tana Toraja ketimbang Nasrani, namun agama Nasrani lebih mudah diterima oleh orang toraja karenan seirama dengan adat-istiadat Orang Toraja (Orang Toraja mengenal pemeliharaan babi). Saat ini adat istiadat selalu bersandingan dengan agama, tidak dapat dipisahkan.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

- m. Sarana sosialisasi orang toraja yaitu melalui tempat ibadah, selain acara sabung ayam. Adapun nilai dasar hidup Orang Toraja adalah terbuka (jujur) "lebih baik kalah dari pada menang" bila terkait dengan perbuatan dan hal-hal yang tidak benar.

5.4.3. Konfigurasi Nilai-Nilai Suku Bangsa Kluster IV

Pada kluster Sulawesi berkembang nilai-nilai karakter dan pekerti yang berusaha menyelaraskan hubungan antar sesama manusia, melalui sikap saling menghargai dan menghormati, khususnya melihat sifat dasar manusia untuk ingin dihargai. Ciri ini tampak pada kentalnya konsep harga diri/kehormatan (*siri*) suku bangsa Bugis dan Makassar, namun tersirat pula dalam bentuk yang lebih tidak kentara pada Toraja (dimana harga diri diarahkan kepada tanggung-jawab terhadap keluarga dan kerja keras).

Tabel 5.15: Konfigurasi Nilai Kluster IV Sulawesi

POLEK NILAI BUDAYA	MAKASSAR	BUGIS	TORAJA	ORIENTASI NILAI BUDAYA
SIKAP TERHADAP ORANG LAIN	<p><i>Sipakalabbiri</i> penyesuaian tutur kata terhadap lawan bicara</p> <p><i>Sipakalampo</i>, orang yang sudah berhasil harus menolong kerabatnya tanpa pamrih</p> <p><i>Sipakainga</i>, dahulukan membantu orang lain sebelum terjadi sesuatu terhadap diri</p> <p><i>Pangalakekang</i> tutur kata dan tingkah laku yang baik</p>	<p><i>Sipakatau</i> manusia harus menghargai nilai kemanusiaan</p> <p><i>Sipakaraja</i> apabila ingin dihargai, ditolong maka ia harus menghargai orang dan menolong orang</p> <p><i>Sipakainga'</i> manusia harus saling mengingatkan pada jalan yang mulia</p> <p><i>Sipakalebbi'</i> menghormati manusia tanpa melihat latar belakangnya</p>	<p>Rumah Tongkongan sebagai simbol kebersamaan</p> <p>Keluargaan, seringnya berkumpul maka muncul perasaan segolongan</p> <p>Mitos si miskin dan sikaya. Menceriterakan kecongkakan sikaya dan ketika susah dia diterima oleh si miskin</p> <p>Keluargaan, semua anggota keluarga berhak membantu lainnya atau berjalannya keluarga itu</p> <p>Hidup ada penciptanya dan harus bertaqwa</p>	<p>MM equilibrium, etnosentrisme</p>
KETAATAN KEPADA TUHAN	<p><i>Pangali</i>, takut dan patuh kepada Tuhan</p>	<p>Malu terhadap diri sendiri, malu terhadap orang lain dan malu terhadap pencipta</p>	<p>Hidup ada penciptanya dan harus bertaqwa</p>	<p>MH equilibrium atau harmonisasi</p>
MENJAGA MARTABAT DIRI, KELUARGA	<p><i>Siri'</i> Na Pacce, rasa malu yang bisa berakibat pada sakit hati</p>	<p><i>Siri'</i> Na Pesse, <i>pangalakekang</i>, rasa malu yang berakibat pada sakit hati</p>	<p>Semua anggota keluarga bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga</p>	<p>MM etnosentris</p>
ETOS KERJA	<p>Pasrah dengan keadaan</p>	<p>Berusaha dan kreatif</p>	<p>Berusaha sampai akhir hayat.</p>	<p>MK dorongan hidup</p>
SARANA SOSIALISASI	<p><i>Dondo</i>, nilai kemuliaan adat dan kebenaran nyanyian seorang ibu dalam menidurkan anaknya</p>	<p><i>Yabelale'</i> nilai ketegaran berupa nyanyian dari seorang ibu kepada anaknya yg mau tidur</p>	<p>Sabung ayam, sebagai sarana kebersamaan, musyawarah, mengkritisi, peredam konflik</p>	<p>MM</p>

5.4.4. Nilai-Nilai Suku Bangsa dalam Verifikasi

Responden pada kluster terakhir Sulawesi memberikan jawaban yang relatif berimbang dimana terdapat lima nilai mendapat verifikasi tinggi (**T**) yakni nilai Malu, Adaptif dan Tahu Diri, Menjaga Harga Diri, Etos Kerja Keras, dan Sikap terhadap Kelompok/Suku. Dan empat nilai mendapat verifikasi rendah (**R**), yaitu masing-masing nilai Adat Bersumber dari Agama, Tertib Sosial dan Keseimbangan, Tenggang Rasa dan Kepemimpinan.

Tabel 5.16 Data Tingkat Kognitif, Afektif, dan Konatif terhadap 9 Nilai Dimensi Karakter dan Pekerti

Nilai	Kognitif	Afektif	Konatif
Adat Bersumber Dari Agama	Rendah (51,7%)	Tinggi (85%)	Tinggi (83,3%)
Malu	Tinggi (98,3%)	Tinggi (55%)	Tinggi (96,7%)
Tertib Sosial & Keseimbangan	Rendah (100%)	Rendah (63,3%)	Rendah (51,7%)
Tenggang Rasa	Rendah (96,7%)	Rendah (51,7%)	Rendah (55%)
Adaptif & Tahu Diri	Tinggi (56,7%)	Tinggi (66,7%)	Rendah (53,3%)
Menjaga Harga Diri	Tinggi (63,3%)	Tinggi (60%)	Tinggi (93,3%)
Kepemimpinan	Tinggi (85%)	Tinggi (90%)	Rendah (75%)
Etos Kerja Keras	Tinggi (55%)	Tinggi (70%)	Tinggi (100%)
Sikap Terhadap Kelompok/Suku	Tinggi (60%)	Tinggi (81,7%)	Tinggi (86,7%)

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap orang pada kluster I terhadap 9 nilai adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Tingkat Sikap Seseorang Terhadap 9 Nilai
Dimensi Karakter dan Pekerti**

Nilai	Sikap
Adat Bersumber Dari Agama	Rendah (56,7%)
Malu	Tinggi (61,7%)
Tertib Sosial & Keseimbangan	Rendah (53,3%)
Tenggang Rasa	Rendah (56,7%)
Adaptif & Tahu Diri	Tinggi (63,3%)
Menjaga Harga Diri	Tinggi (63,3%)
Kepemimpinan	Rendah (53,3%)
Etos Kerja Keras	Tinggi (51,7%)
Sikap Terhadap Kelompok/Suku	Tinggi (55%)

BAB VI

MODEL GENERIK

Manfaat dari Model Generik Nilai-Nilai Karakter dan Pekerti Bangsa adalah sebagai landasan mengembangkan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa, secara strategis untuk memberikan keterukuran (*measurability*) dan indikator-indikator yang diperlukan dalam mekanisme implementasi program.

6.1. Model Generik

Dasar dari Model Generik adalah nilai-nilai pada model yang telah dikembangkan dalam kegiatan studi ini, yaitu adanya 9 (sembilan) nilai-nilai karakter dan pekerti yang diikhtisarkan dari temuan lapangan di 4 kluster.

1. **Sumber Nilai** : Nilai Adat Bersumber dari Nilai Agama
2. **Nilai Dasar Hidup** : Malu

3. **Tertib Sosial** : Keseimbangan
4. **Hubungan dengan Orang Lain** : Tenggang Rasa
5. **Hubungan dengan Sistem Sosial** : Adaptif dan Tahu diri
6. **Kehormatan Diri** : Menjaga Harga Diri
7. **Kepemimpinan** : Pemimpin adalah anutan
8. **Etos Kerja** : Kerja Keras dan Kreatif
9. **Sikap terhadap Kelompok** : Orientasi kepada Kelompok Kesukuan (rasa etnosentrisme)

6.2. Model 9 Nilai Plus 3

Dengan adanya keterbatasan cakupan data yang diperoleh, dimana tidak semua suku bangsa dipelajari dan waktu penelitian yang relatif singkat, disadari telah menyebabkan tidak semua nilai-nilai terangkat ke permukaan. Melalui kajian data sekunder dan literatur, serta masukan-masukan diskusi FGD, maka diperlukan penyempurnaan terhadap model 9 NILAI tersebut dengan menambahkan nilai-nilai karakter dan pekerti yang belum diperoleh dari data lapangan.

Penambahan dilakukan dengan mengacu kepada tantangan ke depan bangsa Indonesia, yang harus menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain. Maka nilai-nilai yang dicari adalah nilai-nilai yang perlu dan harus dikembangkan untuk menghadapi tantangan masa depan bangsa Indonesia, yaitu:

1. **Budaya Ilmu Pengetahuan:** Di dalam budaya ilmu pengetahuan meliputi kecintaan untuk mencari ilmu, penghargaan terhadap hasil-hasil ilmu pengetahuan (termasuk hak milik intelektual), prinsip obyektivitas dan kejujuran ilmiah, sikap kritis (khususnya dalam ranah ilmu-ilmu sosial), dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (melalui penelitian, eksperimen, kajian-kajian ilmiah, dan lain-lain). Hal ini tidak terlepas dari upaya mengembangkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pembelajar (*learning society*), untuk membangun landasan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan (barangkali) bisa ditemukan pula

pada budaya-budaya lokal, sehingga perlu diidentifikasi dan diinventarisasi sebagai titik-tolak mengintegrasikan bangsa Indonesia dengan dunia ilmu pengetahuan.

2. **Budaya Dagang / Kewirausahaan:** Beberapa suku bangsa telah mewarisi dan mengembangkan budaya kewirausahaan yang kental, seperti suku bangsa Aceh, Minangkabau, Madura, dan Bugis. Umumnya suku bangsa-suku bangsa yang berada di pesisir pantai Nusantara budaya dagang berkembang dengan baik berdasarkan kontak perdagangan lewat pelabuhan/pantai. Hal ini perlu ditindak-lanjuti dengan menyebarluaskan *local genius* atau kearifan lokal di bidang wirausaha untuk menjadi milik budaya bangsa.
3. **Budaya Mencipta / Kreatif:** Kreativitas tidak sama dengan etos kerja, karena kreativitas berarti mencipta dan melampaui kondisi-kondisi normal dan kemampuan-kemampuan lokal yang dimiliki lingkungan sekitar. Melalui kreativitas manusia mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam lingkungannya. Sarana untuk menumbuhkan kreativitas terutama adalah melalui pengajaran seni dengan berbagai cabangnya.

6.3. Analisis Model

Pembacaan model merupakan langkah kritis dalam analisis dan implementasi model ke dalam strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Prinsip dasarnya, semua nilai adalah baik, semua tergantung kepada penerapan dan konteksnya. Kerangka untuk melakukan pembacaan model adalah:

1. BAIK-BURUK (Etika).
2. INDAH-JELEK (Estetika).
3. SALAH-BENAR (Ilmu).
4. UNTUNG-RUGI (Ekonomis).

Berdasarkan studi verifikasi serta masukan-masukan dalam FGD, maka analisis terhadap 9 nilai model generik adalah sebagai berikut:

1. Sumber Nilai : Nilai Adat Bersumber dari Nilai Agama

Data lapangan menunjukkan nilai adat bersumber agama ditemukan pada kluster Sumatera dan Jawa-Bali. Sementara studi verifikasi memberikan *verifikasi rendah (R)* kecuali kluster Jawa-Bali; sebagian dikarenakan responden merasa bahwa nilai adat bersumber agama semakin tidak berlaku lagi dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari mereka (catatan: lokasi studi adalah daerah perkotaan). Dengan kata lain ada *gap* antara yang ideal dan yang nyata terjadi. Pada FGD Kluster, sebagian dari wakil-wakil suku bangsa menyatakan pula keberatan terhadap kesimpulan tersebut. Tidak semua suku bangsa di Indonesia mengambil sumber nilai dari agama, mereka mengatakan, justru ada sejumlah suku bangsa yang menarik nilai-nilainya terutama dari adat-istiadat masyarakatnya. Hal ini menjadi catatan tersendiri, bahwa perumusan nilai-nilai lokal yang tidak bersumber dari agama (catatan: agama dalam arti 5 agama formal yang diakui) merupakan kenyataan pada sebagian suku bangsa.

2. Nilai Dasar Hidup : Malu

Kendati data lapangan menyebutkan nilai dasar malu hanya berlaku pada kluster Sumatera, namun pada studi verifikasi justru semua kluster memberikan *verifikasi tinggi (T)* terhadap nilai ini. Pada analisis, hal ini bertolak-belakang dengan sinyalemen bahwa budaya malu di dalam bangsa Indonesia telah semakin menipis. Untuk menjelaskan hal ini, perlu dibedakan antara *malu* dan *rasa bersalah*. Nilai dasar malu sesungguhnya masih berlaku dan diterapkan oleh bagian terbesar bangsa Indonesia, namun tidak diiringi dengan *rasa bersalah (feeling of guilty)* yang terkait langsung kepada tanggung-jawab terhadap konsekuensi dari perbuatan yang mendatangkan rasa malu tersebut.

3. Tertib Sosial : Keseimbangan

Nilai keseimbangan dalam tertib sosial ditemukan pada kluster Sumatera dan Jawa-Bali. Pada studi verifikasi semua kluster memberikan *nilai rendah (R)*, kecuali kluster Sulawesi. Dalam analisisnya, pengertian keseimbangan dapat berarti keseimbangan statis yang cenderung membuat masyarakat menjadi kaku/tidak adaptif atau keseimbangan dinamis yang menguntungkan dalam situasi akselerasi perubahan yang cepat dewasa ini.

4. Hubungan dengan Orang Lain : Tenggang Rasa

Tenggang rasa merupakan nilai karakter dan pekerti yang dimunculkan oleh semua kluster pada data lapangan. Dalam arti, bangsa Indonesia mengakui keutamaan dari sikap

tenggang rasa terhadap hubungan sosial dengan sesama. Akan tetapi, tenggang rasa pada studi verifikasi mendapatkan *nilai rendah (R)* kecuali untuk Kluster Jawa-Bali. Ini mengisyaratkan bahwa ketegangan dan konflik sosial yang kerap terjadi belakangan ini masih meninggalkan bekas pada psikologis masyarakat, sehingga daya kemampuan untuk bertenggang-rasa (terhadap mereka yang berbeda) cenderung menurun. Ini merupakan sinyal negatif yang dapat disikapi melalui strategi/program aksi PKPB untuk mengembalikan situasi tenggang-rasa ke tingkatan semula.

5. Hubungan dengan Sistem Sosial : Adaptif dan Tahu diri

Berhadapan dengan sistem sosial yang pluralistik dimana berbagai kepentingan yang berbeda bertemu, saling-bersimpangan atau bahkan bertabrakan, maka nilai adaptif dan tahu diri merupakan mekanisme penyesuaian diri yang diambil. Nilai ini diperoleh dari Kluster Sumatera pada data lapangannya. Sementara itu, studi verifikasi memberikan *hasil rendah* (Kluster Sumatera dan Kalimantan), *sedang* (Kluster Jawa-Bali) dan *tinggi* (Kluster Sulawesi).

6. Kehormatan Diri : Menjaga Harga Diri

Kehormatan diri merupakan nilai yang menonjol pada kluster Jawa-Bali dan kluster Sulawesi. Pada verifikasinya, semua kluster memberikan *verifikasi tinggi (T)*, yang menandai bahwa ternyata masalah harga diri diakui merupakan nilai penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Segi positif dari nilai menjaga harga diri (termasuk nama baik keluarga) adalah membentuk karakter dan watak yang bertanggung-jawab, bermartabat, dan selalu berupaya menghindari perilaku-perilaku yang merusak kehormatan diri maupun kehormatan/harga diri orang lain. Akan tetapi, pada sisi negatifnya, menonjolkan harga diri yang melewati batas cenderung membangkitkan konflik dengan pihak lain, serta mengesampingkan penyelesaian-penyelesaian yang moderat/damai. Karena tuntutan harga diri yang tinggi umumnya mengharuskan penyelesaian yang mengarah pada kekerasan/konflik terbuka. Hal ini patut dipertimbangkan dalam strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa, bagaimana caranya menyalurkan nilai menjaga harga diri kepada segi-segi positifnya.

7. Kepemimpinan : Pemimpin adalah Panutan

Diperlukannya kepemimpinan sebagai sumber panutan merupakan nilai yang ditemukan pada semua kluster yang diteliti. Hal ini dapat dianalisis sebagai suatu fakta yang sejalan dengan masih kuat dan berkembangnya budaya patron-klien dalam masyarakat. Akan tetapi studi verifikasi memberikan *nilai rendah (R)* untuk kluster Sumatera dan kluster

Sulawesi. Hal ini bisa dibaca sebagai sinyalemen mulai tergerusnya nilai kepemimpinan dalam masyarakat, dimana pemimpin yang ada (baik pemimpin formal maupun pemimpin informal) tidak lagi mampu memberikan panutan.

8. Etos Kerja : Kerja Keras dan Kreatif

Dua aspek yang saling mendukung antara kerja keras dan kemampuan kreatif, ditemukan pada keempat kluster. Demikian pula dalam studi verifikasinya, semua kluster memberikan *nilai tinggi* (T). Ini menandakan kuatnya kesadaran bahwa kerja keras dan kreativitas merupakan tuntutan riil dalam kehidupan, khususnya di perkotaan (ingat, bahwa studi dilakukan di perkotaan). Untuk itu, menjadi catatan penting bahwa strategi pembangunan karkater dan pekerti bangsa harus memperkuat kecenderungan ini dengan memberikan dukungan dan arahan terhadap nilai kerja keras dan kreativitas sehingga dapat benar-benar tertanam pada aspek kognitif, afektif dan konatif bangsa Indonesia.

9. Sikap terhadap Kelompok : Orientasi kepada Kelompok Kesukuan (rasa etnosentrisme)

Orientasi kepada kesukuan hanya ditemukan pada kluster Sumatera. Akan tetapi pada studi verifikasi, semua kluster memberikan *nilai tinggi* (T), kecuali kluster Kalimantan. Pada sisi positif, kuatnya orientasi kepada kesukuan merupakan pertanda bahwa daya rekat sosial di antara sesama suku bangsa masih bertahan di tengah perubahan dan kehidupan modern. Namun, sisi negatifnya, kecenderungan yang terlalu kuat kepada orientasi kesukuan bisa membangkitkan potensi konflik antar kelompok/suku, sebagaimana telah terjadi di beberapa tempat. Segi rawan ini perlu mendapat perhatian bagi strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa ke depan, bagaimana mencegah orientasi kepada kesukuan agar tidak berkembang ke arah *chauvinisme* golongan yang dapat memicu konflik.

6.4. Saran Dan Rekomendasi

6.4.1. Saran

Saran adalah hal-hal yang terkait dengan implikasi studi terhadap strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa ke depan, yakni sebagai berikut.

a. Kondisi Nilai-Nilai

Dari hasil studi & verifikasi yang dilakukan, ditemukan bahwa tidak semua nilai-nilai berlaku dalam pengetahuan (aspek kognitif), kesadaran (aspek afektif), dan perilaku (aspek konatif) masyarakat yang menjadi anggota sukubangsa bersangkutan, khususnya dalam konteks masyarakat perkotaan.

- Kondisi Nilai Melemah: strateginya adalah menghidupkan kembali (*revive/revitalisasi*) nilai-nilai yang melemah tersebut. Dalam konteks ini meliputi nilai **Adat Bersumber dari Agama** (mengalami pergeseran), nilai **Adaptif dan Tahu Diri** (mengalami pergeseran), dan nilai **Kepemimpinan sebagai Panutan** (mulai tergerus/kehilang relevansinya).
- Kondisi Nilai Rusak/Usang: strateginya merekonstruksi nilai-nilai yang rusak/usang tersebut. Dalam konteks ini nilai **Tertib Sosial dan Keseimbangan** (rusak oleh penajaman konflik dan gesekan antar kelompok), nilai **Tenggang Rasa** (berkurangnya toleransi terhadap perbedaan), dan nilai **Malu** (meskipun tinggi namun tidak mencerminkan kaitannya dengan *rasa bersalah* (*guilty*) yang berimplikasi tanggung-jawab terhadap perbuatan yang menandatangani Malu tersebut).
- Kondisi Nilai Hilang/Terputus: memperbaharui dan menemukan kembali (*reinvention*) nilai-nilai yang hilang/terputus tersebut. Dalam hal ini tidak ada dari 9 Nilai yang ditemukan mengalami kondisi hilang/terputus.

b. Penafsiran Nilai-Nilai

Ada beberapa nilai yang mendapat tanggapan positif dari responden, akan tetapi memerlukan penafsiran lebih lanjut ke dalam konteks yang sesuai, yaitu sebagai berikut:

- **Nilai Kerja Keras:** kendati nilai Kerja Keras mendapat verifikasi tinggi, namun tidak berarti bahwa nilai tersebut sudah dengan sendirinya berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka, diperlukan dukungan agar nilai tersebut lebih tertanam dan dapat dipraktikkan secara baik. Dalam hal ini strategi mendukung Nilai Kerja Keras misalnya dalam bentuk kedisiplinan, orientasi pencapaian dan prestasi kerja (*need of achievement*), penghargaan terhadap nilai kerja, dan lain-lain.
- **Nilai Menjaga Harga Diri:** Nilai Menjaga Harga Diri ditemukan tinggi pada semua sukubangsa, meskipun cara mewujudkannya berbeda-beda (ada yang dengan cara halus dan ada yang dengan blak-blakan/terang-terangan). Segi positifnya adalah menjaga martabat dan kehormatan, namun segi negatifnya apabila tidak terkendali

adalah mempertajam konflik. Hal ini perlu dilakukan strategi klarifikasi untuk membedakan batas-batas dimana nilai Menjaga harga Diri bisa berlaku secara positif.

- **Nilai Sikap terhadap Kelompok/Suku:** Hal ini bisa bermakna positif (kuatnya daya-rekat di dalam suatu komunitas atau perasaan komunalisme yang tinggi), namun bisa berarti negatif pula (menolak terhadap orang-orang di luar kelompok/suku). Untuk itu perlu strategi klarifikasi, yaitu untuk menjelaskan segi positif dan negatif dari Nilai ini.

c. Catatan Khusus

Khusus untuk nilai **Tenggang Rasa** dan nilai **Tertib Sosial dan Keseimbangan**, perlu mendapat garis-bawah tersendiri, yaitu terkait dengan konflik-konflik sosial yang terjadi (dan potensi konflik yang mungkin terjadi). Strategi bagaimana meningkatkan tenggang rasa dan toleransi diperlukan dalam konteks ini, serta penghormatan terhadap norma-norma tertib sosial dan keseimbangan dalam masyarakat perlu digalakkan kembali.

6.4.2 Rekomendasi

Rekomendasi adalah hal-hal yang menjadi tindak-lanjut dari hasil studi, yaitu sebagai berikut ini.

1. Pengembangan Studi Lanjutan

Menjadi catatan bagi studi Penyusunan Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa ini, bahwa terdapat sejumlah keterbatasan studi yang harus ditindak-lanjuti:

- *Keterbatasan Wilayah* : bahwa studi lapangan dilakukan pada 4 (empat) Kluster sebagaimana ditentukan dalam TOR. Akan tetapi disarankan bahwa seharusnya pada studi lanjutan ada 1 kluster tambahan untuk mengcover Papua dan Maluku.
- *Keterbatasan Sample* : dalam studi verifikasi pengambilan sampel digunakan sampel non-propabilita, yang berarti bahwa kesimpulan studi tidak bisa digeneralisasi ke tingkat nasional. Untuk menemukan generalisasi yang lebih baik tentunya dilakukan studi dengan sampel probabilita, serta proses penarikan sampel secara acak (random).

Demikian pula stratifikasi sosial yang tercermin dari studi ini belum mewakili, kecuali pada tingkatan kluster.

- *Keterwakilan sukubangsa*: jumlah sukubangsa yang menjadi subyek dalam studi ini adalah 12 (3 suku X 4 kluster), yang sesungguhnya masih perlu ditambah dengan banyak sukubangsa lagi yang belum tercakup di dalamnya. Disamping itu, direkomendasikan waktu studi yang lebih panjang (min. 3 bulan).

2. Uji Model

Model Nilai-Nilai Karakter dan Pekerti Bangsa yang diperoleh dari studi ini, yaitu **Model 9 Nilai + 3** dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan-kegiatan *workshop*. Dalam kegiatan tersebut dapat diundang narasumber ahli dari bidang-bidang ilmu yang relevan (sosiologi, psikologi, ilmu pemerintahan, manajemen konflik, dan lain-lain). Hasil workshop diuji ke lapangan dalam bentuk *pilot-project* di sejumlah daerah sebagai kajian yang berbasis lokal.

3. Pengembangan Kebijakan

Kajian pengembangan kebijakan perlu dilakukan secara khusus (*legal drafting*) untuk mengarah kepada suatu aspek praktis dari strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Dalam kegiatan ini dibutuhkan tenaga ahli di bidang administrasi publik, ahli kebijakan publik, ahli hukum, ahli ilmu politik, dan ahli kebudayaan (khususnya kebudayaan daerah). Produk yang dikeluarkan berbentuk draft peraturan, surat keputusan, atau rancangan undang-undang. Direkomendasikan pula untuk melibatkan *stakeholder* di sini; khususnya instansi/departemen terkait.

4. Studi Komparatif

Kajian yang bersifat komparatif dapat dilakukan untuk memperoleh bandingan kepada negara-negara lain mengenai strategi dan kebijakan pembangunan karakter dan pekerti di negara tersebut. Studi dapat berbentuk kajian literatur dan/atau mengundang tenaga ahli dari negara bersangkutan. Direkomendasikan adalah negara Jepang, Amerika Serikat, dan salah satu negara Eropa Barat.

BAB VII

REKOMENDASI STRATEGI

Untuk menyusun suatu pengembangan program, berikut ini adalah ROAD MAP pembangunan karakter dan pekerti bangsa (jangka pendek-menengah-panjang). Dulu, sistematisa pembangunan karakter dan pekerti bangsa tidak dirumuskan dan jarang sekali pihak-pihak yang berkompeten dilibatkan secara keseluruhan, upaya-upaya yang ada biasanya dilakukan sendiri-sendiri secara terpisah (tidak sinergis). *Road map* PKPB diperlukan sebagai kesatuan pandangan dan kesatuan bahasa agar hasil-hasil yang dicapai bersifat berkelanjutan dan diarahkan kepada upaya sistematis untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

7.1. Strategi Jangka Pendek

Program-program Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa secara sistematis hingga kini belum pernah dilakukan, sebagaimana dapat disimak dari sejarahnya, kecuali berupa aktivitas-aktivitas yang bersifat parsial dan memiliki tujuan-tujuan yang terbatas.

Maka, **strategi jangka pendek** adalah bagaimana isu-isu pembangunan karakter dan pekerti bangsa dapat disadari, dipahami dan menjadi perhatian bagi semua pihak yang memegang peranan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

7.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategi jangka pendek Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa dapat dirumuskan adalah: *meletakkan dasar-dasar sistematis secara kelembagaan maupun program aksi untuk Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa secara nasional.*

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran-sasaran yang harus dicapai adalah:

1. Membangun dan membangkitkan kesadaran, minat, perhatian, dan keseriusan (*concern*) semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
2. Mengarahkan kesadaran, minat, perhatian, dan keseriusan itu untuk membangun pembagian kerja sinergis dengan komponen-komponen kebangsaan yang ada.

Secara umum komponen-komponen kebangsaan yang dimaksud di atas terbagi dalam beberapa kelompok besar:

1. Instansi/Departemen Terkait.

Ada sejumlah instansi/departemen terkait yang memiliki TUPOKSI (Tujuan Program Aksi) yang paralel dengan kegiatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Umumnya TUPOKSI (Tujuan Program Aksi) tersebut merupakan penjabaran dari suatu tujuan umum yang lebih besar, sesuai dengan visi-misi instansi/departemen bersangkutan. Akan tetapi, apabila TUPOKSI (Tujuan Program Aksi) yang terpisah-pisah itu dapat dipertemukan dalam suatu pembagian kerja yang sistematis, maka dapat diharapkan bahwa pembangunan karakter dan pekerti bangsa nantinya menjadi suatu gerakan pembangunan yang bersifat nasional dan lebih menyeluruh.

Dalam pelaksanaan studi ini, telah dilakukan identifikasi awal kepada sejumlah instansi/departemen yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pembangunan karakter dan pekerti bangsa, antara lain :

- a. Departemen Pendidikan Nasional: dengan titik berat utama penugasannya adalah pendidikan pekerti pada jalur pendidikan formal maupun informal.
- b. Departemen Pertahanan dan Keamanan: dengan titik berat utama penugasannya adalah penguatan karakter bangsa dalam rangka bela negara dan ketahanan nasional.
- c. Departemen Dalam Negeri: dengan titik berat utama penugasannya adalah pembangunan karakter dan pekerti bangsa dalam rangka memperkokoh integrasi nasional di antara berbagai wilayah dalam era otonomi daerah.
- d. Departemen Komunikasi dan Informasi: dengan titik berat utama penugasannya adalah komunikasi dan diseminasi informasi untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
- e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan: dengan titik berat utama penugasannya adalah pembangunan karakter dan pekerti bangsa dalam rangka pemberdayaan kaum perempuan.
- f. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional: dengan titik berat utama penugasannya adalah pembangunan karakter dan pekerti bangsa menjadi acuan / landasan dalam pembangunan Nasional.

Di samping itu, perlu dijajaki dan ditindaklanjuti pula peranan pemerintah-pemerintah daerah, dan departemen / instansi lain yang belum tercakup di sini (misalnya: departemen agama, departemen sosial, departemen pemuda dan olahraga, dan seterusnya). Pada prinsipnya semua unsur kelembagaan berupa instansi pemerintah/departemen yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan karakter dan pekerti bangsa perlu diajak dan dilibatkan, mengingat besarnya dan luasnya ruang-lingkup pekerjaan yang harus dilakukan.

2. Gerakan-Gerakan Swadaya Masyarakat

Inisiatif-inisiatif yang diprakarasi oleh sejumlah tokoh masyarakat yang menunjukkan rasa prihatin terhadap kondisi moralitas bangsa, telah melahirkan gerakan-gerakan swadaya

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

yang mengusung agenda perbaikan karakter dan pekerti. Beberapa yang telah diidentifikasi adalah:

- **Gerakan Jalan Lurus.**
- **Yayasan Jatidiri Bangsa.**
- **Gema Nusa (Gerakan Membangun Nurani Bangsa).**
- **Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia.**
- **Barisan Kebangkitan Indonesia Raya.**

Keberadaan mereka, dengan berbagai sudut-pandang dan keterbatasannya, perlu dipandang sebagai partner dalam Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa.

3. Akar Rumput (Masyarakat Adat)

Secara proporsional, sejalan dengan otonomi daerah maka terjadi arus-balik terhadap sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini. Masyarakat di daerah, khususnya daerah-daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan pusat, menggunakan momentum ini untuk memperkuat basis kedaerahannya. Titik-masuk yang terbuka lebar dan mendapat respon masyarakat daerah adalah kebangkitan kembali kelompok-kelompok masyarakat adat di Nusantara.

Posisi masyarakat adat dan para pemangku adat dalam strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa seyogyanya dipandang sebagai rekan seiring (*co-partner*) bersama pemerintah daerah, agar dapat memperkuat khususnya untuk mendekatkan mekanisme implementasi program-program ke tingkat *grass root*. Nilai adat-istiadat sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti memiliki arti penting dalam sosialisasi di tingkat lokal.

7.1.2. Program Aksi

Bentuk-bentuk Program Aksi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan karakter dan pekerti bangsa dalam jangka pendek yang berhasil diidentifikasi melalui studi ini adalah sebagai berikut:

7.1.2.1. Studi

Pelaksanaan studi-studi yang dikaitkan dengan upaya pembangunan karakter dan pekerti bangsa perlu diteruskan. Tujuan dan sasaran dari studi-studi tersebut adalah untuk membangun dasar konseptual yang kuat melalui kajian-kajian dari berbagai sudut-pandang disiplin keilmuan. Selain pendekatan antropologi yang menjadi arus-utama dalam studi ini, perlu dikembangkan kajian pembangunan karakter dan pekerti bangsa dari sudut-pandang ilmu psikologi (psikologi sosial, karakter), sosiologi (sosiologi kelompok, sosiologi perkotaan, manajemen konflik), kesejahteraan sosial (pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial), pendidikan (pedagogi, kurikulum), kebudayaan (filologi, folklor, kebudayaan daerah), dan seterusnya.

Maka dalam konteks pengembangan studi pembangunan karakter dan pekerti bangsa ke depan, diajukan beberapa rekomendasi.

REKOMENDASI I: *Fokus permasalahan studi.* Sebagaimana dari hasil identifikasi dan inventarisasi isu-isu pembangunan karakter dan pekerti bangsa di dalam forum FGD, permasalahan pentingnya adalah ketegangan dan (potensi) konflik yang dihadapi. Maka, studi PKPB seyogyanya dikaitkan dengan hal-hal yang *urgent* tersebut, dengan tingkatan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Daerah Konflik

Untuk daerah-daerah yang pernah atau terlanjur telah mengalami konflik terbuka, penyelesaian pada level ketertiban dan keamanan merupakan langkah darurat yang dilakukan untuk meredakan. Langkah selanjutnya ialah strategi kemanusiaan untuk memulihkan 'luka-luka sosial' yang ditimbulkan oleh konflik. *Dalam hal ini strategi PKPB tidak menempati urutan prioritas*, namun di dalam strategi jangka panjang penanganan konflik maka PKPB memiliki peran penting untuk mencegah terulangnya konflik-konflik serupa.

b. Daerah Potensial Konflik

Daerah-daerah yang diidentifikasi merupakan lokasi-lokasi rawan konflik di masa mendatang, adalah sasaran strategi PKPB yang perlu dikaji. Dalam hal ini, bagaimana strategi jangka-pendek yang bisa dilakukan untuk mencegah potensi konflik agar tidak meluas menjadi konflik terbuka. Program-program PKPB untuk mencegah potensi

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

konflik perlu dirumuskan dengan melihat akar persoalan dan konteks sosial-politik yang ada. Salah satu langkah yang perlu dilakukan di dalam konteks ini adalah meluruskan stereotipe negatif atau stigma sosial terhadap suatu suku bangsa / kebudayaan, dengan tidak memperbesar kenegatifan melainkan menekankan segi-segi positifnya, sehingga mengubah persepsi kepada empati sosial yang lebih tinggi di antara suku bangsa.

c. Daerah Harmonis

Di daerah-daerah yang menunjukkan harmoni sosial yang tinggi, yakni perbedaan suku, agama dan ras cenderung telah dieliminasi dengan baik, maka strategi PKPB dapat berfungsi untuk melestarikan / memperkuat perangkat nilai-nilai dan kelembagaan yang mendukung harmoni sosial tersebut. Selain itu studi dapat dilakukan untuk mengambil model harmoni sosial setempat untuk dijadikan perbandingan daerah-daerah yang rawan konflik. Misalnya, model keterbukaan pada masyarakat Betawi dalam menerima berbagai pengaruh terhadap kebudayaannya.

REKOMENDASI II: Mekanisme Implementasi Studi. Tingkatan pelaksanaan studi sebaiknya dimulai dari tingkat lokal. Dalam hal ini dapat dikembangkan studi-studi yang bersifat *pilot project*, misalnya untuk menginventarisasi kekayaan nilai-nilai *local genius* (kearifan lokal) yang dapat diangkat sebagai bagian dari pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Proses pelaksanaan studi seyogyanya diarahkan untuk mengembangkan kajian-kajian yang bersifat *action research*, yang bertitik-tolak dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat (misalkan, masalah kemiskinan struktural, penebangan hutan, gizi buruk, konflik sumber daya, dan lain-lain). Dengan demikian studi dapat memberikan masukan-masukan yang bersifat *bottom-up*, partisipatif dan memberdayakan bagi pembangunan karakter dan pekerti berbasis lokal tersebut.

7.1.2.2. Workshop

Pelaksanaan *workshop-workshop* dilakukan dengan mengambil tema-tema spesifik yang mendukung tema besar 'tantangan, hambatan, peluang dan ancaman pembangunan karakter dan pekerti bangsa'.

Tujuan dan sasaran *workshop* ialah:

1. Menyamakan persepsi tentang konsep, definisi, dan ruang-lingkup pembangunan karakter dan pekerti bangsa di antara berbagai komponen kebangsaan yang

dilibatkan, agar ada kesatuan bahasa dan tindakan dalam menerjemahkan program-program pembangunan karakter dan pekerti bangsa di level implementasinya.

2. Menyamakan persepsi tentang prioritas, pembagian kerja, dan pentahapan kerja dalam melaksanakan program-program pembangunan karakter dan pekerti bangsa di antara komponen-komponen kebangsaan yang berbeda.
3. Mengembangkan kerja lintas-sektoral dan lintas-departemen, jika dimungkinkan, untuk melaksanakan suatu program pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang berskala lebih luas dan membutuhkan sumber daya besar.

7.1.2.3. Kongres Nasional

Diperlukan suatu kegiatan massal yang menampung berbagai aspirasi, gagasan pemikiran, dan sumbang-saran terhadap pembangunan karakter dan pekerti bangsa, guna untuk membuka peluang adanya kerjasama sinergis di antara komponen-komponen kebangsaan pada level nasional. Direkomendasikan melalui studi ini, bahwa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan suatu *kongres nasional pembangunan karakter dan pekerti bangsa*.

Melalui kegiatan berskala nasional seperti ini, diharapkan akan berkembang suatu gerakan yang bersifat nasional dan massal dengan satu tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan pembangunan karakter dan pekerti bangsa dari berbagai sisi permasalahan dan tematiknya. Diharapkan pula bahwa kongres dapat mengangkat isu-isu pembangunan karakter dan pekerti bangsa ke tingkat pengambilan kebijakan nasional.

Sebagai suatu kongres nasional, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan meliputi berbagai bentuk acara, antara lain diusulkan adalah:

- a. Seminar-seminar Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa
- b. Pameran-Pameran yang mengangkat topik lokal maupun nasional seputar pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
- c. Deklarasi atau Dokumen Pernyataan Sikap Bersama yang mengetengahkan urgensi pentingnya dan mendesaknya masalah pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
- d. Tema-tema acara kesenian yang mendukung kepada pembangunan karakter dan pekerti bangsa, baik melalui cabang-cabang seni tradisi maupun seni-seni modern (tari, musik, drama, film, sastra, seni lukis).

7.1.2.4. Legal Drafting

Dikemukakan dengan jelas dan tegas oleh narasumber dalam diskusi-diskusi FGD yang mengundang wakil-wakil kluster, relawan, dan departemen / instansi terkait bahwa salah satu permasalahan strategis dalam pembangunan karakter dan pekerti bangsa adalah dibutuhkanannya *payung hukum yang jelas*. Aspek regulasi hukum penting untuk menjamin *political will* pemerintah di bidang pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang jelas-jelas memberikan banyak sinyal negatif yang harus ditanggapi dengan kebijakan dan program kerja yang relevan. Untuk dapat melakukan hal itu perlu adanya kepastian hukum.

Strategi *legal drafting* dalam jangka pendek adalah:

1. Menggalang dukungan yang lebih luas dari komponen-komponen kebangsaan yang seide-sepemikiran untuk menyamakan persepsi dan kemudian mengarahkan kerjasama ke tingkat legislasi (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan).
2. Membangun opini publik yang menguntungkan, sehingga upaya untuk memperjuangkan adanya suatu payung hukum yang jelas bagi pembangunan karakter dan pekerti bangsa di tingkat nasional dapat memperoleh dukungan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui strategi media (koran, televisi, radio) maupun dialog-dialog terbuka yang bersifat umum untuk konsumsi publik.

7.1.2.5. Kerjasama Stakeholder

Dari hasil workshop, diharapkan ada jalinan antara stakeholder terkait dengan visi dan persepsi PKPB. Adapaun jalinan tersebut dapat terwujud sebagai berikut:

1. Kerjasama struktural.
2. Pertukaran informasi.
3. Pembagian tugas dan kebijakan terkait dengan PKPB.

Jalinan tersebut pada tingkat janka menengah dan jangka panjang diharapkan lebih luas dan konkrit.

7.2. Strategi Jangka Menengah

Pada strategi jangka menengah, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai utamanya adalah menciptakan perangkat-perangkat infrastruktur yang diperlukan baik di pusat maupun daerah, dan adanya strategi promosi yang baik. Berbagai kegiatan / program kerja pada strategi jangka pendek dikembangkan lebih lanjut, sehingga ada kesinambungan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, untuk memperoleh efek-efek positif yang diharapkan, maka pada strategi jangka menengah perlu lebih meningkat kepada penciptaan infrastruktur dan strategi promosi.

7.2.1. Program Jangka Menengah

Program jangka menengah pembangunan karakter dan pekerti bangsa berupa penciptaan perangkat-perangkat infrastruktur dimaksudkan adalah perangkat kelembagaan maupun non-kelembagaan yang diperlukan untuk menggerakkan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Dalam hal ini direkomendasikan program-program sesuai bidangnya adalah sebagai berikut:

1. Program di Bidang Pendidikan

Pengertian pendidikan dalam arti penanaman nilai tidak dapat direduksi hanya pada lembaga pendidikan formal dan non-formal saja. Pendidikan nilai-nilai adalah tugas dan tanggung-jawab semua orang. Dalam hal ini bisa dilihat hubungan segitiga orangtua-pemerintah-masyarakat yang secara bersama-sama menentukan kualitas pendidikan karakter dan pekerti. Titik tolak pendidikan dan penanaman nilai-nilai adalah keteladanan, karena tanpa keteladanan (*role-modelling*) yang mampu menunjukkan nilai-nilai karakter dan pekerti itu dalam wujud perilaku yang nyata, maka akan sangat sulit peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai yang bersifat abstrak tersebut. Sejalan juga dengan pepatah *'guru kencing berdiri, murid kencing berlari'*.

Dasar pemikiran dalam pendidikan karakter dan pekerti terbagi atas pendidikan internal dan eksternal. Pendidikan internal didasarkan pada watak khusus yang berbeda-beda yang dimiliki menjadi pembawaan individu dari kelahirannya. Adapun eksternal adalah pendidikan yang diberikan kepada individu tersebut. Di sini berlaku hukum: *'jika ajarnya kuat maka dasarnya lemah, begitu pula sebaliknya'*. Maka pendidikan karakter dan pekerti merupakan suatu proses yang mengantarkan peserta didik kepada tingkatan yang lebih tinggi dari watak dasar yang dimilikinya, bukannya malah membuat watak dasar peserta didik jatuh ke level yang lebih rendah.

Untuk itu, program-program yang dapat dilakukan adalah seperti:

- a. Merevitalisasi dan menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti, sehingga tetap relevan dengan pergeseran nilai dan perubahan konteks yang ada. Orang tua perlu dilibatkan agar ada konsistensi yang diajarkan di sekolah dan dipraktikkan di rumah. Variesi metoda pengajaran misalnya: *outbound*.
- b. Untuk memperkuat karakter dan pekerti dibutuhkan adanya suatu mata pelajaran khusus karakter dan pekerti untuk sekolah-sekolah formal (SD, SMP dan SMU), atau muatan nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa menjadi bagian mata pelajaran yang lainnya sehingga menjadi suatu yang terintegratif. Pendidikan nilai-nilai sebelumnya pernah diakomodasi pada mata pelajaran agama dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila), PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), dan sekarang menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Akan tetapi titik-berat pada mata pelajaran tersebut adalah pembelajaran normatif, dalam arti mengenal norma-norma secara kognitif saja, yang baru merupakan satu syarat pendidikan pekerti. Keutuhan pendidikan pekerti baru tercapai bila meliputi aspek kognitif, afektif dan konatif, serta aspek pembiasaan (psikomotorik).
- c. Selain mengefektifkan wahana pendidikan pekerti yang ada, perlu difikirkan upaya menanamkan pendidikan pekerti melalui wahana penyampai pesan yang populer seperti komik, kartun, dongeng, cerita anak, film, musik, tari, majalah dan lain sebagainya yang mudah dicerna anak-anak dan remaja. Program-program yang dilakukan misalnya:
 - *Penyediaan Bacaan anak-anak, berdasarkan cerita-cerita lokal maupun dunia.*
 - *Lomba-lomba mengarang, cipta lagu, festival musik, dan lain-lain dengan mengusung tema karakter dan pekerti.*
 - *Program televisi seperti film, sinetron, talk-show dan iklan layanan masyarakat*

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Efektivitas program-program pembangunan karakter dan pekerti bangsa pada level bawah sangat ditentukan keterlibatan tokoh-tokoh lokal, perangkat pemerintah setempat, dan dukungan dari masyarakat.

Dalam jangka menengah (dan jangka-panjang) peran pemerintah, lembaga formal, dan institusi sesungguhnya hanya fasilitator yang membangun kondisi dan peluang bagi terciptanya pembangunan karakter dan pekerti bangsa (fungsi *enabling*), sementara penggerak dan pelaksana yang sesungguhnya adalah masyarakat.

Oleh karena itu, menyangkut mekanisme pelaksanaannya, maka program-program yang ada harus dimulai dari gerakan akar rumput (pendekatan *neo-populis*), dan sedapat mungkin agar gerakan tersebut benar-benar menjadi milik masyarakat. Program yang dilakukan misalnya:

- Pemberdayaan (keseluruhan) pusat-pusat kegiatan (*community centre*) dalam arti menciptakan tempat-tempat yang baru atau menumbuh-kembangkan *community center* yang sifatnya lokal yang ada pada masyarakat setempat. Gelanggang remaja (sebagai *community center*) diaktifkan kembali, dan di daerah-daerah yang belum mempunyai perlu didirikan yang baru. Karang Taruna dikembangkan sebagai wadah anak-anak muda mengembangkan diri melalui kegiatan sosial, berkesenian, aktivitas ekonomi, maupun keilmuan / kemanusiaan. Atau *community center* yang sifatnya lokal yaitu poskamling (ronda), dll. Pemberdayaan ini sampai pada tingkat bawah pada level masyarakat seperti RT atau RW.

3. Program Hubungan Antar Lembaga

Penegakan mekanisme dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik merupakan pondasi bagi menyelenggarakan hubungan antar-lembaga secara benar. Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa di dalam konteks ini (*stakeholder*) sangat penting dan mendesak, sebab pemerintah masih dipandang sebagai acuan dan teladan bagi masyarakat dalam berperilaku. Tanpa mengarahkan hubungan antar lembaga kepada nilai-nilai karakter dan pekerti yang baik, maka penanaman nilai-nilai kepada masyarakat akan sia-sia. Bahkan pembangunan karakter dan pekerti pada level hubungan antar lembaga (baik hubungan eksternal maupun internal) adalah dasar bagi terselenggaranya hal yang sama di masyarakat. Program-program yang dapat dilakukan:

- Kampanye Karakter dan Pekerti Pegawai Pemerintahan, dengan sasaran seperti kedisiplinan, pemisahan domain publik-privat secara tegas, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pelayanan prima, dan lain-lain.

- Kegiatan *role-modeling* dengan menampilkan contoh-contoh konkrit dari orang-orang dalam pemerintahan yang mampu menunjukkan teladan karakter dan pekerti yang unggul (keteladanan).
- Mekanisme *reward and punishment*, misalnya dengan memberi penghargaan khusus kepada pegawai pemerintahan yang berjasa dalam memberikan pelayanan publik.

7.2.2. Strategi Sosialisasinya (Nilai-Nilai Karakter dan Pekerti)

Di samping program-program yang disebutkan di atas, pembangunan karakter dan pekerti bangsa dalam jangka menengah perlu melakukan strategi sosialisasi dan promosi nilai-nilai karakter dan pekerti yang positif, serta melakukan *kampanye negatif* terhadap nilai-nilai yang dipandang tidak layak dan tidak tepat untuk di terapkan dalam kehidupan berbangsa-bernegara (misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain).

Dalam sosialisasi nilai, kita tidak begitu saja meletakkan pada nilai baik (positif) saja atau nilai negatif saja. Ada proses dalam sosialisasinya, yakni nilai negatif, kemudian dinetralkan, menjadi nilai positif. Syarat dalam menyiarkan atau pengemasan nilai-nilai tersebut adalah:

- Disenangi masyarakat (bernilai estetik).
- Bermanfaat bagi masyarakat (nilai pragmatik).

Seperti contoh: pada program Keluarga Berencana (KB), nilai positif konsep keluarga dalam masyarakat adalah “banyak anak, banyak rejeki”, tetapi nilai tersebut justru negatif (hambatan) untuk program Keluarga Berencana (KB). Nilai tersebut kemudian dikemas menjadi sedemikian sehingga pada akhirnya menjadi nilai yang positif, yaitu sbb:

“Banyak Anak Banyak Rejeki > Tidak Selalu demikian > Cukup Dua Saja”

Perangkat-perangkat kesenian, baik seni tradisi maupun seni modern, merupakan sarana yang dapat dieksplorasi untuk mensosialisasikan nilai-nilai karakter dan pekerti. Disamping itu sosialisasi melalui institusi keluarga dan masyarakat juga berperan. Sarana-sarana sosialisasi yang dapat dikembangkan dalam konteks ini adalah seperti di bawah ini.

1. Keluarga

Hampir di semua masyarakat Indonesia, keluarga menjadi pusat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai karakter dan pekerti. Masih kuatnya nilai-nilai keluarga dan kekerabatan mendukung fungsi ini. Program-program yang dilakukan misalnya:

- Kampanye penguatan nilai-nilai dalam keluarga, seperti hubungan orang tua - anak, sesama saudara, dan dengan kerabat.
- Sosialisasi sarana-sarana pendidikan karakter dan pekerti dalam keluarga, seperti lewat cerita dongeng sebelum tidur, kegiatan bersama anggota keluarga, pendidikan agama dalam keluarga, dan lain-lain.
- Pemberdayaan (*empowering*) terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam rangka mendukung nilai-nilai karakter dan pekerti dalam keluarga.

2. Promosi Melalui Medium Kesenian Tradisi

Potensi seni sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai karakter dan pekerti telah dikenal dalam tradisi berbagai suku bangsa kita. Kekayaan tradisi suku bangsa-suku bangsa meliputi cerita-cerita rakyat, nyanyian-nyanyian, dan pepatah-pantun yang mengandung muatan nilai-nilai. Maka, kesenian tradisi merupakan medium yang nyaris tak terbatas untuk menyampaikan nilai-nilai, karena dekat dan akrab dengan masyarakat dan merupakan milik dari masyarakat itu sendiri. Program-program pembangunan karakter dan pekerti melalui medium kesenian tradisi dapat dikembangkan pada tingkat lokal maupun nasional. Program yang dilakukan misalnya:

- a. Pesta Budaya tahunan, di setiap daerah / provinsi dalam rangka menghidupkan kebudayaan lokal.
- b. Menghidupkan kembali kesenian-kesenian lokal yang sudah mati yakni dengan menampilkan kembali baik secara utuh atau mengkreasi sesuai kondisi saat ini (kekinian).
- c. Inventarisasi kekayaan tradisi yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa.
- d. Pembentukan atau penguatan komunitas-komunitas kesenian di tingkat lokal dan nasional (sanggar, kelompok seni, masyarakat pencita kesenian), khususnya yang mendukung pengembangan karakter dan pekerti.

3. Promosi Melalui Medium Kesenian Modern

Nilai-nilai tradisi tidak harus disampaikan melalui media tradisional semata. Melalui kesenian modern pun dapat disampaikan kandungan nilai-nilai yang sama seperti kesenian tradisi. Sebagai contoh, salah satu narasumber dalam diskusi FGD (*Focus Group Discussion*) adalah pencipta sebuah program televisi lokal yang selama 16 tahun telah menggarap tayangan untuk anak-anak yaitu berjudul "KUNCUNG BAWUK" yang merupakan adaptasi terhadap program *Sesame Street* dari televisi Amerika. Tidak ada hambatan apa pun dalam hal ini untuk mengambil kesenian modern sebagai medium penyampai pesan. Untuk sosialisasinya, perlu diperhatikan kekuatan media audio-visual, khususnya televisi, sebagai basis yang kuat dari pengembangan nilai-nilai tradisi baru. Program-program yang dilakukan:

- a. Revitalisasi televisi sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa.
- b. Pemanfaatan medium kesenian modern dan *pop culture* sebagai sarana memperluas penyampaian pesan, terutama kepada lapisan muda.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan di pusat berkumpul (*meeting point / community center*), dimana anggota masyarakat ramai berkunjung, terutama lapisan muda, seperti pusat perbelanjaan, kampus, jalan protokol, dan lain-lain.
- d. Festival film pendek, lomba cipta lagu, lomba mengarang, festival teater, dan lain-lain dengan tema karakter dan pekerti bangsa.

7.2.3. Program Kerjasama *StakeHolder*

Dalam Strategi Jangka Menengah yang perlu dikembangkan pula aspek kelembagaan, yaitu bagaimana membangun kerjasama *stake-holder*. Bentuk-bentuk kerjasama dapat dirumuskan melalui workshop, temu wicara, seminar, dan lain-lain; dengan menekankan segi-segi afirmatif terhadap kepentingan yang sama. Tujuannya adalah meningkatkan hubungan antar kelembagaan dan stakeholder, dengan harapan akan dapat dibangun suatu *networking* pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

Kelompok *stakeholder* yang dikembangkan dalam kerangka kerjasama tersebut antara lain adalah:

- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), seperti ormas kepemudaan, keagamaan, pendidikan, dan lembaga sosial.

- Kelompok masyarakat adat di daerah-daerah.
- Instansi / Departemen.
- Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan di bawahnya).
- Pihak swasta.
- Lembaga-lembaga riset dan penelitian.
- Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Organisasi Pelajar dan Organisasi Kemahasiswaan.
- Gerakan Kepanduan (Pramuka), Kelompok Pencinta Alam.
- Lembaga-lembaga kesenian.
- Kelompok-Kelompok Profesi (Ikatan Insinyur, Ikatan Dokter, Ikatan Pengacara, dll).
- Tokoh-tokoh keagamaan.
- Tokoh-tokoh nasional (politik, ekonomi, kebudayaan).
- Lembaga-lembaga lokal (kelompok tani, perkumpulan warga, dll).

7.3. Strategi Jangka Panjang

Strategi Jangka Panjang Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa merupakan suatu proses yang berkesinambungan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan guna mencapai sasaran pembangunan mentalitas bangsa di samping pembangunan fisik-material.

7.3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan strategi jangka-panjang pembangunan karakter dan pekerti bangsa dapat digambarkan adalah:

1. Terbentuknya karakter nasional Indonesia yang kuat dan mantap, dengan berlandaskan kepada kebudayaan multikultural bangsa yang terdiri dari suku-suku bangsa yang bersifat serumpun dari segi bahasa dan adat-istiadatnya (*pluralisme serumpun*).

2. Tersusunnya akhlak dan pekerti bangsa yang baik pada level perilaku individu, perilaku sosial, maupun perilaku institusional (kebijakan-kebijakan institusional yang tidak melanggar akhlak dan pekerti).

Akan tetapi, sebagai suatu strategi jangka-panjang yang akan menuntut pengorbanan dan sumberdaya tidak sedikit, maka pertanyaan yang muncul terhadap SPKPB: Mengapa hal ini (SPKPB) penting? Untuk menjawabnya, perlu ditegaskan justifikasi terhadap tujuan jangka panjang pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Sebagaimana yang diperoleh dari masukan-masukan dalam forum FGD maupun diskusi tenaga ahli, yaitu sebagai berikut:

1. **Menguatkan Landasan Falsafah Bangsa.** Negara adalah sistem himpunan dari berbagai elemen yang saling terkait. Salah satu elemen dasarnya adalah falsafah bangsa, yaitu Nilai Pancasila dan UUD. Ketika hal ini telah disepakati, maka semua terikat oleh kesepakatan itu. Sebuah bangsa harus ada falsafah ideologi. Dalam hal ini falsafah ideologi kita adalah Pancasila, dengan produk hukumnya adalah UUD 45, TAP MPR, dan lain sebagainya. Dengan Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa pada dasarnya kita berada pada sikap yang nasionalis, dimana sudah ada dasar atau wadahnya yang telah kita miliki yaitu Pancasila dan UUD. Tapi bagaimana mengaplikasikannya merupakan tugas yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek dan secara parsial; sehingga diperlukan strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan.
2. **Menguatkan Landasan Moral-Spiritual Bangsa.** Salah satu konsep budaya Jawa adalah payung spiritual, yaitu *hamemayu hayuning bawono* (membuat cantik dunia yang sudah cantik: mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia). Kerangka semacam ini dapat menampung aspirasi budaya dan nilai-nilai bagi hubungan ke dalam maupun keluar dari suatu suku bangsa. Landasan serupa ditemukan pada suku bangsa-suku bangsa lain di Nusantara, dalam bentuk ungkapan eksplisit maupun tersirat pada khasanah nilai-nilai kearifan yang ditungkan lewat kesusastaan lokal. Kerangka ini dipakai sebagai alat potret, untuk menangkap kaidah-kaidah moralitas suatu suku bangsa, serta bagaimana operasionalisasinya dalam praktek (cipta, rasa, karsa). Pembangunan karakter dan pekerti bangsa adalah dalam rangka menanam/menginvest nilai-nilai budi luhur sehingga bisa dimanifestasikan untuk menopang kehidupan moral-spiritual bangsa.
3. **Menguatkan Landasan Akhlak dan Pekerti.** Dikatakan dalam suatu Hadist Nabi: "Di sebuah kaum hanya bisa berdiri karena ada akhlak, jika tidak ada maka runtuhlah bangsa tersebut." Kenyataan bahwa bangsa kita memang sedang mengalami

kemerosotan, terutama dalam masalah akhlak, tidak dapat dianggap semata-mata persoalan normatif. Karena persoalan normatif semakin diajarkan maka semakin ditertawakan, sebab hanya menyentuh aspek kognitif. Dengan memiliki strategi jangka-panjang dalam pembangunan karakter dan pekerti bangsa maka persoalannya tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diangkat kepada level operasional dan tindakan.

4. **Mempertahankan Integritas dan Integrasi Bangsa.** Untuk menjadi bangsa yang kuat dan dihormati, bangsa Indonesia memiliki integritas karakter yang menjadi jatidirinya ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Jatidiri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang 'ramah-tamah' perlu direvitalisasi dan dimunculkan kembali. Ditambah lagi dengan jatidiri baru yang mengedepankan aspek-aspek positif terkait dengan kerja keras, ilmu pengetahuan, dan kreativitas. Integrasi kesatuan-persatuan bangsa pada level sikap dan perilaku, pada gilirannya mengharuskan dikembangkan karakter dan pekerti bangsa yang menuju sifat nasional. Akan tetapi hal ini tidak dicapai pada 'ruang hampa', melainkan harus berpijak pada bumi kebudayaan suku-suku bangsa yang membentuk Indonesia. Semua ini tujuan ini dapat disatukan di dalam konsep 'pembangunan karakter dan pekerti bangsa', khususnya yang bersifat jangka-panjang.

Di dalam operasionalisasi dan prakteknya, diperlukan ada dua lapis strategi PKPB: yaitu (a) strategi besar (*grand narrative*) yang meliputi tujuan-tujuan yang mutlak seperti kesatuan bangsa, falsafah Pancasila, dan keselamatan bangsa pada umumnya; dan (b) strategi kecil (*implementatif-operasional*) untuk membumikan narasi besar tersebut ke tingkat kehidupan sehari-hari, yaitu strategi yang bersifat operasional yang dapat dilakukan secara terpisah oleh komponen-komponen kebangsaan selama dalam koridor tujuan utama yang telah disepakati.

Antara strategi *grand narrative* dan strategi *implementatif-operasional* dapat dibedakan, sehingga dalam pencapaian tujuan-tujuan strategis jangka panjang terdapat tolok-ukur dan mekanisme penetapan prioritas yang lebih jelas.

7.3.2. Program Jangka Panjang

1. *Program yang Berkaitan dengan Tiik-Tolak Tradisi:* Banyak nilai-nilai praktis positif dalam tradisi. Nilai gotong-royong saat ini semakin terkikis, bagaimana strategi untuk menumbuhkannya kembali? Program-program jangka panjang hendaknya membantu

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

nilai-nilai praktis dan positif yang berasal dari tradisi tersebut untuk direvitalisasi dan diangkat kembali ke permukaan. Acuan perangkat norma-norma universal yang berlaku umum, seperti misalnya nilai-nilai etika, kode etik profesi, nilai-nilai Hak-Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya, merupakan bagian dari pembangunan pekerti bangsa. Akan kekayaan warisan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang turun-temurun merupakan sumber yang sangat kaya dan tidak habis-habisnya. Perlu inventarisasi, kodifikasi, dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dengan cara menghidupkan kembali dan menempatkan di dalam konteks-konteks terbaru. Nilai-nilai tersebut tidak asing bagi masyarakat karena telah melekat dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari mereka.

2. *Program yang Berkaitan dengan Pengembangan Tradisi Baru:* Tidak semua nilai-nilai karakter dan pekerti harus berasal dari tradisi, karena dinamika kehidupan mengharuskan tantangan-tantangan baru yang tidak dapat dijawab dengan tradisi. Oleh karena itu, perlu pengembangan tradisi-tradisi baru yang mendukung adaptasi manusia Indonesia ke dalam dunia kehidupan modern, termasuk untuk mengangkat nilai-nilai lokal agar tetap relevan dengan zaman. Salah satu masukan peserta FGD, bahwa **BUDAYA TULIS** atau tradisi **TULIS** perlu didukung-dikembangkan untuk mendampingi tradisi lisan yang menjadi milik asli suku bangsa-suku bangsa di Indonesia. Termasuk tradisi disiplin, budaya antri, budaya tepat-waktu, menjaga kebersihan di area-area publik, dan lain-lain yang perlu disosialisasikan.
3. *Program yang Berkaitan dengan Penciptaan Konteks Sosial-Ekonomi-Politik yang Mendukung Munculnya Karakter dan Pekerti:* Timbulnya permasalahan karakter dan pekerti bangsa tidak terlepas dari konteks dimana persoalan-persoalan tersebut terjadi, contohnya seperti:
 - Kesempatan kerja: terbatasnya kesempatan kerja memungkinkan pergeseran karakter dan pekerti ke arah yang negatif.
 - Pendidikan: keterbatasan mendapat pendidikan menyebabkan sulit untuk mengadaptasi nilai-nilai baru ke dalam kerangka karakter dan pekerti yang dimiliki.
 - Pemaksaan ajaran dan agama: penanaman nilai-nilai agama dan ajarannya secara kaku akan melemahkan daya adaptasi individu untuk menyesuaikan diri dalam pergaulan masyarakat yang majemuk. Hal ini mempersulit dikembangkan karakter dan pekerti bangsa yang kuat. Termasuk di sini adalah pengajaran nilai-nilai secara dogmatis justru akan mendatangkan reaksi sebaliknya dari pihak yang menerima (misalnya, menertawakan, menjadi sinis, apatis, atau tidak peduli, dll).

Dalam kerangka strategis jangka panjang, kondisi-kondisi yang negatif terhadap konteks sosial-ekonomi-politik seperti di atas perlu mendapat solusi dan dipecahkan bersama-sama oleh segenap komponen-komponen kebangsaan.

7.4. Strategi Aplikasi Model Generik

Aplikasi strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa berdasarkan **Model Generik** (Model 9 Nilai + 3), sebagai temuan pokok studi ini, ialah mengupayakan revitalisasi nilai-nilai karakter dan pekerti berbasis lokal. Nilai-nilai kearifan tradisi pada setiap suku bangsa diharapkan dapat diangkat kembali dan ditempatkan pada konteks-konteks terbaru yang sesuai dengan perkembangannya.

7.4.1. Penerapan Nilai-Nilai Lokal Kluster

Penerapan nilai-nilai kluster sebagai bagian dari kearifan lokal yang berkembang pada sejumlah suku bangsa adalah bersifat kontinyu, dalam arti pelaksanaannya mencakup pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1. Program-program menghidupkan nilai-nilai yang penting namun telah berkurang berkembang

Terdapat beberapa nilai yang memiliki makna signifikan di dalam Model Generik, namun disadari nilai-nilai tersebut mengalami perubahan dan pergeseran sehingga cenderung melemah. Untuk itu perlu program-program untuk menghidupkannya kembali. Dalam konteks ini adalah:

a. Nilai Tertib Sosial (Keseimbangan)

Nilai ini dipandang penting, sejalan dengan meningkatnya disharmoni dan gejala sosial yang terjadi di sejumlah tempat di daerah. Memulihkan kembali rasa aman masyarakat merupakan kepentingan yang mendasar, dengan mengacu kepada nilai tertib sosial yang mendasari hubungan harmonis Manusia-Alam-Tuhan dalam pandangan hidup sejumlah suku bangsa di Indonesia.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

b. Nilai Hubungan dengan Orang Lain (Tenggang Rasa)

Nilai ini juga termasuk penting, dimana masyarakat mengalami penurunan tingkat toleransi yang diakibatkan kecurigaan, prasangka, ketegangan dan konflik sosial yang muncul belakangan ini. Maka dipandang mendesak untuk merevitalisasi nilai tenggang rasa terhadap pihak-pihak yang berbeda (the Other), untuk mengurangi ketegangan konflik yang masih dimungkinkan terjadi lagi.

c. Sumber Nilai (Nilai Adat bersumber Agama)

Nilai Adat bersumber agama perlu direvitalisasi dalam arti untuk menghidupkan ciri karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. Dengan mendekati kembali aspek adat-istiadat di satu sisi dan aspek agama di sisi lain, maka diharapkan terjadi penguatan dari dua sisi tersebut. Tentu saja, dengan mempertimbangkan kondisi di sejumlah daerah dimana adat dan agama merupakan pe-soalan yang relatif dipandang terpisah.

d. Hubungan dengan Sistem Sosial (Nilai Adaptif dan tahu Diri)

Dalam penguatan sistem sosial pada suatu masyarakat maka adaptasi dan sikap tahu diri seseorang merupakan suatu mekanisme yang membantu berjalannya hubungan sosial yang lancar dan terprediksi (*predictable*). Nilai ini mengalami penurunan, dimana ada kecenderungan bahwa orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai konteks sosial dan pergaulan antar manusia yang berbeda-beda. Untuk bangsa Indonesia yang bersifat majemuk, maka nilai ini seharusnya tinggi. Agar dengan demikian seseorang dapat mengadaptasi kepada berbagai ragam suku bangsa yang ditemukan dalam ruang pergaulan publik yang ia masuki (misalnya sekolah, universitas, tempat kerja, lingkungan pertetanggaan, dan lain-lain). Hal ini penting khususnya dalam konteks lingkungan perkotaan, sebagaimana yang menjadi fokus dalam studi ini.

2. Program-Program Mereorientasikan Nilai-Nilai yang Tidak Sesuai Perkembangan

Sejumlah Nilai menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu direorientasikan agar berkembang ke arah yang positif. Dalam hal ini adalah:

a. Nilai Kehormatan Diri (Menjaga Harga Diri)

Kuatnya nilai kehormatan diri pada semua kluster suku bangsa memiliki nilai positif bahwa orang yang bersangkutan akan berusaha berperilaku yang baik agar harga diri dan kehormatan (baik secara pribadi maupun nama baik keluarga) tidak tercemar. Akan tetapi pada sisi lain, sejalan dengan perkembangan zaman, nilai Menjaga Harga Diri yang dipertahankan dengan kuat tidak jarang menyebabkan runcingnya perbedaan pendapat yang menjurus kepada konflik, bahkan tidak jarang menimbulkan tindak kekerasan yang bersifat fisik. Maka terhadap nilai ini perlu direorientasikan ke arah yang positif, yaitu bagaimana menerapkan Harga Diri kepada maksud-maksud yang positif dan bermanfaat untuk memacu seseorang berusaha keras (misalnya, harga diri akan jatuh kalau tidak mampu menunjukkan prestasi nyata di masyarakat).

b. Nilai Sikap terhadap kelompok (Orientasi kepada Kelompok Kesukuan)

Pengembangan nilai Orientasi kepada kelompok kesukuan berguna sebagai alat perekat pada tingkat hubungan sosial kelompok. Hal ini memperkuat integrasi sistem sosial di suatu masyarakat, dimana para anggotanya merasa ikut memiliki dan berbagi identitas yang sama dengan anggota lainnya yang sama kelompok kesukumannya. Namun dalam perkembangan saat ini, dikhawatirkan bahwa nilai orientasi kepada kelompok kesukuan yang terlalu kuat akan menyebabkan sikap eksklusif yang mengecualikan terhadap orang-orang di luar kelompoknya. Hal ini lebih jauh melahirkan tindakan-tindakan diskriminatif yang tidak berdasarkan ukuran-ukuran obyektif, melainkan sikap 'pilih-bulu' yang tidak mendasar. Maka Nilai ini pun perlu direorientasikan kepada segi-segi yang positif, sembari menghilangkan segi-segi negatifnya.

3. Program-program memperkuat nilai-nilai positif yang telah berkembang

Beberapa Nilai yang menunjukkan aspek positif telah berkembang dengan baik di masyarakat. Untuk nilai-nilai serupa itu, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat agar dapat terus berkembang dan mengisi mentalitas seseorang yang menganutnya. Di antaranya adalah:

a. Nilai Etos Kerja (Kerja Keras dan Kreatif)

Pembentukan nilai etos kerja yang mengedepankan sikap kerja keras dan kreatif merupakan suatu sumbangan berharga, khususnya dalam peri kehidupan modern yang mengharuskan persaingan dan keuletan pada diri setiap orang. Pada gilirannya

nilai ini harus dirawat dan terus ditumbuh-suburkan di dalam masyarakat melalui berbagai program yang dilakukan.

b. Nilai Dasar Hidup (Malu)

Nilai Malu sebagai dasar hidup sudah sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman saat ini, dimana seseorang diharuskan peka terhadap hal-hal yang bisa mencemari nama baiknya baik di dalam keluarga, di masyarakat, maupun kehidupan berbangsa-bernegara. Nilai dasar malu perlu ditumbuh-suburkan dalam masyarakat, sebagai suatu fondasi sikap mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi, nilai dasar Malu tampaknya tidak dapat berdiri sendiri. Ada pasangannya yaitu nilai Rasa Bersalah (*feeling guilty*) yang mendorong seseorang untuk berani mengambil sikap dan bertanggung-jawab atas tindakan yang menyebabkan ia mendapat malu tersebut. Maka dengan pengombinasian antara dua nilai ini, diharapkan akan lebih membudaya sikap malu sekaligus bertanggung-jawab dalam peri kehidupan pribadi, sosial maupun berbangsa-bernegara kita.

7.4.2. Prinsip-Prinsip Kebijakan Penerapan Nilai-Nilai Lokal Kluster

Strategi aplikasi model generik yang dikembangkan di atas, mengakui adanya keterbatasan-keterbatasan yang harus diperhatikan. Hal ini menyebabkan bahwa kebijakan yang dilahirkan dari strategi aplikasi Model Generik tersebut akan meniscayakan pelaksanaan prinsip-prinsip berikut:

- a. Pengakuan Multikulturalisme: Bahwa nilai-nilai yang dicatat dalam studi ini memperhatikan adanya relativisme di antara satu kebudayaan dan lainnya. Di sini dipahami bahwa nilai-nilai yang ada akan beragam dan tidak bisa dihilangkan satu sama lain.
- b. Prinsip Lokalitas: Bahwa nilai-nilai yang ada akan sangat tergantung kepada tempat dimana ia akan diterapkan, dimana komposisi demografis, sistem matapencaharian penduduk, pengelompokan geografis dari pemukiman suku bangsa, dinamika sosial dan berbagai faktor lain akan membedakan penerapan dari satu kota ke kota lain, kendati masih berada dalam kluster yang sama. Maka setiap nilai-nilai pada dasarnya harus dijajaki di tingkat lokalitasnya ketika menerapkan sebagai bagian dari strategi.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

- c. Prinsip Resiprositas: Bahwa ketika nilai-nilai diterapkan oleh seseorang maka ia akan sangat dipengaruhi oleh reaksi dari lingkungan dimana nilai-nilai itu hendak diterapkan. Jika seorang bersuku bangsa Batak, hendak menerapkan nilai-nilainya dalam konteks pergaulan di kota Yogyakarta misalnya, maka terjadi timbal-balik antara dirinya dengan masyarakat Jawa yang menjadi 'tuan-rumah' di kota tersebut. Maka akan terjadi perelatifan atau saling menyesuaikan diri, yang tidak sama lagi dengan nilai-nilai 'asli' kedua belah pihak. Demikian pula untuk nilai-nilai suku bangsa yang lain dan dalam konteks kota yang lain.

BAB VIII

KISI-KISI STRATEGI PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA

8.1. Landasan Konstitusional

Upaya penyusunan strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa, terkait dengan mandat Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal terutama:

Pasal 32 UUD 1945

- Ayat 1: “ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya nilai-nilai budayanya.”

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

- Ayat 2: “ Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional.”

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya Rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

8.2. Visi Dan Misi

VISI:

” Terwujudnya jatidiri bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka multikultural, kesejahteraan rakyat dan persahabatan antar bangsa.”

Visi tersebut dicapai melalui misi sebagai berikut:

”Merencanakan, menggalang, dan melaksanakan pembangunan karakter dan pekerti bangsa secara sistematis, bertahap dan berkelanjutan berlandaskan nilai luhur.”

8.3. Tujuan

a. Tujuan Jangka Pendek

Meletakkan dasar-dasar sistematis secara kelembagaan maupun program aksi untuk Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa secara nasional, dengan cara:

- Membangun dan membangkitkan kesadaran, minat, perhatian, dan keseriusan (*concern*) semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

- Mengarahkan kesadaran, minat, perhatian, dan keseriusan itu untuk membangun pembagian kerja sinergis dengan komponen-komponen kebangsaan yang ada.

b. Tujuan Jangka Menengah

- Menciptakan dan mengembangkan perangkat-perangkat infrastruktur yang diperlukan baik di pusat maupun daerah, bagi pembangunan karakter dan pekerti bangsa secara nasional.
- Adanya strategi promosi yang baik.

c. Tujuan Jangka Panjang

- Terbentuknya karakter nasional Indonesia yang kuat dan mantap, dengan berlandaskan kepada kebudayaan multikultural bangsa yang terdiri dari suku-suku bangsa yang bersifat serumpun dari segi bahasa dan adat-istiadatnya atau 'pluralisme serumpun'.
- Terbentuknya akhlak dan pekerti bangsa yang baik pada level perilaku individu, perilaku sosial, maupun perilaku institusional yakni kebijakan-kebijakan institusi/kelembagaan yang tidak melanggar akhlak dan pekerti.

8.4. Sasaran

a. Terwujudnya Jatidiri Bangsa

Penyusunan strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa memberikan gambaran terwujudnya jatidiri bangsa.

b. Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Kerangka Multikulturalisme

Penyusunan strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa harus menjamin persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka multikulturalisme, yaitu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama.

c. Kesejahteraan Rakyat dan Persahabatan Bangsa

Penyusunan strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa harus menjamin kesejahteraan rakyat dan persahabatan bangsa.

8.5. Rumusan Konsep PKPB

8.5.1. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Tujuan

a. Demokratis

Pembangunan karakter dan pekerti bangsa dilakukan dengan mengindahkan hak-hak demokrasi dan prinsip masyarakat sipil (*civil society*) yang bebas dari tekanan dan terbuka.

b. Partisipatif-emansipatoris

Pembangunan karakter dan pekerti bangsa disusun bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dengan mengutamakan pemberdayaan terhadap mereka yang lemah.

c. Kebebasan Pilihan

Pembangunan karakter dan pekerti bangsa adalah masalah pilihan sehingga tidak boleh menggunakan cara-cara paksaan atau indoktrinasi.

d. Pluralitas Serumpun

Pembangunan karakter dan pekerti bangsa mengakui perbedaan nilai-nilai kultural pada suku bangsa-suku bangsa yang pada hakikatnya adalah serumpun.

e. Keteladanan

Pembangunan karakter dan pekerti bangsa didasarkan atas keteladanan, yakni mengacu pada nilai-nilai luhur sebagaimana sebagai sebuah pedoman.

8.5.2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Proses

a. Keterwakilan.

Adanya keterwakilan dari berbagai kelompok atau pun lapisan masyarakat yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan strategi pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

b. Akuntabilitas.

Adanya proses dan mekanisme pertanggungjawaban atas kemajuan, hambatan, capaian, hasil dan manfaat terkait dengan strategi pembangunan yang diturunkan melalui program-programnya. Yaitu dilihat dari sudut pandang pihak pemerintah dan dari masyarakat. Selain itu mekanisme terkait dengan pembiayaan implementasi program-program.

c. Keterpaduan (sinergis).

Adanya sinergi dan keterkaitan yang terpadu antarpihak (instansi pemerintah, non-pemerintah, kalangan masyarakat, dll) dalam pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

d. Kontinuitas (keberlanjutan).

Pembangunan karakter dan pekerti bangsa harus menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

e. Kebersamaan.

Pembangunan karakter dan pekerti bangsa merupakan menjadi tanggung jawab bersama dilakukan dengan keterlibatan aktif semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

8.6. Strategi Utama

Strategi utama adalah: *menjadikan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa sebagai bagian dari kepentingan nasional yang melibatkan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.*

8.7. Kebijakan PKPB

8.7.1. Rumusan Kebijakan PKPB

1. Menjalini-mengembangkan kerjasama instansi/departmen serta kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pembangunan karakter dan pekerti bangsa

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

2. Peningkatan kesadaran, minat, perhatian, dan keseriusan masyarakat mengenai pentingnya pembangunan karakter dan pekerti bangsa
3. Peningkatan kesadaran, minat, perhatian, dan keseriusan masyarakat mengenai pentingnya memelihara kebudayaan multikultural (pluralisme serumpun) di berbagai daerah untuk membina akar nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa secara nasional.
4. Penyelenggaraan revitalisasi pendidikan karakter dan pekerti di sekolah-sekolah.
5. Penguatan payung hukum untuk upaya-upaya pembangunan karakter dan pekerti bangsa
6. Penumbuhan dan pembinaan kerjasama dengan media massa sebagai saluran nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa.
7. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dan studi lokal, nasional, regional dan internasional di bidang pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

8.7.2. Rumusan Strategi PKPB

Berdasarkan Bidang:

- Struktural: pembangunan jaringan kerja (*networking*) dan kelembagaan pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
- Pendidikan : revitalisasi pendidikan karakter dan pekerti bangsa
- Media Massa: revitalisasi media cetak & media elektronik sebagai saluran penyampai pesan-pesan pembangunan karakter dan pekerti bangsa

Berdasarkan Jangka Waktu:

- Strategi Jangka pendek: meletakkan dasar-dasar sistematis bagi upaya pembangunan karakter dan pekerti bangsa ke depan.
- Strategi Jangka Menengah: membangun dan menciptakan perangkat-perangkat infrastruktur dan penguatan kelembagaan.
- Strategi Jangka Panjang: terwujudnya jatidiri bangsa melalui pembangunan karakter dan pekerti yang berasaskan integritas dan nilai-nilai luhur.

8.7.3. Jabaran Program Strategis PKPB

Tabel 8.17. Jabaran Program Aksi

JABARAN PROGRAM-PROGRAM AKSI				
	PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	Perkiraan Jangka Waktu
JANGKA PENDEK	STUDI-studi/kajian pembangunan karakter dan pekerti bangsa dari berbagai sudut pandang keilmuan	WORKSHOP-workshop untuk menyamakan visi dan tujuan bersama stakeholder	LEGAL DRAFTING untuk mewujudkan payung hukum yang kuat bagi pembangunan karakter dan pekerti bangsa	1-5 tahun
JANGKA MENENGAH	PROGRAM-program di bidang pendidikan PROGRAM-program di bidang pemberdayaan masyarakat PROGRAM-program hubungan antar lembaga	PROGRAM sosialisasi nilai-nilai karakter dan pekerti bangsa melalui: 1. Keluarga 2. Medium kesenian tradisi 3. Medium kesenian modern	PROGRAM kerjasama stakeholder untuk membangun <i>networking</i> pembangunan karakter dan pekerti bangsa	5-10 tahun
JANGKA PANJANG	<i>Program yang Berkaitan dengan titik-tolak tradisi</i>	<i>Program yang berkaitan dengan Pengembangan tradisi baru</i>	<i>Program yang berkaitan dengan Penciptaan Konteks Sosial-Ekonomi-Politik yang Mendukung Munculnya Karakter dan Pekerti</i>	25 tahun
APLIKASI MODEL GENERIK	Program-program menghidupkan nilai-nilai yang penting namun telah berkurang	Program-program mengikis/mereorientasikan nilai-nilai yang tidak sesuai perkembangan	Program-program memperkuat nilai-nilai positif yang telah berkembang	-

8.7.4. Rumusan Program Aksi PKPB

8.7.4.1. Rencana Aksi Jangka Pendek

1. *Rencana Aksi Studi/Kajian PKPB*

TUJUAN: Membentuk dan memperkokoh bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) karakter dan pekerti bangsa yang berbasis nilai-nilai lokal kesuku bangsaan maupun nilai-nilai luhur nasional (Pancasila).

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Tabel 8.18. Rencana Aksi Studi Jangka Pendek

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya kajian-kajian karakter dan pekerti nasional maupun lokal dengan pemahaman multikultural berdasarkan prinsip <i>pluralisme serumpun</i>	1. Jumlah studi / kajian karakter dan pekerti bangsa berdasarkan nilai-nilai kesuku bangsa	Mendukung dan/atau melaksanakan kajian-kajian PKPB berbasis nilai-nilai lokal maupun nasional	Pengkajian karakter dan pekerti lokal berdasarkan folklor, mitologi, kesenian, dan filologi setempat	Depbudpar
	2. Jumlah studi/kajian karakter dan pekerti bangsa berdasarkan nilai-nilai nasional kebangsaan		Pengkajian karakter dan pekerti lokal dari aspek sosiologi, psikologi, pendidikan, kebudayaan.	
			Pengkajian karakter dan pekerti nilai-nilai nasional (Pancasila) dari aspek sosiologi, psikologi, pendidikan, kebudayaan, filsafat.	Depbudpar, Depdagri, Dephankam
Meningkatnya kajian-kajian dengan pendekatan berbasis lokal (<i>pilot project</i>) terutama bersifat <i>action research</i>	1. Jumlah kajian <i>action research</i> berbasis lokal	Mendukung dan/atau melaksanakan kajian <i>action research</i> PKPB	Pelaksanaan <i>Action research</i> di suatu kluster/ daerah	Depbudpar, Pemd, Masyarakat Adat
	2. Jumlah kajian penerapan Pancasila berbasis lokal		Sosialisasi hasil-hasil <i>action research</i> ke tingkat lokal maupun nasional	
Menurunnya ketegangan prasangka antar suku bangsa	a. Tingkat prasangka kesuku bangsa khususnya di daerah potensi konflik	Meningkatkan saling pengertian antar suku bangsa berdasarkan nilai toleransi dan tenggang-rasa	Kampanye nilai-nilai kerukunan antar suku bangsa	Depbudpar, Depkominfo, Depdagri, Dephankam
			Sosialisasi keragaman nilai-nilai karkater dan pekerti antar suku bangsa	
	b. Jumlah kejadian prasangka kesuku bangsa		Mendukung dan membangun terbentuknya forum-forum pertemuan antar suku bangsa	

2. Rencana Aksi Workshop PKPB

TUJUAN: Membangun kesamaan persepsi dan tujuan di antara *stakeholder* PKPB (pemerintah, masyarakat, sektor privat).

Tabel 8.19 Rencana Aksi Workshop

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya kesamaan persepsi dan visi di antara <i>stakeholder</i> PKPB melalui <i>workshop</i> yang mengkaji tema-tema PKPB	a. Persepsi dan visi PKPB pada masing-masing <i>stakeholder</i>	Mengupayakan adanya kesamaan persepsi dan visi di antara <i>stakeholder</i> PKPB melalui pengkajian PKPB secara tematik	Mempertemukan persepsi dan visi yang sama di antara <i>stakeholder</i> PKPB	Depbudpar dan <i>stakeholder</i> terkait
	b. Kesamaan dan perbedaan persepsi dan visi		Mengurangi perbedaan persepsi dan visi di antara <i>stakeholder</i> PKPB	
Meningkatnya kerjasama sinergis <i>stakeholder</i> PKPB	c. Jumlah dan kualitas <i>workshop</i>			
	a. Peluang kerjasama sinergis	Meningkatkan aspek sinergis kerjasama para <i>stakeholder</i> PKPB	Membangun model-model kerjasama yang saling menguntungkan para <i>stakeholder</i> PKPB	
	b. Kelemahan dan kekuatan dalam skema kerjasama yang disusun	Mengurangi aspek non-sinergis kerjasama para <i>stakeholder</i> PKPB	Mercalisasikan kerjasama dalam bentuk-bentuk yang kongkrit	Penyelesaian perbedaan kepentingan para <i>stakeholder</i> PKPB secara <i>win-win solution</i>

3. Rencana Aksi Legal Drafting

TUJUAN: Membentuk payung hukum yang kuat dari mulai level kebijakan nasional hingga implementasinya pada tingkat kebijakan departemen, pemerintah daerah, dan badan pemerintah; khususnya yang bertujuan jangka panjang.

Tabel 8.20 Rencana Aksi Legal Drafting

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya jaminan payung hukum untuk program-program PKPB	1. Jumlah peraturan dan perundang-undangan terkait PKPB	Mempelajari secara menyeluruh skema peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan PKPB	Penyelenggaraan kajian hukum perundang-undangan PKPB Skema <i>legal drafting</i> yang dibutuhkan ke depan	Depbudpar
		Melakukan pemberian dukungan kepada upaya-upaya legalisasi PKPB dalam berbagai aspeknya	Sosialisasi legislasi PKPB	Depbudpar, Depkominfo
	Kampanye urgensi legislasi PKPB		Depbudpar, Depkominfo	
	Dukungan kelembagaan kepada pihak-pihak yang sedang memperjuangkan legislasi PKPB		Depbudpar, Dekominfo, Depsos, Depdagri, departemen/instansi terkait	
Meningkatnya pelaksanaan <i>law enforcement</i> untuk program-program PKPB	Implementasi pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan PKPB	Menindak-lanjuti perangkat perundang-undangan PKPB yang sudah disahkan	Penyusunan peraturan/memorandum/kerjasama yang diamanatkan UU	Depbudpar, Depdagri, Dep. Kehakiman
		Pemberian dukungan terhadap keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan PKPB	Sosialisasi peraturan perundang-undangan PKPB Pembinaan unsur-unsur kemasyarakatan dalam mengimplementasikan PKPB	Depbudpar, Depkominfo Depbudpar, Depdagri, Dep. Kehakiman
		Menyempurnakan perangkat infrastruktur implementasi peraturan perundang-undangan PKPB	Pemberian/penyediaan dukungan sumberdaya pelaksanaan PKPB	Depbudpar dan seluruh <i>stakeholder</i> PKPB

8.7.4.2. Rencana Aksi Jangka Menengah

1. Rencana Aksi Bidang Pendidikan

TUJUAN: Memenuhi kebutuhan porsi pendidikan karakter dan pekerti melalui medium sekolah dan luar sekolah

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Tabel 8.21 Rencana Aksi Bidang Pendidikan

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya kualitas pendidikan karakter dan pekerti di sekolah	1. Jumlah jam pelajaran karakter dan pekerti	Mengupayakan pelajaran karakter dan pekerti dilaksanakan di sekolah (SD, SMP, SLTA)	Pelaksanaan pendidikan karakter dan pekerti secara kognitif, afektif, konatif dan pembiasaan	Depbudpar, Depdiknas
		Mendukung ketersediaan bahan ajar pendidikan karakter dan pekerti	Penyusunan kurikulum pendidikan karakter dan pekerti Penerbitan buku dan bahan bacaan pendukung pendidikan karakter dan pekerti	
	3. Jumlah dan jenis buku pelajaran karakter dan pekerti serta bahan-bahan pendukungnya	Merintis pendidikan karakter dan pekerti berdasarkan nilai-nilai lokal (muatan kurikulum lokal)	Identifikasi dan inventarisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk muatan kurikulum lokal pendidikan karakter dan pekerti	
			Penerbitan buku dan bahan bacaan pendukung bermuatan nilai-nilai lokal	
			Sosialisasi dan kerjasama antar lembaga masyarakat adat	
	Meningkatnya dukungan pendidikan karakter dan pekerti di luar sekolah	1. Jumlah partisipan yang mendukung pendidikan karakter dan pekerti di luar sekolah	Menggalang dukungan pendidikan karakter dan pekerti di luar sekolah	Kampanye dukungan lembaga-lembaga formal
Kampanye dukungan informal masyarakat				
Kampanye dukungan sektor privat				
2. Kualitas pendidikan karakter dan pekerti di luar sekolah		Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan pekerti di luar sekolah	Penyediaan metode monitoring dan evaluasi pendidikan karakter dan pekerti di luar sekolah	
	Penyiapan sarana dan prasarana pendukung pendidikan karakter dan pekerti di luar sekolah			

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Mengintegrasikan pendidikan karakter dan pekerti sebagai bagian dari penanaman bela negara dan ketahanan nasional	a. Efektivitas Pendidikan karakter dan pekerti sebagai bagian dari penanaman bela negara dan ketahanan nasional	Pengembangan sistem pendidikan karakter dan pekerti yang terintegrasi dengan penanaman bela negara dan ketahanan nasional	Penyusunan kurikulum dan materi pendidikan karakter dan pekerti sebagai bagian dari penanaman bela negara dan ketahanan nasional	Depbudpar, Depdiknas, Dephankam
	b. Kualitas Pendidikan karakter dan pekerti sebagai bagian dari penanaman bela negara dan ketahanan nasional		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung	
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan pekerti sebagai bagian dari penanaman bela negara dan ketahanan nasional	

2. Rencana Aksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

TUJUAN: Memungkinkan (*enabling*) partisipasi masyarakat dalam membangun secara mandiri bidang karakter dan pekerti bangsa.

Table 8.22 Rencana Aksi Bid. Pemberdayaan Masyarakat

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	
Meningkatnya peluang partisipasi masyarakat dalam program-program PKPB	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program PKPB	Penyediaan peluang-peluang partisipasi masyarakat dalam program PKPB	Revitalisasi peran masyarakat dalam program-program PKPB	Depbudpar	
	2. Kualitas partisipasi masyarakat dalam program-program PKPB		Pengembangan program-program PKPB yang berasas kemandirian masyarakat		
Meningkatnya kelembagaan swadaya masyarakat di bidang PKPB	1. Jumlah lembaga swadaya masyarakat di bidang PKPB	Penguatan kelembagaan masyarakat di bidang PKPB	Penguatan jejaring kelembagaan di tingkat nasional	Depbudpar, Dekominfo, Depsos, Depdagri, departemen/ instansi terkait	
	2. Kualitas kelembagaan		Penguatan jejaring kelembagaan di tingkat daerah		Depbudpar, Depdagri, Pemda
					Penguatan kelembagaan di tingkat lokal

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

3. Rencana Aksi Bidang Hubungan Antar Lembaga

TUJUAN: Membantu untuk terciptanya pola hubungan antar lembaga yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan akhlak pemerintahan yang bebas KKN.

Tabel 8.23 Rencana Aksi Hubungan Antar Lembaga

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH/KEBIJAKAN	PELAKSANA
Menurunnya budaya-budaya negatif dalam hubungan antar lembaga (KKN)	1. Tingkat budaya negatif dalam hubungan antar lembaga	Mencegah subur-berkembangnya budaya-budaya negatif dalam hubungan antar lembaga	Negative campaign terhadap budaya negatif	Semua stakeholder PKPB
	2. Jumlah peristiwa budaya negatif hubungan antar lembaga		Menyusun strategi <i>reward-punishment</i> secara pendekatan budaya (budaya malu dan rasa bersalah)	
			Sosialisasi nilai-nilai karakter dan pekerti lokal yang mendukung pencegahan budaya-budaya negatif	
Meningkatnya penerapan <i>good governance</i> dalam hubungan antar lembaga	1. Tingkat implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Mendukung penerapan secara konsisten prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam hubungan antar lembaga	Kampanye dukungan penerapan <i>good governance</i> dan akhlak pemerintahan yang baik berdasarkan nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai luhur Nasional	Semua stakeholder PKPB
	2. Tingkat penyimpangan dari prinsip-prinsip <i>good governance</i>		Kampanye pengawasan publik terhadap penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> d	

4. Rencana Aksi Sosialisasi Melalui Keluarga

TUJUAN: Menghidupkan kembali dan meningkatkan fungsi keluarga sebagai sarana sosialisasi pertama dalam pembentukan karakter dan pekerti individu

5. Rencana Aksi Sosialisasi Melalui Medium kesenian Tradisi

TUJUAN: Menghidupkan kembali dan meningkatkan fungsi kesenian tradisi sebagai sarana pembentukan karakter dan pekerti.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Tabel 8. 25 Rencana Aksi Sosialisasi Medium Kesenian Tradisi

TARGET	INDIKATOR	KEBUTUHAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya penggunaan dan eksplorasi medium kesenian tradisi sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	1. Jenis-jenis kesenian tradisi yang dapat dijadikan sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	Inventarisasi dan pemetaan jenis-jenis kesenian tradisi yang sesuai untuk wahana pembangunan karakter dan pekerti	Pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan berdasarkan wilayah / kluster kebudayaan	Depbudpar, Pemda, Masyarakat Adat
			Penelitian nilai-nilai lokal yang sesuai untuk pembangunan karakter dan pekerti secara nasional	
	2. Tingkat efektivitas pembangunan karakter dan pekerti melalui wahana kesenian tradisi	Dukungan terhadap jenis-jenis kesenian tradisi yang sesuai untuk wahana pembangunan karakter dan pekerti	Penyediaan dukungan sarana dan prasarana bagi kemajuan kelompok-kelompok kesenian tradisi	
			Promosi kesenian tradisi sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	
Meningkatnya kualitas kesenian tradisi sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	Tingkat kualitas kesenian tradisi sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	Mendukung peningkatan kualitas kesenian tradisi sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	Program peningkatan kualitas kesenian tradisi sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	
			Pemberian subsidi bagi peningkatan kualitas kesenian tradisi	

6. *Rencana Aksi Sosialisasi Melalui Medium Kesenian Modern*

TUJUAN: Menghidupkan kembali dan meningkatkan fungsi kesenian tradisi sebagai sarana pembentukan karakter dan pekerti.

Tabel 8.26 Rencana Aksi Sosialisasi Melalui Medium Kesenian Modern

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya penggunaan dan eksplorasi medium kesenian modern sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	1. Jenis-jenis kesenian modern yang dapat dijadikan sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	Revitalisasi kesenian modern sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	Pemanfaatan kesenian modern sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti Pembinaan terhadap cabang-cabang kesenian	Depbudpar
	2. Tingkat efektivitas pembangunan karakter dan pekerti melalui wahana kesenian modern	Dukungan terhadap jenis-jenis kesenian modern yang sesuai untuk wahana pembangunan karakter dan pekerti	Penyediaan dukungan sarana dan prasana kepada individu/kelompok-kelompok kesenian modern Promosi kesenian modern sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	
Meningkatnya kualitas kesenian modern sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	1. Tingkat kualitas kesenian tradisi sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	Mendukung peningkatan kualitas kesenian modern sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	Program peningkatan kualitas kesenian tradisi sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti	Depbudpar
			Pemberian subsidi bagi peningkatan kualitas kesenian tradisi Promosi kesenian modern sebagai wahana pembangunan karakter dan pekerti melalui media audio-visual	

7. Rencana Aksi Kerjasama Stake-Holder

TUJUAN: Membentuk payung kerjasama *stakeholder* mulai dari level nasional hingga ke tingkat departemen, pemerintah daerah, dan badan pemerintah dengan masyarakat dan sektor privat.

Tabel 8.27 Rencana Aksi Kerjasama Stakeholder

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya hubungan antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat untuk mendukung PKPB	1. Frekuensi /intensitas hubungan antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat	Meningkatkan hubungan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat	Mengintensifkan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat Memperkaya bentuk-bentuk hubungan sinergis	Depbudpar dan <i>stakeholder</i> terkait
	2. Kualitas hubungan antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat dalam mendukung PKPB	Perluasan hubungan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat	Penyebaran jejaring kerjasama kepada pihak-pihak yang belum terlibat	
		Pembinaan hubungan sinergis yang berhasil dibangun antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat	Sosialisasi hasil-hasil pertemuan antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat	
Meningkatnya kerjasama antar <i>stakeholder</i> PKPB dalam bentuk <i>joint-programme</i> maupun kerjasama fungsional	1. Intensitas kerjasama antar <i>stakeholder</i> PKPB	Revitalisasi forum-forum kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat yang telah ada	Program-program kerjasama riil antar <i>stakeholder</i> PKPB	
	2. Kualitas kerjasama antar <i>stakeholder</i> PKPB	Menciptakan wadah-wadah baru kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat		
		Implementasi kerjasama yang berkualitas		

8.7.4.3. Rencana Aksi Jangka Panjang

Rencana Aksi jangka panjang tidak dirumuskan secara terperinci di sini, untuk menghindari pengulangan. Alasannya adalah, karena rencana aksi jangka panjang merupakan kelanjutan berkesinambungan dari implementasi rencana-rencana aksi pada strategi jangka pendek dan jangka menengah sebagaimana telah terurai di atas.

8.7.4.4. Rencana Aksi Aplikasi Model Genetik

1. Sumber Nilai: Nilai Adat Bersumber dari Nilai Agama

TUJUAN: Membentuk kembali karakter bangsa Indonesia sebagai masyarakat religius melalui penguatan nilai adat bersumber dari agama.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Tabel 8.28 Rencana Aksi Aplikasi Model Generik

(Sumber Nilai: Nilai Adat Bersumber dari Nilai Agama)

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Berkurangnya <i>gap</i> antara kondisi ideal (Nilai Adat Bersumber dari Nilai Agama) dan kondisi riil (rendahnya penerapan nilai adat bersumber agama)	1. Tingkat penghayatan nilai-nilai keagamaan dalam pelaksanaan adat-istiadat 2. Kondisi kesesuaian adat dan nilai-nilai agama	Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal berdasarkan adat-istiadat Peningkatan peran serta tokoh-tokoh agama untuk turut membangun nilai-nilai lokal berdasarkan adat-istiadat Revitalisasi nilai-nilai religius yang terkandung dalam adat-istiadat	Pengembangan model pembangunan karakter dan pekerti yang menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal	Depbudpar, Pemda, Depag, masyarakat Adat
			Pengakuan dan peningkatan peran masyarakat adat dalam pembangunan karakter dan pekerti, khususnya implementasi program di tingkat lokal	
			Perluasan, revitalisasi, dan rekontekstualisasi nilai-nilai lokal agar sesuai perkembangan saman, tanpa merusaknya	
			Revitalisasi peran tokoh-tokoh agama dalam turut membangun adat-istiadat setempat	
			Penelitian dan inventarisasi nilai-nilai adat-istiadat bernafas religius Sosialisasi nilai-nilai adat-istiadat bernafas religius	
Meningkatnya peran agama sebagai katalisator toleransi sosial	1. Tingkat kerukunan beragama lokal 2. Tingkat kerukunan beragama nasional	Pembinaan kerukunan beragama di tingkat lokal dan nasional Pengurangan potensi konflik agama	Revitalisasi nilai-nilai agama sebagai katalisator toleransi sosial	Depbudar, Depag, Depdagri
			Sosialisasi nilai-nilai kerukunan agama di tingkat lokal dan nasional	
		Pembentukan wadah-wadah kerukunan beragama		

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

2. Nilai Dasar Hidup: Malu

TUJUAN: Menghidupkan kembali budaya malu dan diperkuat dengan budaya rasa bersalah (*feeling guilty*) sebagai perwujudan tanggung-jawab atas tindakan yang menyebabkan malu tersebut.

Tabel 8.29 Nilai Dasar Hidup: MALU

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya budaya malu dalam peri kehidupan pribadi, sosial maupun berbangsa-bernegara	1. Tingkat penerapan budaya malu dalam peri kehidupan pribadi, sosial maupun berbangsa-bernegara	Peningkatan dan sosialisasi budaya malu secara nasional	Kampanye budaya malu secara nasional Sosialisasi nilai Malu sebagai nilai-nilai yang berakar pada budaya lokal bangsa	Depbudpar, Depdiknas, Depkominfo
		Penguatan budaya malu sebagai praktek dalam kehidupan individu, sosial maupun berbangsa-bernegara	Intensifikasi penerapan budaya malu dalam peri kehidupan pribadi, sosial maupun berbangsa-bernegara	
	2. Efektivitas budaya malu dalam mengurangi perilaku negatif	Mengembangkan kode etik rasa malu sebagai standar perilaku nasional		
Meningkatnya budaya rasa bersalah (<i>feeling guilty</i>) dalam mempertanggung-jawabkan tindakan yang menyebabkan rasa malu tersebut	1. Tingkat penerapan budaya rasa bersalah mempertanggung-jawabkan tindakan yang menyebabkan rasa malu	Peningkatan budaya bersalah secara nasional	Kampanye budaya rasa bersalah secara nasional Penelitian dan inventarisasi nilai-nilai lokal yang mendukung budaya rasa bersalah	Depbudpar, Depdiknas, Depkominfo
		Penguatan praktek budaya rasa bersalah sebagai bentuk tanggung-jawab terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa malu	Intensifikasi penerapan budaya rasa bersalah dalam peri kehidupan pribadi, sosial maupun berbangsa-bernegara	
	2. Efektivitas budaya rasa bersalah dalam mengurangi perilaku negatif	Mengembangkan kode etik rasa bersalah sebagai standar perilaku nasional		

3. Tertib Sosial : Keseimbangan

TUJUAN: Membangun suasana tertib sosial yang berdasarkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tabel 8.30 Tertib Sosial: Keseimbangan

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya tertib sosial berdasarkan keseimbangan (Manusia-Tuhan-Alam) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa-bernegara	1. Kondisi tertib-sosial di tingkat lokal	Pengembangan tertib-sosial berdasarkan keseimbangan dalam bermasyarakat dan berbangsa-bernegara	Kampanye tertib-sosial secara nasional	Depbudpar
	2. Kondisi tertib-sosial di tingkat nasional		Sosialisasi tertib sosial berdasarkan hubungan keseimbangan Manusia-Tuhan-Alam	
	3. Kondisi keseimbangan Manusia-Tuhan-Alam	Penguatan praktek tertib sosial berdasarkan keseimbangan dalam bermasyarakat dan berbangsa-bernegara	Kampanye tertib sosial dalam praktek bermasyarakat dan berbangsa-bernegara	
			Peningkatan budaya disiplin dan tertib Kampanye budaya antri, menjaga kebersihan di lokasi-lokasi publik, dll	
Berkurangnya disharmoni dan gejolak sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa-bernegara	1. Tingkat disharmoni sosial dan gejolak sosial dalam satu kurun waktu	Pengurangan potensi disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa-bernegara	Identifikasi potensi disharmoni dan kerawanan sosial di tingkat lokal maupun nasional	Depbudpar, Dephankam, Depsos
	2. Jumlah peristiwa konflik dan gejolak sosial vertikal dan horizontal dalam suatu kurun waktu		Langkah-langkah pengurangan/ penghapusan potensi disharmoni dan kerawanan sosial	
	3. Jumlah korban jiwa dan jarta akibat gejolak dan konflik sosial	Pengurangan potensi gejolak sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa-bernegara	Identifikasi potensi konflik dan gejolak sosial di tingkat lokal maupun nasional	
			Langkah-langkah pengurangan/ penghapusan konflik dan gejolak sosial	
	4. Persentase penyelesaian konflik yang bisa berakhir damai	Penyelesaian konflik sosial vertikal dan horizontal secara adil, berkemanusiaan, dan tuntas	Pengembangan model-model penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	
			Pembinaan pasca penyelesaian konflik	

4. Hubungan dengan Orang Lain : Tenggang Rasa

TUJUAN: Menghidupkan kembali karakter dan nilai tenggang rasa dalam hubungan dengan pihak-pihak yang berlainan identitas (*the Other*) baik karena adanya perbedaan agama, suku maupun ras.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Tabel 8.31 Hub. Dengan Orang Lain : Tenggang Rasa

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	TANGGAH KEBIJAKAN	PELAKSIAN
Meningkatnya sikap tenggang rasa terhadap pihak yang berbeda	1. Tingkat toleransi terhadap perbedaan 2. Jumlah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan toleransi terhadap pihak yang berbeda	Penyebarluasan nilai-nilai tenggang rasa dan toleansi	Revitalisasi ciri bangsa yang ramah, sopan dan tenggang-rasa	Depbudpar, Depdiknas
			Penyusunan <i>Role modeling</i> tenggang rasa dan toleransi sosial	
		Penguatan sikap tenggang rasa dalam kehidupan pribadi, sosial maupun berbangsa-bernegara	Kampanye toleransi dan tenggang rasa secara nasional maupun lokal	
			Penanaman nilai tenggang rasa di sekolah, tempat pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, dan sarana publik (bis kota, kereta api, rumah sakit, dll)	
Berkurangnya prasangka terhadap pihak yang berbeda	1. Tingkat prasangka sosial terhadap kelompok yang berbeda 2. Jumlah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan prasangka terhadap pihak yang berbeda	Peningkatan pemahaman terhadap pihak yang berbeda	Peningkatan pengetahuan tentang keragaman nilai-nilai suku bangsa dan agama	Depbudpar, Masyarakat Adat, Pemda, Depdagri
			Sosialisasi perbedaan nilai-nilai suku bangsa dan agama	
			Sosialisasi pengurangan/ penghapusan stereotype negatif antar suku bangsa	
		Pengembangan toleransi perbedaan dalam praktek kehidupan	Pencegahan diskriminasi berdasarkan agama, suku dan ras	
			Pengembangan forum-forum kebersamaan untuk menghilangkan perbedaan dan prasangka	

5. Hubungan dengan Sistem Sosial : Adaptif dan Tahu diri

TUJUAN: Membangun dan menanamkan sikap dan karakter adaptif-tahudiri dalam rangka menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial yang majemuk.

Tabel 8.32 Hub. Dengan Sistem Sosial: Adaptif dan Tahu Diri

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya sikap adaptif-tahudiri khususnya dalam peri kehidupan sosial yang majemuk	1. Tingkat adaptasi dalam situasi sosial yang berbeda 2. Jumlah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kemampuan adaptasi dalam lingkungan yang berbeda	Pengembangan ciri-ciri mental adaptif dan tahu menyesuaikan diri Penguatan sikap adaptif dalam kehidupan pribadi, sosial maupun berbangsa-bernegara	Revitalisasi nilai-nilai adaptasi sosial yang berdasarkan kearifan budaya lokal	Depbudpar, Depdiknas, Masyarakat Adat
			Sosialisasi karakter adaptif	
			Pendidikan adaptasi sosial sejak dini Penanaman kolaborasi/kerjasama dalam lingkungan sosial berbeda	
Berkurangnya sikap tidak mau menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial yang berbeda	1. Tingkat ketidakmampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang berbeda 2. Jumlah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan sikap tidak mau menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial yang berbeda	Meningkatkan pemahaman terhadap tuntutan situasi sosial yang berbeda-beda	Peningkatan pengetahuan mengenai ragam sosial dan cara-cara beradaptasi dengannya	Depbudpar, Depdiknas, Depsos, Masyarakat Adat
			Eksplorasi nilai-nilai baru melalui pertemuan dalam konteks sosial berbeda	
		Perluasan/ ekstentifikasi kemampuan adaptasi dalam rentang pergaulan sosial yang beraneka-ragam	Pengembangan dan revitalisasi forum-forum komunikasi antar kelompok sosial (arisan, rukun warga, dll)	
			Kampanye kesetiakawanan sosial Kerjasama sosial dengan anggota berbeda status dan nilai sosialnya	

6. **Kehormatan Diri** : Menjaga Harga Diri

TUJUAN: Membangun dan mengarahkan secara positif karakter dan nilai Harga Diri sebagai sarana menjaga martabat dan kehormatan diri, keluarga maupun orang lain.

Tabel 8.33 Tabel Kehormatan Diri: Menjaga Harga Diri

INDIKATOR	DEMIKSI/PROB	REBIKAL/D	LANGKAH REBIKAL/D	PETA REBIKAL/D
Meningkatnya sikap Menjaga Harga Diri sebagai sarana memelihara martabat dan kehormatan diri, keluarga maupun orang lain	1. Batas toleransi dalam rangka memelihara martabat dan harga diri 2. Tingkat rasa hormat terhadap harga diri dan martabat orang lain/sesama	Mengakui dan menghormati perbedaan nilai-nilai lokal dalam menjaga harga diri/kehormatan	Revitalisasi nilai-nilai adat istiadat yang mendukung kehormatan dan harga diri secara positif	Depbudpar
			Pengembangan model karakter dan pekerti berdasarkan aspek harga diri yang positif	
			Kajian rekontekstualisasi nilai kearifan lokal menjaga harga diri untuk konteks modern (mencari ilmu, kerja keras, persaingan sehat, dll)	
			Kampanye menjaga harga diri/kehormatan untuk maksud-maksud positif	
Berkurangnya sikap Menjaga Harga Diri sebagai sarana pelampiasan egoisme buta dan emosional	1. Frekuensi peristiwa konflik yang disebabkan harga diri 2. Persentase peristiwa konflik yang menjerus kepada tindak kekerasan 3. Jumlah korban kekerasan akibat konflik harga diri	Pemahaman situasi sosial yang lebih lentur untuk menempatkan harga diri/kehormatan secara proporsional	Sosialisasi pengurangan aspek negatif harga diri/kehormatan	Depbudpar, Dephankam, Depsos
			Sosialisasi secara arif tentang keragaman nilai-nilai adat dalam hal harga diri/kehormatan	
			Peran serta pemangku adat dalam penegakan hukum	
			Pemulihan konflik berbasis nilai-nilai lokal	

7. Kepemimpinan : Pemimpin adalah Panutan

TUJUAN: Menghidupkan nilai Kepemimpinan sebagai Panutan, sebagai suatu acuan bersikap dan berperilaku masyarakat, baik pada level kepemimpinan formal maupun informal.

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Tabel 8.34 Kepemimpinan: Pemimpin adalah Panutan

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya fungsi kepemimpinan sebagai panutan dalam masyarakat dan berbangsa-bernegara	Tingkat apresiasi masyarakat terhadap pemimpin Efektivitas fungsi kepemimpinan di tingkat lokal dan tingkat nasional	Penguatan kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional	Revitalisasi peran kepemimpinan formal dan informal	Depbudpar, Depdiknas, Dephankam
			Pengembangan sistem kepemimpinan berdasarkan perpaduan kearifan lokal dan nilai-nilai modern	
		Pengembangan nilai-nilai dan fungsi kepemimpinan dalam kehidupan pribadi, sosial dan berbangsa-bernegara	Penyusunan <i>role-modeling</i> nilai-nilai kepemimpinan sebagai panutan	
			Penerapan praktek kepemimpinan dalam perilaku individual, sosial dan berbangsa-bernegara Sosialisasi dan kampanye nilai-nilai kepemimpinan secara nasional	
Berkurangnya sikap kepemimpinan yang memberikan panutan/contoh negatif dalam masyarakat dan berbangsa-bernegara	Jumlah peristiwa skandal kepemimpinan Kondisi hilangnya panutan pemimpin Persepsi terhadap efektivitas fungsi kepemimpinan dalam masyarakat	Redefinisi arti dan fungsi kepemimpinan sesuai konteks perubahan saat ini	Kajian/studi kepemimpinan dalam konteks Indonesia saat ini	Depbudpar, Depdiknas, Dephankam
			Penyebar-luasan indikator-indikator kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan dalam masyarakat	
		Pemahaman kepemimpinan	Pengembangan standar etika kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal maupun nasional (Pancasila)	
			Revitalisasi pendidikan kepemimpinan sejak dini melalui kegiatan sekolah maupun organisasi ekstrakurikuler (pramuka, pencinta alam, palang merah, dll) Pengembangan nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kekayaan khasanah kearifan lokal serta kajian tokoh-tokoh sejarah bangsa	

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

8. Etos Kerja : Kerja Keras dan Kreatif

TUJUAN: Mendukung dan memperkuat nilai etos kerja keras dan kreatif sebagai sarana untuk memperjuangkan perbaikan kondisi individual maupun masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 8.35 Etos Kerja: Kerja Keras Dan Kreatif

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya etos kerja keras dan kreatif dalam kehidupan pribadi, sosial maupun berbangsa-bernegara	1. Tingkat produktivitas nasional yang diukur dari jam kerja per minggu, rasio output/ input, dll. 2. Laju mobilitas sosial dalam suatu kurun waktu 3. Tingkat penghargaan terhadap pencapaian (<i>achievement</i>) berdasarkan kerjakeras dibandingkan 'nasib baik'	Pengembangan etos kerja keras sebagai bagian disiplin nasional	Sosialisasi dan kampanye etos kerja keras dan kreatif	Depbudpar, Bapenas, Depdiknas, Masyarakat Adat, Dep. Pemuda dan Olahraga
			Pembentukan <i>role-modeling</i> etos kerja keras dan kreatif baik secara populer maupun ideal	
			Revitalisasi nilai-nilai kerja keras dan kreatif dalam adat-istiadat lokal	
			Penghargaan terhadap keberhasilan yang dicapai melalui kerja keras dan kreativitas	
			Kampanye mentalitas Indonesia Baru yang didasarkan atas penghargaan terhadap waktu, kerja keras dan disiplin	
			Penanaman rasa penghargaan terhadap prestasi dan kreativitas	
Berkurangnya sikap malas dan budaya <i>jalan pintas</i> untuk mencapai kesuksesan tanpa kerja keras	Efektivitas penegakan aturan-aturan main dalam bidang usaha Angka pengangguran nasional Jumlah peristiwa yan mencerminkan sikap malas dan mental <i>jalan pintas</i>	Pengikisan sikap malas dan budaya <i>jalan pintas</i> sebagai metode mencapai kesuksesan hidup	<i>Negative campaign</i> menolak sikap malas dan budaya <i>jalan pintas</i>	Depbudpar, Bapenas, Depdiknas, Masyarakat Adat, Dep. Koperasi, Dep. Pemuda dan Olahraga
			Sosialisasi nilai-nilai lokal yang mendukung kerjakeras dan kreativitas	
			Kampanye produktivitas nasional	
			Penyediaan konteks sosial-ekonomi-politik bagi kerja keras dan kreativitas	
			Pemberdayaan kesempatan kerja sebagai hak warga negara	
			Penegakan aturan-aturan main yang bersih dalam berusaha	
Penghapusan diskriminasi dalam bidang usaha	<i>Affirmative action</i> untuk membantu pengusaha lemah dan koperasi			

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

9. **Sikap terhadap Kelompok** : Orientasi kepada Kelompok Kesukuan

TUJUAN: Membangun dan mengarahkan secara positif orientasi kesukuan bagi sarana perekat sosial yang tidak bersifat eksklusif terhadap orang di luar kelompok kesuku bangsa.

Tabel 8.36 tabel Sikap Terhadap Kelompok

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya ikatan kesukuan yang bersifat positif terhadap integrasi sosial di tingkat kelompok	1. Intensitas hubungan kekerabatan dan sesama kelompok kesukuan	Aktualisasi nilai-nilai solidaritas kesuku bangsa secara positif	Pengembangan bahasa daerah dan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebanggaan lokal	Depbudpar, Depdagri, Dephankam, Depkominfo
			Penguatan lembaga/ perkumpulan kedaerahan yang membangun solidaritas kesuku bangsa secara positif (paguyuban, organisasi perantau, kelompok mahasiswa perantauan, ikatan pekerja di perantauan, dll)	
			Penguatan lembaga masyarakat adat untuk tujuan-tujuan yang positif	
	2. Frekuensi hubungan antar sesama suku bangsa dalam lingkup pekerjaan, sosial dan lainnya	Pengembangan acuan-acuan lokal/ kesuku bangsa sebagai sarana pembentukan karakter dan pekerti	Invetarisasi dan sosialisasi nilai-nilai positif kearifan lokal berbagai daerah	
			Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam konteks-konteks terbuah dan dalam hubungan sosial yang lebih kompleks/ majemuk	
			Intensifikasi penerapan nilai-nilai lokal dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa-bernegara	
3. Tingkat penggunaan atribut dan simbol kesuku bangsa sebagai identitas		Penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan nilai-nilai kepribadian lokal/ kesuku bangsa		
Berkurangnya orientasi kesukuan yang bersifat eksklusif terhadap orang di luar kelompok kesuku bangsa	1. Persepsi dan tingkat toleransi terhadap suku bangsa lain	Pengkisan nilai-nilai orientasi kesuku bangsa yang negatif	Pengembangan akar solidaritas sosial yang melintasi batas-batas kesuku bangsa	Depbudpar, Depdagri, Dephankam, Depdiknas
			Kampanye solidaritas nasional	
	2. Tingkat ketegangan antara kelompok suku bangsa asli dan pendatang	Pencegahan konflik antar suku bangsa	Pengembangan komunitas antar suku bangsa untuk menjalin saling pengertian	
			Pengurangan dan penghapusan stereotype yang menyebabkan kesalah-pahaman antar suku bangsa	
			Pengembangan forum-forum dialog untuk membantu penyelesaian sengketa antar suku bangsa dan sebagai mekanisme pencegahan konflik	
			Penyelesaian konflik secara adil, berkemanusiaan dan tuntas	

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

10. Budaya Ilmu Pengetahuan

TUJUAN: Memupuk sejak dini budaya cinta ilmu pengetahuan dan penghargaan terhadap pencapaian-pencapaian ilmu pengetahuan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup individual, masyarakat maupun berbangsa-bernegara.

Tabel 8.37 Budaya Ilmu Pengetahuan

TARGET	TINDAKTUDI	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA
Meningkatnya kecintaan terhadap ilmu pengetahuan	1. Tingkat konsumsi/ pembelian buku 2. Budaya membaca secara nasional dan lokal 3. Angka buta huruf nasional dan lokal 4. Persentase pelaksanaan wajib belajar 5. Jumlah tenaga terdidik di tingkat doktoral, magister dan sarjana strata I 6. Persepsi terhadap lembaga pendidikan sebagai tempat pencarian ilmu (bukan sekedar meperoleh gelar)	Penggalakan budaya cinta ilmu dan kegemaran menuntut ilmu	Kampanye nasional menggalakkan budaya membaca	Depbudpar, Depdiknas
			Pengembangan, perluasan, dan revitalisasi fungsi perpustakaan untuk meningkatkan minat baca	
			Penghapusan diskriminasi dalam kesempatan belajar	
			Jaminan dan intensifikasi pemberian beasiswa bagi kelanjutan pendidikan siswa berprestasi yang tidak mampu	
Meningkatnya penghargaan terhadap pencapaian-pencapaian ilmu pengetahuan	1. Tingkat pelanggaran hak cipta/ hak milik intelektual 2. Jumlah penemuan baru, pengembangan ilmu, dan hasil inovasi dalam satu kurun waktu 3. Perlindungan hukum terhadap berbagai aspek hak cipta/ hak milik intelektual	Penguatan kelembagaan	Pelebagaan gerakan pemberantasan buta aksara dan penguatan jalur pendidikan non-formal untuk kategori khusus (anak jalanan, pekerja anak, anak korban konflik, korban bencana alam, dll)	Depbupar, Depkominfo, Dep. Kehakiman
			Pemberdayaan pelatihan keterampilan sebagai sarana peningkatan <i>skill</i> dan pengetahuan kerja, khususnya bagi masyarakat tidak mampu	
			Perluasan program wajib belajar 9 tahun dengan meningkatkandukungan prasarana dan sarana (guru, sekolah, buku ajar, pembebasan biaya, dll)	
Meningkatnya penghargaan terhadap pencapaian-pencapaian ilmu pengetahuan	1. Tingkat pelanggaran hak cipta/ hak milik intelektual 2. Jumlah penemuan baru, pengembangan ilmu, dan hasil inovasi dalam satu kurun waktu 3. Perlindungan hukum terhadap berbagai aspek hak cipta/ hak milik intelektual	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penghargaan terhadap pencapaian-pencapaian ilmu pengetahuan	Kampanye nasional anti pembajakan dan pemberantasan pelanggaran hak cipta/ hak milik intelektual, dengan prioritas hak cipta nasional	Depbupar, Depkominfo, Dep. Kehakiman
			Pembentukan karakter ilmiah dan norma kejujuran akademis	
			Penguatan payung hukum perlindungan hak cipta/ hak milik intelektual	

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Meningkatnya sikap memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan	1. Angka persentase budget penelitian dan pengembangan di sektor publik maupun privat	Menghidupkan aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Menggalakkan gairah melakukan penelitian di berbagai disiplin ilmu	Depbudpar, Depdiknas, Depkominfo
	2. Jumlah publikasi hasil penelitian di tingkat lokal dan nasional		Pengembangan sarana dan prasarana penunjang aktivitas riset (laboratorium, perpustakaan, jurnal)	
	3. Angka pendaftaran hak paten nasional		Sosialisasi dan penghargaan terhadap penemuan, hasil penelitian, inovasi dan prestasi pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan putra Indonesia	

11. Budaya Dagang / Kewiraswastaan

TUJUAN: Menyuburkan budaya wirausaha dan jiwa kewiraswastaan sebagai suatu sikap untuk mandiri, hemat dan berani mengambil resiko dalam membuka lapangan-lapangan kegiatan ekonomi baru, baik secara individual, kolektif maupun dalam berbangsa-bemegara.

Tabel 8.38 Budaya Dagang

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	LANGKAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	
Meningkatnya kemandirian, hemat, dan berani mengambil resiko dalam kegiatan ekonomi individual, kolektif maupun dalam berbangsa-bemegara.	1. Persentase pengisian lapangan kerja di sektor swasta dibandingkan sektor publik	Peningkatan jiwa kewiraswastaan	Kampanye menggalakkan jiwa kewiraswastaan nasional	Depbudpar, Dep. Koperasi, Dep. Perindustrian, Depkominfo, Bapenas	
			Pengembangan dan revitalisasi nilai-nilai lokal yang mendukung jiwa kewiraswastaan		
			Menumbuhkan kelas wiraswasta pribumi yang kuat		
	2. Tata kelembagaan dan aturan hukum yang mengatur persaingan usaha	Penciptaan iklim pesaingan usaha yang sehat	Pencegahan praktek-praktek perdagangan tidak sehat (monopoli, <i>rent seeking</i> , praktek <i>dumping</i> , penyeludupan, dll)		
			Dukungan kepada praktek usaha yang sehat melalui insentif, kredit, pengurangan pajak, dll.		
			<i>Affirmative action</i> membantu pertumbuhan usaha koperasi dan UKM		
	3. Proporsi anggaran untuk meningkatkan pengembangan UKM dan koperasi	4. Jumlah dan jenis aktivitas usaha ekonomi swasta di tingkat lokal maupun nasional	Penguatan Kelembagaan		Pengembangan program kemitraan swasta dan usaha kecil (koperasi dan UKM)
					Revitalisasi lembaga-lembaga ekonomi lokal
					Perluasan kesempatan berusaha bagi semua orang
					Melindungi usaha kecil dari persaingan industri/modal asing
5. Tingkat ketersediaan modal, teknologi, akses pasar, dan promosi khususnya bagi usaha koperasi dan UKM			Pengembangan sektor manufaktur dan jasa secara seimbang		

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Berkurangnya sikap konsumtif dalam kegiatan ekonomi individual, kolektif maupun dalam berbangsa-bernegara.	1. Rasio tabungan nasional terhadap GNP	Pengkisan kebiasaan hidup boros, hidup mewah dan konsumtif	Kampanye anti pemborosan dan hidup mewah	Depbudpar, Dep. Koperasi, Depkominfo
	2. Pola konsumsi nasional		Pembentukan karakter hemat dan hidup bersahaja	
	3. Tingkat investasi individu	Penguatan budaya investasi produktif	Penggalakan dan revitalisasi budaya menabung	
	4. Angka laju pertumbuhan modal usaha kecil dan menengah		Penggalakan perilaku investasi produktif ketimbang membelanjakan yang konsumtif	
			Penciptaan peluang-peluang usaha baru terutama untuk investasi kecil dan menengah	

12. Budaya Mencipta / Kreatif

TUJUAN: Membentuk pemikiran dan sikap terbuka dalam menemukan/mencari hal-hal baru secara kreatif tanpa terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada.

Tabel 8.39 Budaya Mencipta

TARGET	INDIKATOR	KEBIJAKAN	TANGKAH KEBIJAKAN	PEBAKSIANA
Meningkatnya keterbukaan dalam pencarian hal-hal baru secara kreatif dan positif	1. Iklim kebebasan kreatif yang ada 2. Tingkat apresiasi terhadap karya kreatif 3. Jumlah karya kreatif yang dihasilkan seniman dari berbagai cabang seni dalam satu kurun waktu	Pemupukan kreativitas	Penanaman nilai kreatif melalui pendidikan kesenian di berbagai cabang (sastera, musik, seni rupa, tari, kerajinan, teater, dll)	Depbudpar, Diknas
			Kebanggaan terhadap karya cipta lokal/nasional	
		Penghargaan terhadap cipta kreatif	Penyelenggaraan lomba-lomba cipta seni dan kreativitas, khususnya untuk anak-anak, remaja dan pemuda	
			Membangun iklim kebebasan kreatif yang seluas-luasnya dan bertanggung-jawab	
		Penumbuhan daya apresiasi	Membangun peningkatan daya apresiasi melalui pendidikan sekolah maupun kegiatan luar sekolah	
			Pengembangan media-media ekspresi alternatif yang membuka ruang apresiasi semakin luas	

Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Mengurangi sikap ketergantungan kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak relevan lagi	1. Tingkat budaya meniru/ menjiplak karya orang lain	Pengkikisan budaya meniru/menjiplak	<i>Negative campaign</i> menolak penjiplakan/ peniruan tidak kreatif	Depbudpar, Diknas, Dep. Kehakiman
	2. Jumlah pembaharuan yang dilakukan di berbagai bidang untuk menerobos cara-cara baru yang lebih segar		Perlindungan hukum bagi hasil-hasil karya kreatif	
	3. Efektivitas upaya-upaya pembaharuan dalam berbagai aspek		Penanaman sikap ilmiah dan norma kejujuran akademis	
	Penguatan iklim pembaharuan di berbagai lapangan kehidupan pribadi, sosial, dan berbangsa-bernegara	Sosialisasi budaya pembaharuan di berbagai bidang, melakukan inovasi terhadap hal-hal lama yang sudah mandeg Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal untuk adaptif terhadap perubahan dan mampu melakukan pembaharuan		

8.8. Strategi Implementasi PKPB

8.8.1. Prioritas dan Tahapan Waktu

Prioritas pada strategi implementasi Pembangunan Karakter dan Pekerti bangsa adalah sebagai berikut:

1. Membantu Resolusi Konflik: sebagai prioritas utama, yakni memberikan sumbangan terhadap resolusi konflik di daerah-daerah melalui pendekatan karakter dan pekerti sebagai basis pendekatannya.
2. Bidang Pendidikan: yaitu melakukan rintisan muatan kurikulum pendidikan berbasis karakter dan pekerti.
3. Sosialisasi: yaitu melakukan sosialisasi visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
4. Kerjasama lintas sektoral/lintas Departemen: membangun inisiatif koordinasi program-program terkait pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilakukan berbagai pihak.

8.8.2. Kewilayahan

Strategi Kewilayahan berdasarkan prioritasnya dibagi sebagai berikut:

- a. Daerah potensial konflik: dengan maksud dan tujuan adalah mencegah potensi konflik berkembang menjadi konflik terbuka
- b. Daerah konflik: dengan maksud dan tujuan adalah membantu pencegahan terulangnya konflik serupa di masa mendatang
- c. Daerah harmonis: dengan maksud dan tujuan adalah membangun model kerjasama harmonis dalam keragaman.

Strategi kewilayahan berdasarkan geografis yaitu:

- a. Kawasan Barat Indonesia
- b. Kawasan Tengah Indonesia
- c. kawasan Timur Indonesia

Strategi Kewilayahan berdasarkan aspek sosio-antropologis adalah:

- a. Wilayah Perkotaan
- b. Wilayah Antara
- c. Wilayah Pedesaan

8.8.3. Pola Pendanaan

Pola pendanaan yang digunakan adalah:

1. Anggaran kerja tahunan (departemen kebudayaan dan Pariwisata)
2. Dana hibah
3. Kerjasama swasta
4. Kerjasama lintas sektoral/lintas departemen

8.8.4. Koordinasi Antar Sektor Terlibat

Koordinasi dilakukan dengan mekanisme:

a. Vertikal

- Membentuk kaukus yang menggabungkan stakeholder Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa secara berjenjang dari tingkat nasional sampai ke daerah-daerah
- Mengusulkan dibentuknya Direktorat Jendral PKPB atau badan khusus.

b. Horizontal

- Melakukan *workshop-workshop* pembangunan karakter dan pekerti bangsa dalam rangka menyamakan visi dan pandangan.

BAB IX

P E N U T U P

Terlaksananya kegiatan *Penyusunan Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa* hingga tahap ini, telah memberikan sejumlah *output* yang diharapkan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada. Kendati demikian diakui bahwa penyusunan hasil studi sejauh ini tidaklah mudah, mengingat beragamnya masukan yang diterima baik dari pihak-pihak di daerah maupun tenaga ahli yang berasal dari disiplin yang berbeda. Sebagai cermin dari pluralitas/ kemajemukan bangsa, hasil tersebut tidak dimaksudkan agar menjadi seragam dengan mengorbankan variasi-variasi di lapangan. Namun tidak dapat dihindari pula bahwa suatu strategi pembangunan meniscayakan penyederhanaan, dengan tujuan mendapatkan fokus terhadap pembedanaan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

Untuk menarik suatu garis tengah seimbang di antara kedua pertimbangan di atas tidaklah mudah. Inilah permasalahan yang akan dihadapi dalam merumuskan strategi pembangunan di bidang apa pun, lebih khusus lagi yang bersentuhan dengan keragaman budaya. Secara praktis, perlu disadari dan diakui bahwa penyusunan strategi PKPB ini tidak memberikan hasil final, yang segera dapat diimplementasikan ke dalam bentuk program-program kegiatan yang baku.

Dengan kata lain, dibutuhkan lebih banyak lagi 'penghalusan-penghalusan' terhadap kesimpulan yang diperoleh, terutama mempertimbangkan suara *stakeholder* di daerah-daerah yang barangkali belum tertampung dalam proses kegiatan saat ini. Lebih jauh, pada level strategik-implementatif, bagaimana menggalang sinergi di antara instansi/departemen terkait yang memiliki *concern* dan keprihatinan yang sama mengenai tema pembangunan karakter dan pekerti bangsa ini – misalnya departemen pendidikan, departemen dalam negeri, departemen komunikasi dan informasi, departemen pertahanan dan keamanan, kementerian pemberdayaan perempuan, serta berbagai komponen kemasyarakatan yang bergerak di bidang sejenis. Pada level tertinggi di tingkat nasional, tidak dapat dipungkiri kegiatan ini dapat mencapai skala yang optimal apabila didukung dengan kerjasama sinergis di antara komponen-komponen tersebut.

PROFIL TIM AHLI STRATEGI PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA

Prof. Dr. Abdul Hadi WM

Abdul Hadi adalah seorang tokoh budayawan yang telah menulis dan menerjemahkan banyak buku terutama buku-buku puisi. Di antaranya ia menerjemahkan karya pujangga besar Pakistan Mohammad Iqbal, *Pesan Kepada Bangsa-Bangsa Timur*. Ia juga aktif menerjemahkan karya Jaluddin Rumi, Hafiz, Goethe, penyair sufi Persia serta penyair modern Jepang. Puisi karyanya sendiri kini sudah terhimpun dalam delapan buku puisi, antara lain *Laut Belum Pasang, Meditasi, Cermin, Tergantung Pada Angin dan Anak Laut Anak Angin*. Kebanyakan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Arab, Perancis, Belanda, Jepang, Jerman, Cina, Thailand, Bengali, Urdu, Korea dan Spanyol. Beliau juga baru saja meluncurkan buku terbarunya berjudul *Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber: Esai-esai Sastra Profetik dan Sufistik*. Isinya berupa kumpulan esainya tentang kesusastraan Islam di Nusantara serta tentang peran penulis sufi dalam perkembangan kebudayaan dan kesusastraan Islam.

Debut sastranya bermula saat ia kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada untuk meraih gelar sarjana mudanya. Gelar MA dan PhD diperolehnya di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia dengan disertasi Estetika Sastra Sufistik: Kajian Hermeneutik terhadap Karya-karya Shaykh Hamzah Fansuri. Kini ia menjadi dosen di Universitas Paramadina Mulya Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta serta

dosen tamu di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Di era reformasi ini Abdul Hadi juga terlibat aktif di partai. Ia dipercaya menjadi salah seorang anggota Majelis Pakar PPP bersama Prof Baharuddin Lopa, Dr Nasir Tamara, Bismar Siregar SH serta Dr Sayuti Hasibuan.

Pria kelahiran Sumenep 24 Juni 1946 ini pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Seni-Budaya dan sebagai Ketua Tim Perumus Sistem Pendidikan Nasional PP Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Dr Amien Rais dan Dr Ahmad Syafi'i Ma'arif. Abdul Hadi pernah menjadi Editor Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, pengasuh lembar kebudayaan Dialog di Harian Berita Buana, Staf Ahli Bagian Penaskahan PN Balai Pustaka serta Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Pernah pula menjadi pengajar pada Fakultas Sastra UI dan Institut Kesenian Jakarta sebelum menjadi dosen di Universiti Sains Malaysia selama tujuh tahun.

Dr. Ibnu Hamad, M.Si.

Ibnu Hamad, Doktor muda dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, merupakan ahli analisis wacana. Dosen yang kini menjadi salah satu anggota kelompok Dosen Inti FISIP UI ini mengajar beberapa mata kuliah seperti Teknik Penulisan Artikel Opini, Sistem Komunikasi Indonesia, Etika dan Filsafat Komunikasi, Pengantar Analisis Wacana, Riset Periklanan, Pengantar Ilmu Komunikasi, Teori Komunikasi, Teori Komunikasi Massa, Evaluasi Media, Sosiologi Komunikasi, Sistem Komunikasi Indonesia, dan Sejarah Media Massa di Indonesia.

Beliau telah menulis beberapa artikel baik berupa hasil pemikiran sendiri maupun hasil penelitian yang telah dilakukan, di antaranya "Kabar-kabar Kebencian Prasangka Agama di Media Massa" diterbitkan oleh ISAI, ISBN: 979-8933-30-3; "Semiotika untuk Studi Media" dalam Majalah Pantan Edisi 08, Maret-April 2000; "Saluran atau Agen Politik dalam Majalah Kupas Jurnal Media Watch Vol.3 No.1 Tahun 2001; dan "Uji Kebenaran dan Keberanian Wakil Rakyat" dalam harian Republika.

Peraih penghargaan untuk dosen terproduktif untuk Departemen Ilmu Komunikasi oleh SM FISIP UI ini juga aktif melakukan berbagai penelitian, seperti "Efektivitas Pendidikan Politik di Media Massa (Studi Evaluasi Penyampaian Pesan Pendidikan Politik di Media Massa di Kalangan Mahasiswa di Wilayah DKI Jakarta)" pada tahun 2000, "Media Massa dan Prasangka Agama" dibiayai oleh ISAI pada tahun yang sama, serta "Standar Umum Penyuluhan Sosial" diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Sosial DEPKES RI Tahun 2001.

Dr. Bambang Rudito

Bambang Rudito adalah seorang antropolog yang sempat mengadakan penelitian cukup lama di Mentawai sehingga dikenal sebagai ahli Mentawai di kalangan para antropolog Indonesia. Pria yang lahir di Jakarta pada 13 Januari 1959 ini menyelesaikan sarjana Antropologinya Universitas Indonesia pada tahun 1984. Ia menyelesaikan Master Kependudukan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Sementara gelar Doktornya diperoleh dari Departemen Antropologi di Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Keterlibatannya dalam berbagai penelitian sudah merupakan sesuatu yang lazim. Beberapa penelitiannya antara lain yakni Pemetaan Sukubangsa di Kabupaten Agam Sumatera Barat pada tahun 2004, Resolusi konflik melalui penelitian nilai budaya dan institusi sosial masyarakat yang bertikai di daerah Poso, Kalimantan dan Ambon pada tahun 2002, Transmigrasi di Pulau Sipora Kepulauan Mentawai oleh Departemen Transmigrasi pada tahun 1999, Permukiman Kembali Masyarakat Mentawai di Sua-Totoet oleh Departemen Sosial pada tahun 1998, Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Tradisional oleh Wanita Mentawai, dll.

Beliau telah menulis sejumlah buku. Yang terbaru di antaranya adalah *Audit Sosial* yang diterbitkan oleh ICSD pada tahun 2006, *Food Restriction and Prescription During Pregnancy and Childbirth Among a Javanese Community in Minangkabau Area* yang diterbitkan oleh NHF-Belanda pada 2005, *Sustainable Future dan Komuniti Lokal* yang diterbitkan oleh ICSD pada tahun 2005, serta *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development dan Corporate Social Responsibility: Membangun Sintesis Baru Hubungan Perusahaan dengan Komuniti* yang juga diterbitkan oleh ICSD pada tahun 2003..

Afandi, M.Si

Lelaki yang juga merupakan seorang antropolog ini adalah salah satu anggota pendiri dan sekretaris pada Lembaga Kajian Budaya Indonesia sejak tahun 2002 sampai sekarang. Beliau sempat berprofesi sebagai pengajar pada mata kuliah Pengantar Antropologi dan Sistem Sosial Indonesia pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Ia juga menjadi asisten Koordinator pada Program Revitalisasi Seni Tradisi Lisan Didong Gayo,

kerjasama antara Balitbang IKJ, The Ford Foundation dan Asosiasi Tradisi Lisan. Profesi sebagai pengajar mata kuliah MKDU pada Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1999-2002 tidak menghalangi untuk terus berkiprah dalam bidang penelitian. Beberapa prestasi dalam bidang penelitian dicapainya antara lain pada tahun 1999-2000 sebagai Research Associate pada PT Pacific Rekanprima Management Services, pada tahun 1997-2001 sebagai Research Associate pada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, dan pada tahun 1993-1995 sebagai Research Associate pada Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta.

Sosok pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 1969 ini, merupakan staf ahli PT Sentra Bina Usahatama. Afandi menyelesaikan program Magister Antropologinya pada tahun 2005 di Universitas Indonesia. Saat ini ia telah menjadi karyawan tetap dari PT Sentra Bina Usahatama.

Perpustakaan
Jenderal